



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) STUDI KASUS: DESA  
MAYANGAN, KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

**NAKINDA NOVRASAGELIN**

**0806397055**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP)  
STUDI KASUS: DESA MAYANGAN, KABUPATEN SUBANG  
JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ilmu Administrasi

**NAKINDA NOVRASAGELIN**

**0806397055**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI  
DEPOK  
JUNI 2012**



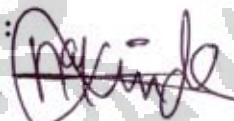
UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA

### HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nakinda Novrasagelin

NPM : 0806397055

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juni 2012



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nakinda Novrasagelin  
NPM : 0806397055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat

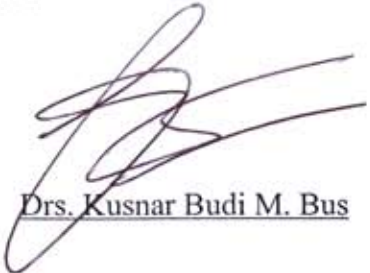
Telah diperiksa oleh Ketua Program Sarjana dan Pembimbing serta dinyatakan layak untuk diajukan ke sidang Skripsi Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Ketua Program Sarjana,

Disetujui oleh

Pembimbing,

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si

  
Drs. Kusnar Budi M. Bus



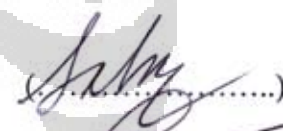
UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

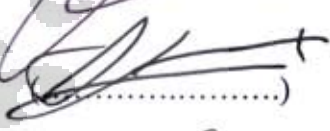
Nama : Nakinda Novrasagelin  
NPM : 0806397055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan  
Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa  
Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

#### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Waluyo I. Isworo., M.Ec (PA) 

Pembimbing : Drs. Kusnar Budi., M.Bus 

Penguji Ahli : Achmad Lutfi., S.Sos, M.Si 

Sekretaris Sidang : Maria R.U.D., S.I.A 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Segala pujian dan kesempurnaan adalah milik Allah SWT dan atas rahmat serta kasih sayang-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi dengan tema pembangunan perdesaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan di bidang pembangunan perdesaan.

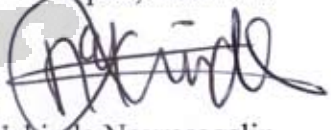
Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi peneliti menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan terwujudnya skripsi ini, adapun ucapan ini ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler/Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
3. Drs. Kusnar Budi M. Bus, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini maupun selama masa perkuliahan;
4. Seluruh Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji sidang skripsi ini;
5. Para dosen Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama peneliti menjalani masa kuliah di FISIP UI;
6. Abdul Hakam, ST. MT, selaku supervisor pada saat magang sampai dengan skripsi ini selesai atas kesediaannya dalam membimbing dan meluangkan waktunya.
7. Para narasumber yang telah memberikan informasi yang sangat membantu serta masukan dalam penulisan skripsi ini;

8. Ayah, Bunda, Oma, dan Akram yang selama ini telah memberikan sokongan serta doa untuk keberhasilan saya dan menjadi motivasi terbesar untuk terus membuat kalian bangga;
9. Teman-teman terbaik saya sedari kecil, Cede, Cindy, Sari, Pucul, Anna, Bella, Dhania, dan Listy yang selalu menemani, menghibur, dan memotivasi saya;
10. Teman-teman seperjuangan selama kuliah, Anita, Indah, Yessy, Regina, dan Denita yang selalu memberi semangat dan inspirasi;
11. M. Rustam Febrianzah Thamrin yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala kebaikan, dukungan dan bantuannya. Peneliti berharap semoga kebaikan, dukungan, dan bantuan dari semua pihak tersebut mendapatkan imbalan berlipat ganda dari Allah SWT.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, karena masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan terbatasnya kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, selalu peneliti nantikan dari pihak manapun dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih.

Depok, Juni 2012



Nakinda Novrasagelin

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nakinda Novrasagelin  
NPM : 0806397055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat

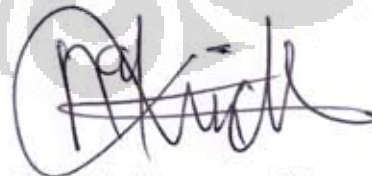
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan



(Nakinda Novrasagelin)





UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA

## ABSTRAK

**Nama** : **Nakinda Novrasagelin**  
**Program Studi** : **Ilmu Administrasi Negara**  
**Tema** : **Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan  
Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa  
Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan program pemerintah yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sangat dibutuhkan karena banyaknya desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan desa tersebut terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk juga pada kegiatan ekonomi. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) bersifat *open menu*, yang artinya masyarakat desa dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desanya. Adanya PPIP yang sudah terlaksana sejak tahun 2007, maka keefektifitasan program tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa sasaran akan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur yang berlokasi di desa Mayangan efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa Mayangan.

Kata kunci: Efektivitas, Pembangunan Perdesaan, Kebijakan Pemerintah



UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES  
DEPARTEMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE  
UNDERGRADUATE PROGRAM

## ABSTRACT

**Name** : Nakinda Novrasagelin  
**Study Program** : Public Administration  
**Tema** : Effectivity of Rural Infrastructure Development Program (PIIP) Case Study of Mayangan Village, Subang Regency West Java

This research aims to analyze the effectivity of government program, the Rural Infrastructure Development Program (PIIP) Case Study of Mayangan Village, Subang Regency West Java. This research also uses positivist approach with qualitative method by in-depth interview and library studies. Rural infrastructure development is needed due to limited infrastructure activities in daily basis, including economic matters. Rural Infrastructure Development Program (PIIP) is acting with open menu that giving freedom to villagers to decide their own development. PIIP has been activated from 2007 and the effectivity of the program will be analyzed further in this research. The result of this research is the Rural Infrastructure Development Program (PIIP) in Mayangan Village has been solving various issues effectively that exists in Mayangan Village.

**Keywords:** Effectivity, Rural Development, Government Policy

## DAFTAR ISI

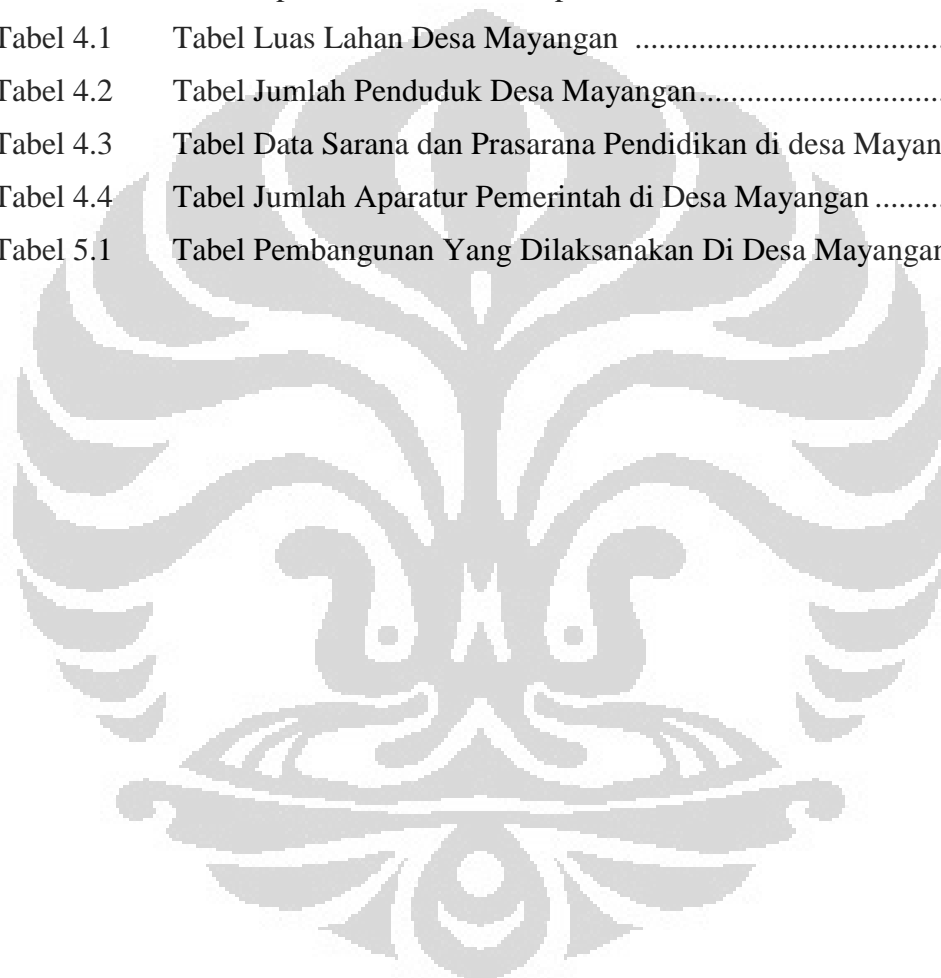
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Signifikansi Penelitian	
1.4.1. Signifikansi Akademis .....	15
1.4.2. Signifikansi Praktis .....	15
1.6 Sistematika Penelitian.....	15
<b>BAB 2 KERANGKA PENELITIAN</b> .....	18
2.1. Tinjauan Pustaka .....	18
2.2. Kerangka Teori.....	25
2.2.1 Konsep Pemerintahan Desa .....	25
2.2.2 Pembangunan Desa.....	27
2.2.3 Efektivitas Implementasi Kebijakan .....	29
2.3. Operasionalisasi Konsep .....	37

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	39
3.1. Pendekatan Penelitian .....	39
3.2. Jenis Penelitian.....	40
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian .....	40
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian .....	40
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu .....	41
3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.3. Narasumber .....	42
3.4. Teknik Analisis Data.....	43
3.5. Batasan Penelitian .....	44
<b>BAB 4 GAMBARAN UMUM</b> .....	46
4.1. Gambaran Umum Instansi .....	46
4.1.1 Visi dan Misi Instansi .....	47
4.1.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jendral Cipta Karya.....	47
4.1.1.2 Visi dan Misi Pengembangan Permukiman.....	48
4.2. Struktur Organisasi Instansi .....	49
4.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Permukiman .....	50
4.3. Produk Instansi.....	50
4.4. Organisasi dan Manajemen Instansi.....	53
4.5. Gambaran Umum PPIP .....	54
4.6. Gambaran Umum Desa Mayangan Kabupaten Subang Jawa Barat .....	55
4.6.1 Hidrologi dan Klimatologi.....	56
4.6.2 Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan .....	56
4.6.3 Kependudukan .....	56
4.6.4 Pendidikan .....	57
4.6.5 Kondisi Pemerintah Desa.....	58
<b>BAB 5 EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) STUDI KASUS: DESA MAYANGAN, KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT</b> .....	61
5.1 Efektivitas PPIP di Desa Mayangan .....	61
5.1.1 Ketepatan Kebijakan Pemerintah .....	61
5.1.1.1 Ketepatan Kebijakan .....	62

5.1.1.2	Kebijakan dirumuskan Sesuai Dengan Masalah .....	66
5.1.1.3	Lembaga Pembuat Kebijakan.....	70
5.1.2	Ketetpatan Pelaksanaan.....	75
5.1.3	Ketepatan Sasaran .....	80
5.1.3.1	Kesesuaian Sasaran dengan Perencanaan PPIP .....	81
5.1.3.2	Intervensi Selama Pelaksanaan PPIP .....	96
5.1.3.3	Sumber Daya Manusia .....	98
5.1.4	Ketetpatan Lingkungan .....	101
5.1.4.1	Lingkungan Internal Kebijakan.....	101
5.1.4.2	Lingkungan Eksternal Kebijakan .....	104
5.2	<i>Outcomes</i> .....	106
<b>BAB 6</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>109</b>
6.1	Kesimpulan .....	109
6.2	Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>111</b>

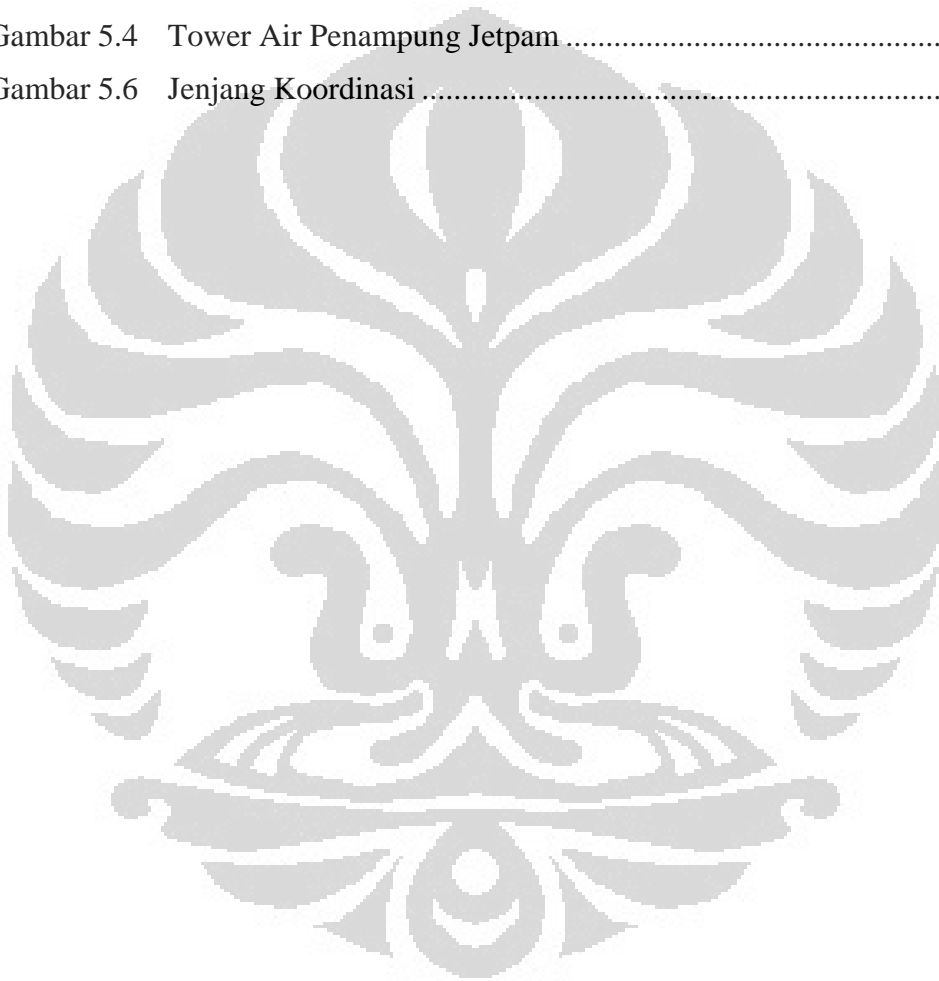
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Garis Kemiskinan Menurut Daerah .....	3
Tabel 1.2	Tabel Garis Miskin Menurut Provinsi .....	5
Tabel 1.3	Tabel Daftar Desa Penerima PPIP Tahun 2009.....	10
Tabel 2.1	Tabel Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka .....	21
Tabel 2.2	Tabel Kriteria Evaluasi .....	32
Tabel 2.3	Tabel Operasioanlisasi Konsep .....	37
Tabel 4.1	Tabel Luas Lahan Desa Mayangan .....	56
Tabel 4.2	Tabel Jumlah Penduduk Desa Mayangan.....	57
Tabel 4.3	Tabel Data Sarana dan Prasarana Pendidikan di desa Mayangan .....	57
Tabel 4.4	Tabel Jumlah Aparatur Pemerintah di Desa Mayangan .....	58
Tabel 5.1	Tabel Pembangunan Yang Dilaksanakan Di Desa Mayangan .....	86



## DAFTAR GAMBAR

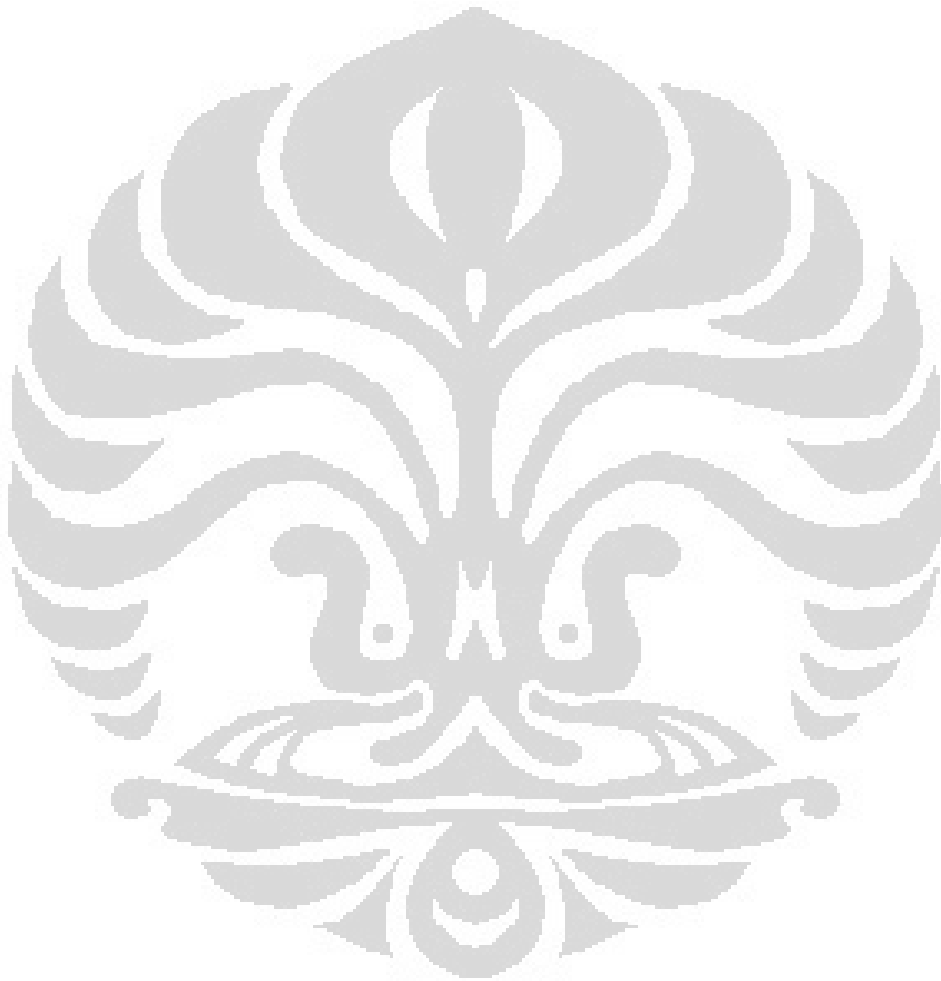
Gambar 2.1	Langkah Mengimplementasikan Kebijakan Publik.....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Direktorat pengembangan Permukiman .....	50
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mayangan .....	59
Gambar 5.1	Jadwal Pelaksanaan .....	67
Gambar 5.2	Tahap Perencanaan Tingkat Desa.....	70
Gambar 5.3	Pintu Air .....	88
Gambar 5.4	Tower Air Penampung Jetpam .....	89
Gambar 5.6	Jenjang Koordinasi .....	103



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Pedoman Wawancara Mendalam

**Lampiran 2** Peta Desa Mayangan





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keterbatasan infrastruktur sudah menjadi masalah lama yang dihadapi oleh perdesaan terutama dalam pembangunan perdesaan. Untuk menangani masalah infrastruktur sebaiknya ditangani berdasarkan kebutuhan dan ketepatangunaan. Maksud dari kebutuhan ialah, infrastruktur yang akan dibangun seyogyanya sesuai dengan apa yang masyarakat desa itu butuhkan dan nantinya akan terkait dengan masalah ketepatangunaan. Apabila infrastruktur tersebut dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa maka kegunaan dari pembangunan infrastruktur itu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pembangunan perdesaan, infrastruktur merupakan salah satu kendalanya. Ketertinggalan pembangunan berbagai infrastruktur di perdesaan mengakibatkan keterbatasan masyarakat desa dalam berkomunikasi, produksi dan mengakses informasi. Hal ini merupakan hambatan dalam mengakses dan keterbatasan kemampuan. Salah satu contohnya adalah akses fisik yang tidak layak karena buruknya infrastruktur seperti jalan. Jaringan jalan yang buruk akan menghambat kegiatan masyarakat perdesaan ke sentra-sentra ekonomi dan industri di sekitarnya, membatasi pemasaran produk yang dihasilkan, atau dapat juga menghambat perjalanan wisatawan jika wilayah tersebut memiliki obyek wisata yang menarik. Lebih dari itu, keterbatasan ketersediaan jaringan jalan yang memadai juga akan mengurangi daya tarik investasi baik yang berasal dari lokal maupun yang dari luar (Arsyad, Lincoln dkk, 2011, p. 10).

Sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 No. 23 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang: <http://www.pu.go.id>, diunduh 18 Oktober 2011 pukul 21.35 WIB). Pertanian adalah kegiatan utama di perdesaan, dan banyak desa yang hingga sekarang kesulitan untuk menjangkau ke lahan pertanian, sehingga harus

mengeluarkan biaya yang banyak untuk menjangkau lahan pertanian, terlebih lagi ketika masyarakat ingin membawa hasil tani tersebut dari ladang ke tempat penyimpanan atau dari ladang ke konsumen. Hal tersebut terjadi karena minimnya infrastruktur fisik yang tersedia di perdesaan, sehingga wajar jika masyarakat desa yang mayoritas penduduknya memiliki penghasilan dari pertanian mengalami hambatan dalam menjangkau lahannya sehingga memiliki pengeluaran yang besar untuk menjangkaunya dan penghasilan yang tidak lebih besar daripada pengeluarannya. Oleh karena itu, banyaknya penduduk miskin di desa juga dipengaruhi karena keterbatasan infrastruktur fisik yang dibangun di desa.

Infrastruktur yang terbatas menyebabkan kemiskinan di perdesaan merupakan suatu masalah yang serius di Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Dari banyaknya gangguan hingga melemahnya kegiatan ekonomi dan memburuknya layanan pendidikan ataupun kesehatan. Kemiskinan itu sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan serta mengembangkan kehidupan yang layak (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar yaitu hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan juga hak yang diakui dalam perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui itu antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun lelaki (Bappenas, 2004). Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks yang berkaitan dengan berbagai dimensi yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu.

Berikut adalah tabel 1.1 jumlah dan presentase penduduk miskin menurut daerah periode Maret 2009 – Maret 2010. Kemiskinan yang terjadi di perdesaan penurunannya relatif kecil, sehingga di desa kemiskinan adalah suatu hal yang lumrah dan terjadi secara terus menerus.

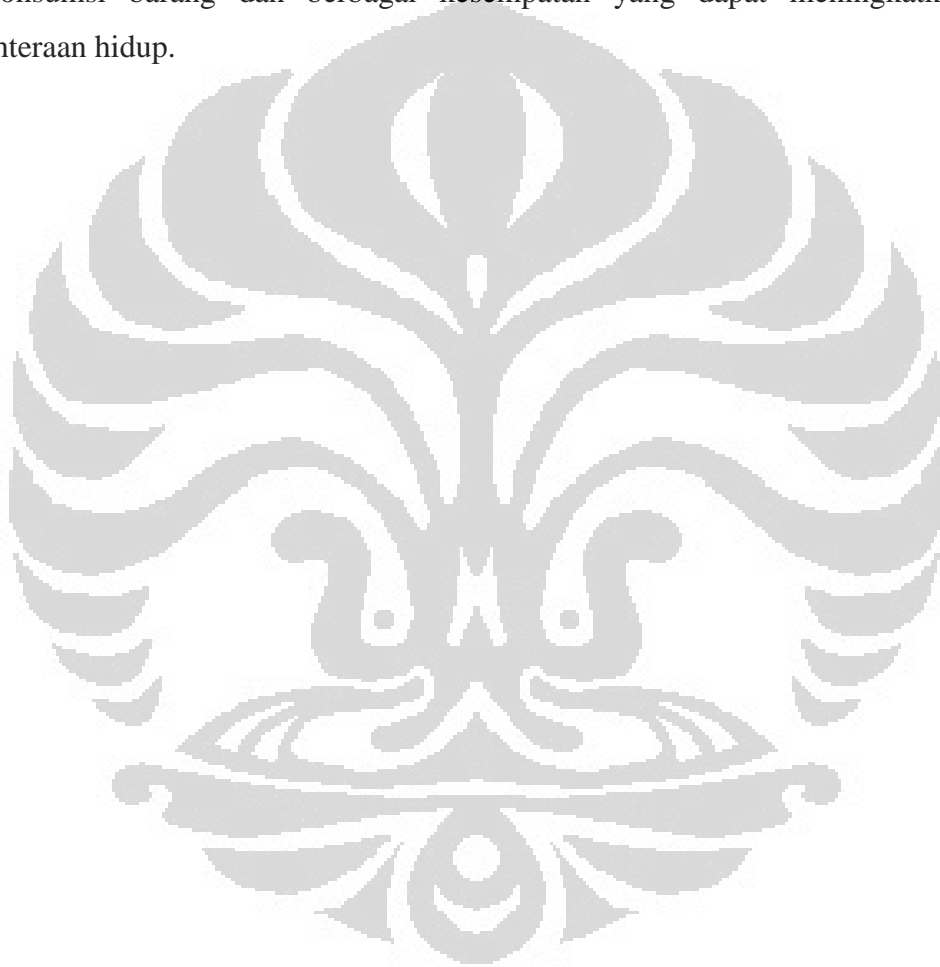
**Tabel 1.1: Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2009- Maret 2010**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b><u>Perkotaan</u></b>					
Maret 2009	155 909	66 214	222 123	11,91	10,72
Maret 2010	163 077	69 912	232 989	11,10	9,87
<b><u>Perdesaan</u></b>					
Maret 2009	139 331	40 503	179 835	20,62	17,35
Maret 2010	148 939	43 415	192 354	19,93	16,56
<b><u>Kota+Desa</u></b>					
Maret 2009	147 339	52 923	200 262	32,53	14,15
Maret 2010	155 615	56 111	211 726	31,02	13,33

Sumber : diolah dari data susenas BPS dari Maret 2009 – Maret 2010.

Selama periode Maret 2009 – Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010) sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta (dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010) (berita resmi statistik : 2010). Kemiskinan di suatu desa tidak terlepas dari stratifikasi sosial yang sudah ada sejak lama. Ketimpangan ekonomi dapat dilihat dari penguasaan sumber daya, yang menyangkut pemilikan lahan yang sejak dulu sudah menjadi fenomena yang penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Kemiskinan di perdesaan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Secara teoritis kemiskinan di perdesaan dapat dikurangi bila kesempatan kerja disektor nonpertanian terbuka. Namun kenyataan tidak demikian karena di perdesaan menghadapi persoalan aksesibilitas sehingga kesempatan bekerja di sektor nonpertanian sangat terbatas. Sementara daya dukung lahan pertanian tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Rendahnya pendapatan disebabkan oleh kurangnya kesempatan dalam kegiatan produktif karena terkait dengan tidak dimilikinya aset fisik, modal, keterampilan dan tidak adanya aksesibilitas terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Kemiskinan sesungguhnya merupakan kenyataan dari suatu susunan masyarakat dengan penduduk yang padat, terbatasnya sumber daya, terbatasnya akses terhadap barang konsumsi, tingkat kesehatan yang rendah dan kesempatan pendidikan yang tidak merata. Kepadatan penduduk telah menyebabkan penurunan terhadap sumber daya sehingga ada sebagian besar penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh struktur sosial ekonomi yang cenderung membatasi penduduk tertentu di dalam mengkonsumsi barang dan berbagai kesempatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.



**Tabel 1.2: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Maret 2009-2010)**

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)						Persentase Penduduk Miskin (%)					
		Kota		Desa		K+D		Kota		Desa		K+D	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	NAD	182,19	173,37	710,68	688,48	892,86	861,85	15,44	14,65	24,37	23,54	21,80	20,98
12	Sumatra Utara	688,04	689,00	811,64	801,89	1.499,68	1.490,89	11,45	11,34	11,56	11,29	11,51	11,31
13	Sumatra Barat	115,78	106,18	313,48	323,84	429,25	430,02	7,50	6,84	10,60	10,88	9,54	9,50
14	Riau	225,60	208,92	301,89	291,34	527,49	500,26	8,04	7,17	10,93	10,15	9,48	8,65
15	Jambi	117,29	110,82	132,41	130,79	249,69	241,61	12,71	11,80	6,88	6,67	8,77	8,34
16	Sumatra Selatan	470,03	471,22	697,85	654,50	1.167,87	1.125,73	16,93	16,73	15,87	14,67	16,28	15,47
17	Bengkulu	117,60	117,21	206,53	207,72	324,13	324,93	19,16	18,75	18,28	18,05	18,59	18,30
18	Lampung	349,31	301,73	1.208,97	1.178,20	1.558,28	1.479,93	16,78	14,30	21,49	20,65	20,22	18,94
19	Bangka Belitung	28,78	21,85	47,85	45,90	76,63	67,75	5,86	4,39	8,93	8,45	7,46	6,51
21	Kepulauan Riau	62,58	67,08	65,63	62,59	128,21	129,66	7,63	7,87	8,98	8,24	8,27	8,05
31	DKI Jakarta	323,17	312,18	-	-	323,17	312,18	3,62	3,48	-	-	3,62	3,48
32	Jawa Barat	2.531,37	2.350,53	2.452,20	2.423,19	4.983,57	4.773,72	10,33	9,43	14,28	13,88	11,96	11,27
33	Jawa Tengah	2.420,94	2.258,94	3.304,75	3.110,22	5.725,69	5.369,16	15,41	14,33	19,89	18,66	17,72	16,56
34	DI Yogyakarta	311,47	308,36	274,31	268,94	585,78	577,30	14,25	13,98	22,60	21,95	17,23	16,83
35	Jawa Timur	2.148,51	1.873,55	3.874,07	3.655,76	6.022,59	5.529,30	12,17	10,58	21,00	19,74	16,68	15,26
36	Banten	348,74	318,29	439,33	439,87	788,07	758,16	5,62	4,99	10,70	10,44	7,64	7,16
51	Bali	92,06	83,62	89,66	91,31	181,72	174,93	4,50	4,04	5,98	6,02	5,13	4,88
52	NTB	557,54	552,62	493,41	456,74	1.050,95	1.009,35	28,84	28,16	18,40	16,78	22,78	21,55
53	NTT	109,41	107,38	903,74	906,71	1.013,15	1.014,09	14,01	13,57	25,35	25,10	23,31	23,03
61	Kalimantan Barat	93,98	83,43	340,79	345,32	434,77	428,76	7,23	6,31	10,09	10,06	9,30	9,02
62	Kalimantan Tengah	35,78	33,23	130,08	130,99	165,85	164,22	4,45	4,03	8,34	8,19	7,02	6,77
63	Kalimantan selatan	68,76	65,76	107,21	116,20	175,98	181,96	4,82	4,54	5,33	5,69	5,12	5,21
64	Kalimantan Timur	77,06	79,24	162,16	163,76	239,22	243,00	4,00	4,02	13,86	13,66	7,73	7,66
71	Sulawesi Utara	79,25	76,38	140,31	130,35	219,57	206,72	8,14	7,75	11,05	10,14	9,79	9,10
72	Sulawesi Tengah	54,67	54,22	435,17	420,77	489,84	474,99	10,09	9,82	21,35	20,26	18,98	18,07
73	Sulawesi Selatan	124,50	119,18	839,06	794,25	963,57	913,43	4,94	4,70	15,81	14,88	12,31	11,60
74	Sulawesi Tenggara	26,19	22,18	408,15	378,52	434,34	400,70	4,96	4,10	23,11	20,92	18,93	17,05
75	Gorontalo	22,19	17,84	202,43	192,05	224,62	209,89	7,89	6,29	32,82	30,89	25,01	23,19
76	Sulawesi Barat	43,51	33,73	114,72	107,61	158,23	141,33	12,59	9,70	16,65	15,52	15,29	13,58
81	Maluku	38,77	36,35	341,24	342,28	380,01	378,63	11,03	10,20	34,30	33,94	28,23	27,74
82	Maluku Utara	8,72	7,64	89,27	83,44	98,00	91,07	3,10	2,66	13,42	12,28	10,36	9,42
91	Papua Barat	8,55	9,59	248,29	246,66	256,84	256,25	5,22	5,73	44,71	43,48	35,71	34,88
94	Papua	28,19	26,18	732,16	735,44	760,35	761,62	6,10	5,55	46,81	46,02	37,53	36,80
	Indonesia	11.910,53	11.097,77	20.619,44	19.925,82	32.528,97	31.023,39	10,72	9,87	17,35	16,58	14,15	13,33

Sumber : diolah dari data susenas BPS dari Maret 2009 – Maret 2010.

Dari tabel diatas ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin di desa dari tahun 2009 ke tahun 2010. Ada sebelas provinsi yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin di desanya seperti Sumatera

Barat, Bengkulu, Banten, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua. Jumlah penduduk miskin di kota juga mengalami kenaikan di lima provinsi, tetapi tidak sebanyak jumlah di desa. Kenaikan jumlah penduduk miskin di kota di alami oleh provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat.

Jumlah penduduk miskin yang berkurang hanya sedikit membuktikan bahwa pembangunan di perdesaan sangat dibutuhkan. Pembangunan perdesaan itu sendiri seharusnya mempunyai prinsip-prinsip agar dalam penerapannya fokus dan tidak bercampur dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip pembangunan perdesaan itu seperti transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkelanjutan (Rahardjo, 2006, p. 19). Kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah dan untuk seluruh lapisan masyarakat, karena pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perdesaan sangat dibutuhkan. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan pembangunan seperti apa yang nantinya akan diwujudkan guna mencapai masa depan masyarakat perdesaan yang lebih baik lagi dan tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi lagi.

Pembangunan merupakan suatu proses yang dinamis, selain itu pembangunan ditujukan sebagai suatu usaha kearah peningkatan kesejahteraan dan keadilan yang baik, tetapi apabila tujuan pembangunan yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan dan menciptakan kesejahteraan yang kurang baik bagi masyarakat, maka pembangunan itu akan sia-sia. Tujuan dalam pembangunan perdesaan jangka panjang adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan pembangunan perdesaan jangka pendek adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam atau dapat dirumuskan pembangunan perdesaan ditujukan untuk menciptakan kawasan perdesaan yang mandiri dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat perdesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (*improving quality of life*) (Rahardjo, 2006, p. 23).

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk perdesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan karena sebagian penduduk di perdesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk perdesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan perdesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan sebaiknya sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh suatu desa, karena ketika pembangunan tidak sesuai dengan permasalahan yang desa itu hadapi maka pembangunan yang dilakukan tidak akan berarti penting bagi masyarakat. Selain sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, suatu pembangunan juga seyogyanya disesuaikan oleh potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan yang paling penting harus sesuai dengan skala prioritas. Dalam pembangunan sasaran umum yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi, di perdesaan perekonomian berbasis sumberdaya pertanian menjadi sesuatu yang dominan. Tetapi kegiatan tersebut juga harus ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil seperti contohnya adalah kebutuhan masyarakat mengenai ketersediaan infrastruktur. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan yang tersebar diseluruh wilayah sehingga masyarakat desa tidak mengalami kesulitan dalam mengakses lokasi pertanian, atau dengan kata lain masyarakat tidak terisolasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan mereka.

Seperti yang dibicarakan pada paragraf sebelumnya, bahwa pembangunan yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu desa, karena itu pentingnya perencanaan dalam pembangunan desa juga akan mempengaruhi pada berhasil atau tidaknya pembangunan di perdesaan dilakukan. Pembangunan desa yang terencana dan terkendali sangat diperlukan agar proses pembangunan desa tersebut berhasil dan memiliki output yang efektif. Pentingnya hal tersebut juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang baik, tapi tidak cukup jika hanya kebijakan pemerintah yang baik karena sebaik apapun itu kebijakan pemerintah tetapi jika para pelaksana kebijakan itu kurang mampu menjalankannya maka akan menjadi hambatan dalam proses pembangunan, karena berhasil atau tidaknya suatu pembangunan baik nasional maupun di perdesaan akan juga terpengaruh dari pelaku atau pemerintah yang menjalankannya. Membahas pembangunan perdesaan, maka bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam proses pembangunan, apabila kemampuan pemerintah desa tidak memadai maka proses pembangunannya cenderung mengalami kemacetan bahkan mungkin suatu kegagalan, karena itu dapat juga dikatakan, berhasil atau tidaknya program pembangunan desa sedikit banyak ditentukan oleh berperan tidaknya pemerintah desa dalam pembangunan tersebut. Peran pemerintah desa juga tergantung pada kemampuan dari pemerintah desa itu sendiri. Dengan demikian kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa merupakan salah satu aspek yang harus diperhitungkan.

Sedangkan menurut Suryadi (1998, p. 36) pengambilan keputusan dalam suatu organisasi merupakan suatu hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi yang terus menerus dari keseluruhan organisasi. Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dikatakan pengambilan suatu keputusan merupakan hasil konsensus dari proses komunikasi dan partisipasi melalui pemilihan dari berbagai alternatif dengan mekanisme tertentu dan dengan harapan mendapatkan tujuan yang diharapkan.

Pembangunan perdesaan membutuhkan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat guna, maka dari itu dibutuhkan perencanaan yang bersifat *bottom-up*,



karena dengan perencanaan yang bersifat dari bawah ini masyarakat langsung yang menentuka apa yang direncanakan, dengan cara apa akan dilakukan, dan yang paling menjadi dasarnya adalah perencanaan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri sehingga kegunaan dari pembangunan yang akan dilaksanakan akan sangat berarti dan berguna bagi kebutuhan masyarakat desa tersebut. *Bottom-up planning* atau dikenal juga dengan istilah pendekatan pembangunan endogen untuk perdesaan. Strategi atau pendekatan pembangunan endogen ini muncul pada awalnya di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang pada pertengahan 1970-an (Yamamoto,2007). Sosiolog dan ekonom memperkenalkan pendekatan tersebut dalam upaya mereka untuk menciptakan model pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas (*community-based economic growth*) yang diharapkan dapat mempertahankan dan mempercepat perkembangan sumberdaya dan industri lokal (Lincoln, 2011, p. 16).

Pendekatan pembangunan saat ini lebih menonjolkan pertumbuhan ekonomi secara cepat, mengakibatkan pertumbuhan di kawasan perdesaan sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan kawasan perkotaan, bahkan hal tersebut mendorong percepatan urbanisasi. Percepatan urbanisasi ini selain menimbulkan akibat-akibat positif juga menimbulkan akibat negatif yakni terserapnya sumber daya yang dimiliki perdesaan oleh kawasan perkotaan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (migrasi dari desa ke kota). Sementara itu kawasan perdesaan masih saja menghadapi permasalahan klasik seperti masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur dan akses kepada sumber daya ekonomi dan sosial. Kawasan perdesaan pada saat ini juga diidentikkan dengan permasalahan kemiskinan, yang disebabkan sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan dan terbatasnya kesempatan kerja (Lincoln, 2011, p.2).

Untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di berbagai aspek pembangunan, maka PNPM Mandiri turut pula mengembangkan upaya-upaya dalam pengamanan (*safeguarding*) program-program sektor di bawah koordinasinya. Sehingga perlu dilihat apakah program-program yang pemerintah telah laksanakan berjalan sesuai dengan rencana, target dan tujuannya atautkah program tersebut tidak berjalan dengan baik.

Dalam rangka mendukung pengurangan kemiskinan di perdesaan dan pengembangan pembangunan perdesaan, Direktorat Jendral Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum terus melanjutkan pelaksanaan PPIP ini. Pembangunan yang dilaksanakan oleh PPIP pada tahun 2009 tersebar di 25 propinsi Indonesia. Berikut adalah daftar desa penerima PPIP pada tahun 2009.

**Tabel 1.3: Daftar Desa Per Provinsi Penerima PPIP Tahun 2009**

No	Propinsi	Kabupaten
<b>1</b>	<b>Nanggroe Aceh Darussalam</b>	<b>2</b>
		Pidie, Pidie Jaya
<b>2</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>4</b>
		Solok, Tanah Datar, Pasaman, Pasaman Barat
<b>3</b>	<b>Riau</b>	<b>9</b>
		Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir.
<b>4</b>	<b>Jambi</b>	<b>5</b>
		Kerinci, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Bungo
<b>5</b>	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>11</b>
		Ogan Komering ulu, Ogan Komering Iilir, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, Musi Bnyuasin, Banyuasin, Oku Selatan, Oku timur, Oku Iilir.
<b>6</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>2</b>
		Bengkulu Utara, Kaur
<b>7</b>	<b>Lampung</b>	<b>7</b>
		Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang.
<b>8</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>12</b>
		Sumedang, Subang, Bandung Barat, Bandung, Indramayu, Kuningan, Ciamis, Garut, Cirebon, Bekasi, Bogor, Sukabumi.
<b>9</b>	<b>Banten</b>	<b>2</b>
		Lebak, Pandeglang
<b>10</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>16</b>
		Pati, Batang, Banjarnegara, Rembang, Boyolali, Magelang, Kendal, Blora, Grobogan, Sukoharjo, Kebumen, Semarang, Sragen, Wonogiri, Klaten.
<b>11</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>14</b>
		Banyuwangi, Sumenep, Kediri, Tulungagung, Blitar, Bangkalan, Bondowoso, Jombang, Mojokerto, Jember, Sidoarjo, Lumajang, Situbondo, Sampang.

Tabel 1.3- Lanjutan

No	Provinsi	Kabupaten
12	Nusa Tenggara Barat	4
		Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa.
13	Nusa Tenggara Timur	10
		Kupang, Timur Tengah Selatan, Belu, Sikka, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Alor, Flores Timur, Lembata.
14	Kalimantan Barat	3
		Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu.
15	Kalimantan Tengah	3
		Katingan, Kapuas, Gunung Mas.
16	Kalimantan Selatan	5
		Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu.
17	Kalimantan Timur	4
		Kutai Barat, Kutai Timur, Nunukan, Malinau.
18	Sulawesi Utara	3
		Bolaang Mongondow, Minahasa, Minahasa Selatan.
19	Gorontalo	2
		Gorontalo, Bone Bolango
20	Sulawesi Tengah	2
		Donggala, Parigi Moutong.
21	Sulawesi Tenggara	4
		Buton, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe Utara.
22	Sulawesi Selatan	9
		Bulukumba, Gowa, Bone, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur.
23	Sulawesi Barat	2
		Polewali Mandar, Mamasa
24	Maluku	3
		Maluku Tengah, Buru, Seram Bagian Barat.
25	Papua	6
		Yapen Waropen, Nduga, Yahukimo, Tolikara, Merauke, Paniai.

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya

Mayangan adalah suatu desa penerima PPIP pada tahun 2009. Desa ini sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, terletak pada dataran rendah pesisir laut jawa. Dalam menjalani sosial dan ekonominya, desa ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Permasalahan yang seringkali timbul adalah ketika air pasang masyarakat tidak dapat menjalani aktifitasnya karena air menggenangi pemukiman, masyarakat tidak dapat bernelayan bahkan tambak

sebagai lahan usaha sebagian masyarakat mengalami kerugian. Kondisi ini mengalami keparahan setelah terjadinya gempa Pangandaran pada tahun 2005.

Desa Mayangan terletak di kecamatan Legonkulon yang berada di dataran rendah, berdampak pada tingginya potensi banjir di wilayah ini, intensitas curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir diseluruh saluran yang ada di wilayah tersebut (menuju muara laut). Banjir akibat pasang air laut (rob) yang sudah menjadi rutinitas di wilayah Desa Mayangan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, selama kurun waktu  $\pm$  5 (lima) tahun terakhir ini, berdampak pada terjadinya kerusakan infrastruktur dan prasarana umum lainnya.

Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh desa Mayangan dan keterbatasan anggaran dan biaya daerah dalam menangani permasalahan infrastruktur dan fasilitas publik telah memacu berbagai pihak untuk mencurahkan segenap pikiran dan gagasannya. Pemerintah Kabupaten Subang bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat secara swadaya dan gotong royong, telah dilakukan upaya-upaya penanggulangan darurat, dengan melaksanakan perbaikan dan peninggian terhadap tanggul dan meninggikan badan jalan maupun jalan penghubung antar dusun yang mengelilingi pemukiman penduduk dengan menggunakan karung berisi pasir maupun tanah. Namun upaya tersebut belum mencapai hasil yang maksimal, sehingga sebagian besar perumahan penduduk masih terendam air yang datang dari arah areal tambak atau laut.

Pemerintah memberikan solusi lainnya untuk menangani masalah ini dengan merencanakan melakukan relokasi penduduk yang ada di desa Mayangan ke tempat yang lebih aman. Tetapi nyatanya rencana pemerintah itu tidak disetujui oleh masyarakat, karena masyarakat tidak mau direlokasi, masyarakat tidak ingin aktifitas nelayan sebagai sumber utama kehidupannya mengalami kesulitan karena lokasinya jauh dari pesisir pantai ([www.tintahijau.com/kolom/56-opini/1287](http://www.tintahijau.com/kolom/56-opini/1287), 2012).

Dalam menanggulangi kemiskinan di perdesaan pemerintah memiliki program-program dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam upaya

pengentasan kemiskinan di desa tidak lagi bisa memakai pendekatan makro, tetapi harus menggunakan pendekatan mikro atau pendekatan yang lebih khusus dan spesifik. Seperti kebijakan pembangunan untuk membuka kesempatan atau peluang kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki 3 program untuk menangani permasalahan kemiskinan, program pertama yaitu bantuan sosial berbasis masyarakat, program ke dua yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan program yang ke tiga yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Desa Mayangan yang mendapatkan bantuan dari PPIP yaitu dengan membangun pintu air dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tersebut disini peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya pintu air yang PPIP bangun di desa tersebut efektif atau bahkan lebih efektif dengan cara pemerintah daerah yang membangun tanggul yang ada di sekitar desa mayangan untuk mencegah terjadinya banjir rob atau masuknya air laut ke desa mayangan akibat pasang surut.

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang pemerintah buat ini termasuk dalam program yang ke dua, karena PNPM-Mandiri berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-Mandiri ada dua jenis yang pertama PNPM-mandiri inti dan PNPM-mandiri support. Dalam PNPM-mandiri support didalamnya terdapat Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Jadi dalam rangka menanggulangi kemiskinan di daerah perdesaan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya melaksanakan beberapa program diantaranya yaitu PPIP. Sejauh ini lokasi PPIP sudah tersebar di 29 provinsi dan dalam pelaksanaannya PPIP di bawah payung PNPM-Mandiri yang bantuannya meliputi fasilitas dan memobilisasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur di perdesaan.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum

signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ke depan pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan masyarakat desa yang sebenarnya. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan dapat membunmi dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa ke depan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

PPIP berlangsung sejak tahun 2007. Selama PPIP sudah berjalan lima tahun tentunya ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai perubahan-perubahan yang ada pada suatu desa sebelum dan sesudah adanya PPIP di desa itu, maka efektivitas dari sebuah program sebaiknya diperhatikan agar program pemerintah tidak berjalan sia-sia.

Pengertian efektivitas juga dapat di artikan sebagai bverikut seperti yang disampokan oleh Howlett dan Ramesh (2003: p. 211) :

*“Adequacy of performance evaluation also known as effectiveness evaluation, it is intended to find out if the program is doing what is supposed to be doing. In this type of evaluation, the performance of a given program is compared to its intended goals to determine whether the program is meeting its goals and/or whether the goals need to be adjusted in the light of the program's accomplishments”*

Evaluasi yang cukup baik disebut juga sebagai evaluasi efektivitas. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sebuah program dijalankan sebagaimana harusnya. Dalam tipe evaluasi ini, performa sebuah program dibandingkan dengan goal yang telah ditetapkanatau dengan goal-goal yang telah diadaptasi ulang pada saat pemenuhan program.

Dari 25 provinsi yang sudah tersebar salah satunya ada di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang, Kecamatan Legon Kulon Desa Mayangan. Dalam hal ini peneliti ingin membahas mengenai keefektifitasan PPIP di desa tersebut setelah pembangunan infrastruktur di desa Mayangan berjalan tiga tahun.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

- Bagaimanakah efektivitas program pembangunan infrastruktur perdesaan di desa mayangan kabupaten subang jawa barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- Untuk menggambarkan efektivitas dari pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Mayangan oleh satuan kerja yang berada di garis fungsional Direktorat Jendral Cipta Karya di perdesaan yang sudah pernah mendapatkan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP).

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

### **1.4.1 Signifikansi Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengayaan pengetahuan pada bidang pembangunan, khususnya pembangunan perdesaan di Indonesia yang terkait dengan kebijakan pembangunan di Indonesia dan besarnya jumlah penduduk miskin di perdesaan jika dibandingkan dengan perkotaan.

### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintah terkait (Satuan Kerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) dalam menambah literatur dalam ruang lingkup pembangunan khususnya pembangunan perdesaan.

## **1.5 Sisitematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini disusun dalam 6 bab, dibagi menjadi sub bab, dimana antar bab dan atau sub bab lainnya merupakan satu kesatuan dan saling terkait. Adapun sistematika penulisan terdiri dari :

### **1.BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penjabaran mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

### **2.BAB II : KERANGKA PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan teori dan pemikiran dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Teori-teori yang digunakan yaitu mengenai konsep pemerintahan desa, pembangunan desa dan efektivitas implementasi kebijakan.

### **3.BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, metode dan strategi penelitian dan narasumber atau informan. Pendekatan penelitian ini yaitu positivis dan berjenis penelitian deskriptif

### **4.BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai objek yang diteliti yaitu lokasi penelitian, permasalahan yang terjadi dan kondisi keterbatasan infrastruktur yang terjadi di lokasi penelitian juga mengenai gambaran umum instansi Satuan Kerja Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Direktorat Pengembangan Pemukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kemantria Pekerjaan Umum. Adapun sub bab dalam bab ini berisi tentang sejarah instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi instansi, produk instansi, organisasi dan manajemen instansi.



**5.BAB V : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) STUDI KASUS : Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat.** Dalam bab ini penulis memaparkan, mendeskripsikan topik dan analisis terkait dengan permasalahan yang penyusun bahas yaitu mengenai efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) studi kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Analisis juga dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan hasil wawancara yang langsung dilakukan pada saat turun lapangan.

#### **6.BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi dan menguraikan berupa simpulan dan saran. simpulan berupa rumusan ulang beserta jawaban singkat mengenai efektivitas penerapan program pembangunan infrastruktur perdesaan dan saran merupakan masukan bagi pihak-pihak terkait.

## BAB 2

### KERANGKA PENELITIAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Di dalam melakukan penelitian terhadap penerapan program pembangunan infrastruktur perdesaan Kementerian Pekerjaan Umum, perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang sebelumnya pernah dilakukan.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahreza pada tahun 2000 dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu Studi Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode kausal komparatif yang bersifat Ex Post Facto yaitu metode yang mengandalkan pada data yang sudah ada. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dan kepustakaan serta studi lapangan dengan melakukan wawancara dan menarik populasi yaitu pemda Kabupaten Bantul dan masyarakat pelaksana Program Pembangunan Wilayah Terpadu (PPWT) di Bantul, sampel yang ditarik adalah pejabat pemda Bantul sebanyak 5 orang dan masyarakat pelaksana PPWT di Bantul sebanyak 55 orang dari 11 desa. Penelitian tersebut bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran pelaksanaan dari aparat Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta dalam melaksanakan PPWT, hal ini diharapkan dapat diteliti peranan Bappeda Tingkat II, peranan Bagian Keuangan, peranan Dinas-dinas Tingkat II dan baik dalam proses perencanaan, penganggaran maupun dalam pelaksanaannya. (2) memperoleh gambaran peran dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dan pelaksana PPWT tentang manfaat langsung PPWT bagi masyarakat. (3) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PPWT di Kabupaten Bantul.

Penelitian tersebut memiliki beberapa kesimpulan yaitu, pemda Kabupaten Bantul telah melaksanakan PPWT secara konsisten sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan penyediaan alokasi dana secara memadai. Pelaksanaan PPWT Bantul juga mendapat dukungan secara penuh dari

berbagai instansi-instansi terkait. Pelaksanaan PPWT di Kabupaten Bantul dikatakan efektif dikaji dari aspek-aspek alokasi dana yang memadai baik dana yang disediakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Propinsi, dan Pusat. Selain itu dilihat juga dari tingginya penerimaan masyarakat dan dukungan material terhadap pelaksanaan PPWT dapat menggambarkan adanya kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir dilihat dari harta kepemilikan bertambah dan tingkat kesejahteraan keluarga meningkat.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Septian Anggi Saputra pada tahun 2008 dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri”**. Dalam penelitian tersebut peneliti mengguakan pendekatan positivis, kriteria kualitas penelitian positivis antara lain terlihat dari segi metodologi yang mencakup reliabilitas, validitas dan objektivitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi lapangan (*field research*) dan studi literatur. Pengumpulan data melalui studi lapangan yang dilakukan lebih mengandalkan pada observasi dan wawancara secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan. Penelitian juga didukung oleh data-data skunder. Penelitian tersebut bertujuan untuk: (1) mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi manajemen pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BBPK) Departemen Luar Negeri. (2) mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam penerapan sistem informasi manajemen pada Direktorat BBPK Departemen Luar Negeri.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah pengelolaan dan pengolahan informasi melalui penerapan SIM di direktorat BPPK bisa dikatakan belum berjalan dengan efektif. Hampir sebagian besar analisis terhadap variabel dan karakteristik SIM menunjukkan hasil yang belum berjalan efektif. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan seperti good will dari level pimpinan dalam menentukan arah dan tujuan dari penerapan SIM dan budget anggaran yang dalam penyediaan infrastruktur berupa penyediaan jaringan dan perangkat keras lainnya.

Penelitian ketiga dari tesis yang ditulis oleh I. Nyoman Sumaryadi pada tahun 1997 dengan judul **“Pembangunan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Penanganan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan Inpres Desa Tertinggal”**. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif dan teknik analisis data menggunakan teknik tabulasi silang untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Teknik analisis selanjutnya yaitu teknik statistik berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka teknis analisis yang digunakan adalah hubungan (korelasi) antara input dan output. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Selain itu peneliti juga mengamati keberhasilan Inpres Bantuan Pembangunan Desa (IBD) sebelum dan sesudah dilaksanakan program tersebut. Penelitian tersebut bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui apakah Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi desa. (2) untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa berpengaruh terhadap tingkat perkembangan ekonomi masyarakat desa sebelum dan sesudah adanya program Inpres No.5 Tahun 1993. (3) untuk mengetahui dari kedua jenis program Inpres (IBD/IDT) yang dominan berpengaruh terhadap tingkat perkembangan ekonomi masyarakat desa. (4) untuk mengetahui apakah program bantuan langsung, bantuan keserasian, peranan langsung masyarakat, biaya pengendalian dan pengelolaan, biaya penghargaan atau perlombaan desa, pembinaan aparat dan administrasi berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa. (5) untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program IDT dalam pembangunan masyarakat desa. (6) untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan IBD dan IDT.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah IBD dan IDT berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi desa. Perkembangan ekonomi desa lebih meningkat dari adanya program IDT daripada IBD. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program IBD dan IDT adalah peranan pendamping, peranan aparat pemerintah daerah, kemampuan pokmas, motivasi pokmas, distribusi pendanaan, jenis usaha dan pengawasan.

**Tabel 2.1: Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka**

	<b>Muhammad Fahreza</b>	<b>Septian Anggi Saputra</b>	<b>I. Nyoman Sumaryadi</b>	<b>Nakinda Novrasagelin</b>
<b>Judul Penelitian</b>	Efektivitas Pelaksanaan Pogram Pengembangan Wilayah Terpadu Studi Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri	Pembangunan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Penanganan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan Inpres Desa Tertinggal	Efektivitas Penerapan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kementerian Pekerjaan Umum (Studi kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Tahun Pelaksanaan 2009)
<b>Tahun</b>	2000	2008	1997	2012
<b>Tujuan Penelitian</b>	<p>(1) memperoleh gambaran pelaksanaan dari aparat Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta dalam melaksanakan PPWT, hal ini diharapkan dapat diteliti peranan Bapeda Tingkat II, peranan Bagian Keuangan, peranan Dinas-dinas Tingkat II dan baik dalam proses perencanaan, penganggaran maupun dalam pelaksanaannya</p> <p>(2) memperoleh gambaran peran dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dan pelaksana PPWT tentang manfaat langsung</p>	<p>(1) mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi manajemen pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BBPK) Departemen Luar Negeri.</p> <p>(2) mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam penerapan sistem informasi manajemen pada Direktorat BBPK Departemen Luar Negeri.</p>	<p>(1) untuk menegetahui apakah Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi desa</p> <p>(2) untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa berpengaruh terhadap tingkat perkembangan ekonomi masyarakat desa sebelum dan sesudah adanya program Inpres No.5 Tahun 1993</p> <p>(3) untuk mengetahui dari kedua jenis program Inpres (IBD/IDT) yang dominan berpengaruh</p>	Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) oleh satuan kerja yang berada di garis fungsional Direktorat Jendral Cipta Karya di perdesaan yang sudah pernah mendapatkan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP)

Tabel 2.1-Lanjutan

	<b>Muhammad Fahreza</b>	<b>Septian Anggi Saputra</b>	<b>I. Nyoman Sumaryadi</b>	<b>Nakinda Novrasagelin</b>
	<p>(3)PPWT bagi masyarakat</p> <p>(4)menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PPWT di Kabupaten Bantul</p>		<p>terhadap tingkat perkembangan ekonomi masyarakat desa</p> <p>(4)untuk mengetahui apakah program bantuan langsung, bantuan keserasian, peranan langsung masyarakat, biaya pengendalian dan pengelolaan, biaya penghargaan atau perlombaan desa, pembinaan aparat dan administrasi berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa</p> <p>(5)untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program IDT dalam pembangunan masyarakat desa</p> <p>(6)untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan IBD dan IDT</p>	
<b>Pendekatan Penelitian</b>	kausal komparatif yang bersifat Ex Post Facto	Positivis	Kuantitatif	Kuantitatif (positivis)
<b>Jenis Penelitian</b>	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif

Tabel 2.1-Lanjutan

	<b>Muhammad Fahreza</b>	<b>Septian Anggi Saputra</b>	<b>I. Nyoman Sumaryadi</b>	<b>Nakinda Novrasagelin</b>
<b>Kerangka Teori</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep pemerintahan</li> <li>2. Fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan</li> <li>3. Konsep pembangunan</li> <li>4. Konsep PPWT</li> <li>5. Konsep efektivitas pelaksanaan PPWT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi dari sistem informasi (organisasi, manajemen, teknologi)</li> <li>2. Efektivitas dan efisiensi</li> <li>3. Sistem informasi manajemen</li> <li>4. Urgensi sistem informasi manajemen</li> <li>5. Model proses pengambilan keputusan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perspektif pembangunan masyarakat desa</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan desa</li> <li>3. Model pemberdayaan masyarakat</li> <li>4. Strategi pemberdayaan masyarakat</li> <li>5. Pengaruh proses pengambilan keputusan terhadap biaya pembangunan</li> <li>6. Rules sebagai public goods</li> <li>7. Proses pengambilan keputusan</li> <li>8. Hubungan birokrasi dengan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Pemerintahan Desa</li> <li>2. Pembangunan Desa</li> <li>3. Efektivitas Implementasi Kebijakan</li> </ol>

Tabel 2.1-Lanjutan

	<b>Muhammad Fahreza</b>	<b>Septian Anggi Saputra</b>	<b>I. Nyoman Sumaryadi</b>	<b>Nakinda Novrasagelin</b>
<b>Hasil</b>	Pelaksanaan PPWT di Kabupaten Bantul dapat dikatakan efektif, rekomendasi atau saran yang diberikan adalah program ini perlu direplikasi atau diperbanyak di wilayah-wilayah kecamatan lain di Kabupaten Bantul.	Pengelolaan dan pengolahan informasi dalam penerapan SIM di direktorat BPPK bisa dikatakan belum berjalan efektif dan belum terintegrasinya sistem <i>database</i> dalam satu sistem secara keseluruhan. Dalam penerapan SIM pada direktorat BPPK terdapat beberapa kendala antara lain: good will dari level pimpinan dalam menentukan arah dan tujuan dari penerapan SIM.	IBD dan IDT berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi desa. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program IBD dan IDT adalah: peranan pendamping, peranan aparat pemda, kemampuan pokmas, motivasi pokmas, distribusi pendanaan, jenis usaha dan pengawasan.	Pelaksanaan PPIP di Desa Mayangan Kabupaten Subang Jawa Barat dikatakan efektif, saran yang diberikan adalah dalam hal pemilihan FM yang lebih selektif dan obyektif, agar dalam pelaksanaannya FM dapat lebih dapat memberdayakan masyarakat dengan lebih maksimal lagi dan tidak menjadi penghambat dalam proses PPIP.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dari tabel di atas terdapat tiga penelitian yang sebelumnya sudah ada, dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, pada penelitian yang pertama membahas program Pembangunan Wilayah Terpadu sedangkan penelitian ini membahas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang kedua yaitu



tentang penerapan sistem informasi manajemen. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ketiga yaitu pada penelitian yang ketiga disitu membandingkan antara program inpres desa tertinggal dengan inpres pembangunan desa sedangkan pada penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan program bantuan masyarakat lainnya hanya mendeskripsikan keefeltifan PPIP yang ada di desa Mayangan saja.

## **2.2 Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu mengenai konsep pemerintahan desa, karena dalam pembangunan perdesaan yang memegang peranan penting adalah pemerintah desa sehingga peneliti beranggapan konsep pemerintahan desa menjadi bagian yang penting dalam melakukan penelitian ini. selanjutnya yang kedua adalah konsep pembangunan desa yang didalamnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep pembangunan dan pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan yang ketiga yaitu efektivitas implementasi kebijakan, dalam konsep yang ketiga akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai evaluasi.

### **2.2.1 Konsep Pemerintahan Desa**

Penerimaan desentralisasi sebagai azas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah (Prasojo, Maksun dan Kurniawan, 2006, p. 1).

Desentralisasi memiliki beberapa tujuan salah satu diantaranya adalah efisiensi dan efektivitas. Desentralisasi mendekatkan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat. Kewenangan mengatur dan mengurus berpindah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah yang dimiliki ini menjadikan fungsi pemerintahan daerah yang dimiliki ini menjadikan fungsi pemerintahan dan pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Karena pemerintahan daerah yang mengetahui secara detail kebutuhan

dan potensi daerahnya masing-masing, maka program pembangunan dan pelayanan akan berorientasi kepada kepentingan masyarakatnya. Daerah dapat merespon secara cepat kebutuhan daerah tanpa harus menunggu persetujuan pemerintah pusat (Prasojo, Maksun dan Kurniawan, 2006, p. 17).

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjadja, 2004, p.3).

Dalam tatanan sebuah negara, desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dengan kepadatan rendah yang masih memegang warisan adat-istiadat dari nenek moyangnya. Desa berkedudukan sebagai akar budaya yang menjadi identitas dan ciri khas sebuah negara. Melalui desa, identitas lokal dapat diekspresikan dan kepentingan bersama dalam komunitasnya dapat dikelola dengan baik. Menurut R. Bintarto ( 1977 ) dalam Muzayana (2011, p.1) Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi

daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada Daerah Propinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami peregeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri (Widjadja, 2004, p.85).

### **2.2.2 Pembangunan Desa**

Pembangunan adalah satu diantara konsep-konsep paling mendesak di zaman kita sekarang ini. Pembangunan memunculkan kembali pertanyaan klasik tentang hakikat “masyarakat yang baik”, dan juga masalah siapakah yang harus menentukan isi dan tujuan masyarakat. Beberapa kualitas pembangunan ditunjukkan oleh Michael Todaro dalam Bryant dan White (1987, p.3) ketika disimpulkannya bahwa pembangunan adalah “proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolut”.

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, itu berarti memberi perhatian kepada “kapasitas”, terhadap apa yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup “keadilan” (*equity*), perhatian yang berat sebelah terhadap kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka akan menerima manfaat pembangunan. Dan akhirnya pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. Kapasitas apapun

yang tercapai akan cepat punah, kecuali jika mengetahui dan menangani masalah-masalah kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber yang ada (Bryant dan White, 1987, p. 22)

Indonesia terserak dalam gugusan pulau-pulau, yang 78% penduduknya masih tinggal di daerah perdesaan, penuh dengan segala macam bentuk kerawanan sosial. Wajarlah, kalau masalah pembangunan desa dijadikan titik sentral pola kebijakan Pemerintah untuk Pembangunan Nasional (Marbun, 1988, p.5). Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan. Kegagalan usaha tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah (*top down planning*), dimana pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan (subjek) (Widjadja, 2004, p.22).

Pembangunan Desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia yang bermukim di perdesaan, dengan demikian merupakan pula titik sentral daripada pembangunan Nasional. Semua jenis pembangunan, baik program sektoral, program regional maupun program khusus (Inpres), semuanya difokuskan ke arah perdesaan. Daerah perdesaan merupakan tumpuan dari segala kegiatan pembangunan, apakah itu proyek besar ataukah proyek kecil, kesemuanya itu pada dasarnya diarahkan dan berlokasi di daerah perdesaan, Karena itu pula pembangunan desa tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja tanpa koordinasi, kerjasama dan terintegrasi dengan semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat, dari pusat sampai ke daerah dan desa-desa (Departemen Penerangan RI, 1990, p.14)

Pendekatan pembangunan *top-down* masih diperlukan, khususnya untuk program-program pembangunan yang sifatnya vital atau yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau yang merupakan pelayanan antar wilayah, misalnya pembangunan pelabuhan laut, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan jalan arteri primer, perumahan rakyat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan lainnya, karena program pembangunan perdesaan yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pendekatan pembangunan desa seharusnya bersifat *bottom-up* yang diperkuat dengan pendekatan partisipatif. Dalam pembangunan perdesaan dihadapi banyak sekali hambatan di antaranya yang paling mendesak yaitu (Adisasmita, 2006, p. 5) :

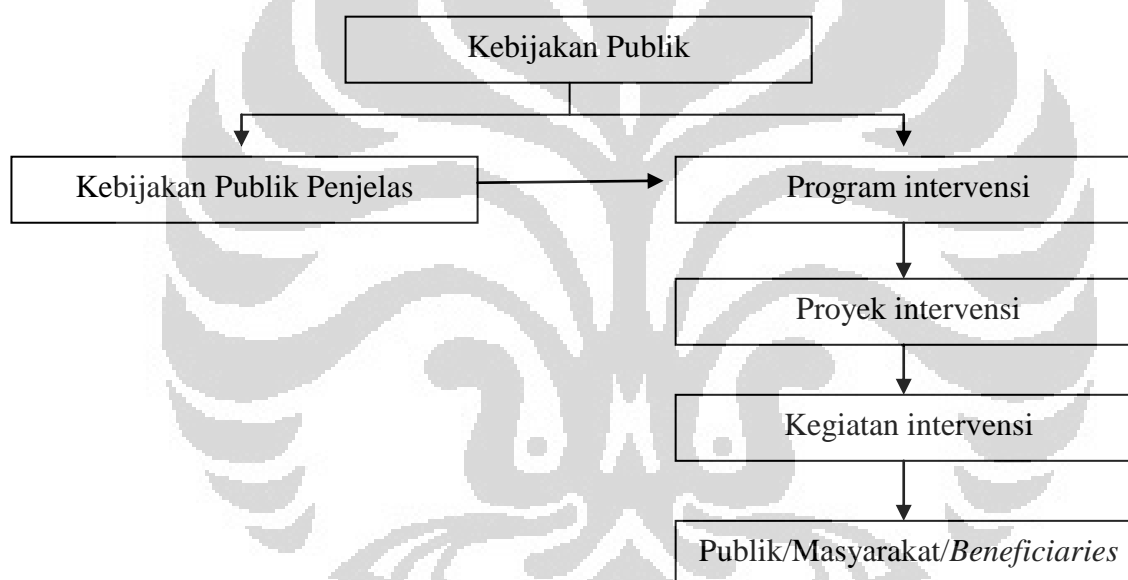
- a. Memperkecil kesenjangan (ketimpangan) antara desa dan kota, dan antar pelaku pembangunan.
- b. Merubah pola pembangunan dan pendekatan yang bersifat sentralistik dan sektoral menjadi terdesentralisasi, holistik, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat dan masyarakat untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan perdesaan.
- d. Meningkatkan pembangunan prasarana fisik dan penyebarannya yang mampu menjangkau ke berbagai pelosok.

### **2.2.3 Efektivitas Implementasi Kebijakan**

Setiap kebijakan yang pemerintah buat pasti mempunyai pertanggungjawabannya atau dengan kata lain setiap kebijakan pemerintah tidak bisa begitu saja di implementasikan tetapi kebijakan tersebut sebaiknya diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan disebut juga dengan evaluasi kebijakan (Nugroho, 2008, p.471). Setelah kebijakan diimplementasikan, tingkat kinerja suatu kebijakan bisa dilihat melalui evaluasi untuk mengetahui manfaat, dampaknya baik dampak positif maupun dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Dari adanya evaluasi suatu kebijakan ditujukan untuk memperbaiki kebijakan kedepannya yang lebih baik lagi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derviat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut (Nugroho, 2003, p.158).



**Gambar 2.1: Langkah Mengimplementasikan Kebijakan Publik**

Sumber : Nugroho, 2003, p. 159

Rangkaian implemetasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dengan program, ke proyek, dan kegiatan. Model-model implementasi kebijakan ada diantaranya yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Model *top-down* berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya *bottom-up* bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat (Nugroho, 2003, p.167). Adanya model implementasi kebijakan publik tersebut, tidak ada model implemetasi kebijakan yang terbaik, karena setiap jenis kebijakan

publik memiliki sifat yang berbeda dan memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012, p. 146). Berbagai program atau proyek pembangunan sosial tersebut pada umumnya mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi. Namun dapat dikatakan belum banyak yang sistemnya sudah memadai, dan banyak diantaranya yang bisa dikatakan lemah. Justru permasalahan itu terjadi karena kurang memperhatikan masukan dari bawah (Tjokroamidjodjo, 1996, p. 55).

Kebijakan-kebijakan yang bersifat *top-down* adalah kebijakan yang bersifat sangat strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara. Berbeda dengan kebijakan yang lebih efektif jika diimplementasikan secara *bottom-up*, yang biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak secara langsung berkenaan dengan national security (Nugroho, 2003, p.178).

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (Dunn, 2003, p.608)

Evaluasi bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu

kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut (Nugroho, 2008, p.472).

Ciri dari evaluasi kebijakan adalah (Nugroho, 2008, p.472) :

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut (Dunn, 2003, p.610)

**Tabel 2.2: Kriteria Evaluasi**

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?



Tabel 2.2-Lanjutan

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber:Dunn, 2003, p.610

Dari hasil evaluasi diharapkan dapat memberi gambaran tentang efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan yang ada, bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi, serta sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang, karena tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan (input) bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Sedangkan Djaali, Mulyo dan Ramli mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. Rutman and Mowbray, mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan manfaat (*outcomes*) suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Chelimsky mendefinisikan evaluasi adalah metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektivitas suatu program.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan (Hikmat, 2004, p.3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek.

Ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan kebijakan (Nugroho, 2003, p. 179-182). Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Lalu apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan selanjutnya apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Kedua adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama dengan masyarakat.

Ketiga adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja berarti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.

Keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari public opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. Dari seluruh keempat tepat di atas masih harus didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategik, dan dukungan teknis.

Dari kriteria-kriteria evaluasi menurut Dunn salah satunya ada tipe efektivitas. Pengertian efektivitas itu sendiri berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 2003, p.429).

Setiap program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh organisasi manapun pasti memiliki tingkat keberhasilan atau pencapaian target tertentu. Tak terkecuali kegiatan atau program yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan, yang memiliki target tertentu. Pencapaian target ini salah satunya dapat diukur dengan melihat efektivitas dari pelaksanaan kegiatan atau program tersebut. Secara singkat, Drucker (1954) mendefinisikan efektivitas sebagai “melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*)” (Saputra, 2008, p. 20).

Menurut (Steers, 1985, p.5) “Efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya”.

(Steers, 1985, p.6) selanjutnya mengatakan bahwa “Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai”. Teori di atas diperkuat oleh Martani Huseini (1987) yang menyatakan bahwa:

Pendekatan pencapaian tujuan menggunakan tujuan dan sasaran sebagai ukuran efektivitas organisasi. Jika tujuan dinyatakan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa datang, sasaran dapat digambarkan sebagai tujuan antara yang lebih bersifat operasional. Dalam pengertian tersebut, sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari keseluruhan organisasi ataupun sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi (Nurdin, 2004, p. 38).

Dalam kajian mengenai efektivitas, teori selanjutnya diungkapkan oleh (Siagian, 2000, p. 24) memberikan definisi sebagai berikut:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dari beberapa definisi atau pengertian mengenai konsep efektivitas di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa efektivitas dapat diketahui melalui pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diukur jika sudah terdapat hasil atau pencapaian dari berbagai kegiatan atau proyek yang dilakukan. Dengan berpijak pada teori-teori yang digunakan di atas, maka yang dimaksud dengan efektivitas dalam tulisan ini adalah tingkat pencapaian tujuan atau target dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Dalam mengukur efektivitas ini digunakan beberapa indikator yang bisa memberikan gambaran dari pencapaian atas program atau kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Dalam hal ini, jika indikator tersebut menunjukkan semakin mendekati sasaran atau target, maka semakin efektif pelaksanaan kegiatan tersebut.

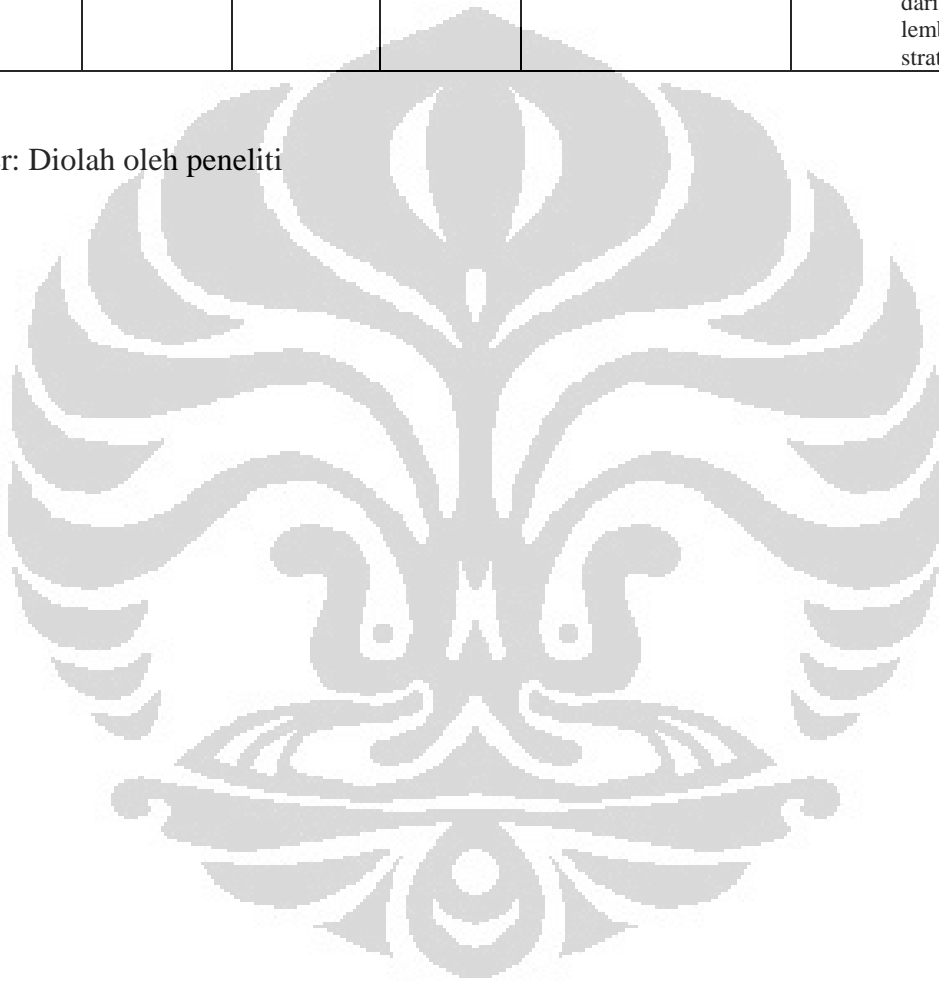
## 2.3 Operasionalisasi Konsep

**Tabel 2.3: Oprasionalisasi Konsep**

Konsep	Variabel	Dimensi	Kategori	Indikator	Subindikator
Kebijakan Publik	Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik	<b>1.Kebijakan Pemerintah</b>	1. Efektif 2. Tidak efektif	1. Ketepatan kebijakan  2. Kebijakan dirumuskan sesuai dengan masalah  3. Lembaga pembuat kebijakan	1. Kebijakan dapat memecahkan masalah  2. Apa saja pertimbangannya dalam menetapkan kebijakan tersebut  3. Apakah mempunyai kewenangan dengan karakter kebijakan  4. Siapa pelaksana pembuat kebijakan
		<b>2.Ketepatan pelaksanaan</b>		4. Kesesuaian lembaga pembuat kebijakan dengan PPIP	5. Siapa saja aktornya 6. Adakah kerjasama dengan pihak swasta
		<b>3.Ketepatan sasaran</b>		5. Kesesuaian sasaran dengan perencanaan PPIP  6. Intervensi selama pelaksanaan PPIP  7. Sumber Daya	7. Siapa kelompok sasaran 8. Apa manfaat PPIP 9. Bagaimana dampak PPIP 10. Perubahan apa yang terjadi  11. Intervensi dari kebijakan lain 12. Intervensi dari tingkatan pemerintah lain  13. Sumber daya

					manusia dalam menerima PPIP atau menolak
		<b>4.Ketepatan lingkungan</b>		8. Lingkungan internal kebijakan 9. Lingkungan eksternal kebijakan	14. Interaksi antara lembaga terkait  15. Tanggapan publik terhadap pelaksanaan PPIP  16. Interpretasi dari lembaga-lembaga strategis

Sumber: Diolah oleh peneliti



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* secara sederhana adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Suyanto, Sutinah, 2005, p. xii). Keberadaan metode penelitian mutlak diperlukan seperti yang dikatakan Arnold M. Rose dalam (Suyanto, Sutinah, 1965, p.xii) dikarenakan fakta-fakta sosial tidak tergeletak dan sudah “siap pakai” begitu saja, tinggal menunggu untuk diambil. Tetapi fakta-fakta sosial harus dibuka dari “kulit pembungkus” kenyataan yang sepintas tampak, harus diamati dalam suatu kerangka acuan yang spesifik, harus diukur dengan tepat, dan harus diamati pula pada suatu fakta yang dapat dikatakan dengan fakta-fakta lain yang relevan.

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (positivis). Pendekatan kuantitatif menggunakan cara berpikir deduktif, dengan melihat pola yang umum ke khusus. Dalam hal ini, pola yang umum tersebut adalah kerangka teoritis yang digunakan, sedangkan pola yang khusus adalah realitas yang ditemukan peneliti di lapangan. Kriteria penelitian positivis antara lain terlihat dari segi metodologi yang mencakup realibilitas, validitas, dan objektivitas. Reliabilitas adalah pemakaian istilah untuk menunjukkan konsistensi dari data yang dikumpulkan terhadap data yang diperoleh dari sumber lain, serta sejalan dengan apa yang sudah diketahui orang. Validitas yang dimaksud merupakan suatu keyakinan bahwa analisis dan data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di tempat penelitian. Objektivitas merupakan suatu pengukuran yang bebas dari penilaian yang subjektif. Terkait dengan objektivitas, (Neuman, 2006, p.86) mengatakan bahwa pada penelitian dengan paradigma positivis, peneliti harus obyektif dan netral dalam mengukur aspek kehidupan sosial, memeriksa bukti, dan memperhatikan penelitian lainnya.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian terbagi-bagi, yang pertama berdasarkan tujuan penelitian, dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai efektivitas suatu program. Yang kedua adalah berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian murni karena berasal dari keingintahuan peneliti terhadap suatu fenomena atau kasus. Yang ketiga adalah berdasarkan dimensi waktu dan yang keempat adalah berdasarkan teknik pengumpulan data.

#### **3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2003, p.54). Menurut Whitney (1960) dalam (Nazir, 2003, p.54), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, hingga penelitian deskriptif ini juga disebut survei normatif. Perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden (Nazir, 2003, p.54). Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan efektivitas penerapan program pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan melalui input, proses dan outputnya.

#### **3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian**

Jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian ini adalah penelitian murni. Penelitian dasar atau penelitian murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas (Nazir, 2003, p. 26). Penelitian murni tidak dibayang-bayangi oleh pertimbangan penggunaan dari penemuan tersebut untuk masyarakat. Penelitian murni bisa diarahkan kemana saja, tanpa memikirkan ada tidaknya hubungan dengan kejadian-kejadian yang diperlukan masyarakat. Proses pemikiran si peneliti bisa



membawanya kemana saja, tanpa memikirkan sudut apa dan arah mana yang akan dituju Hogben (1938) dalam (Nazir, 2003, p. 26).

Charters (1920) (dalam Nazir, 2003, p. 26), menyatakan bahwa penelitian murni terdiri atas halnya pemilihan sebuah masalah khas dari sumber mana saja, dan secara hati-hati memecahkan masalah tersebut tanpa memikirkan kehendak sosial atau ekonomi ataupun masyarakat.

### **3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu**

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke dalam *cross-sectional research*. Penelitian *cross-sectional* menurut (Neuman, 2000, p. 31) sebagai berikut, “*in cross-sectional research, researcher observe at one time*”. Dalam penelitian *cross-sectional* peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penerapan PPIP baik tingkat pemerintah pusat, provinsi, ataupun pemerintah desa. Penelitian ini dirancang dan memerlukan waktu selama beberapa bulan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan X 2012.

### **3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan dalam rangka mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penjelasan atas kedua teknik pengumpulan data tersebut yaitu sebagai berikut.

#### **a. Wawancara mendalam**

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan suatu elemen yang penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkebangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung,

melainkan dapat saja dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telpon dan internet (Suyanto dan Sutinah, 2005, p. 69).

b. Kajian Literatur

Mengadakan survei terhadap data yang ada merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah. Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau skunder. Menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepastakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian (Nazir, 1988, p. 111).

### 3.3 Narasumber

Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria, dimana kriteria yang digunakan oleh (Neuman, 2003, p. 368), antara lain:

- a. *The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant.*
- b. *The individual is currently involved in the field.*
- c. *The informant can spend time with the researcher*
- d. *Non analytic individuals make better informant*

Adapun narasumber yang akan diwawancara oleh peneliti terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Direktur Pengembangan Pemukiman Ir. Amwazi Idrus, M.Sc. (Lampiran 2) informasi mengenai pembuatan kebijakan.
2. Kepala Satker PPIP pusat diwakili oleh Posma HS Simanjuntak, ST (Lampiran 3) informasi mengenai intervensi selama PPIP berjalan.
3. Kepala satker PPIP provinsi diwakili oleh Suparno Prawitorejo (Lampiran 4) informasi mengenai lembaga-lembaga terkait.
4. Kepala satker PPIP kabupaten Musril Jaya (Lampiran 5) informasi mengenai lembaga-lembaga terkait
5. Kepala Desa Mayangan Kusnafie (Lampiran 6) mengenai alur dan mekanisme PPIP sejak perencanaan sampai infrastruktur selesai terbangun.
6. Sekretaris Desa Warnita M Noor (Lampiran 7) mengenai alur dan mekanisme PPIP sejak perencanaan sampai infrastruktur selesai terbangun

7. Sekretaris kecamatan Soedarya (Lampiran 8) informasi mengenai pelaksanaan PPIP.
8. Anggota Masyarakat (4 orang: Wawan Djuanda Lampiran 9, Eti Lampiran 10, Sukardi Lampiran 11, Tosin Lampiran 12) informasi mengenai sebelum dan sesudah adanya PPIP
9. Tokoh Masyarakat (2 orang: Edi Watma Lampiran 13, Anwar Lampiran 14), mengenai tanggapan masyarakat terhadap PPIP

### 3.4 Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul maka teknik analisis data merupakan proses mencari dan juga menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2011, p.333).

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007, p.248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dipihak lain, menurut Seiddel (Moleong, 2007, p.248) proses berjalan sebuah analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mencatat yang dihasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikannya, mensintesiskannya, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar semua kategori data itu mempunyai makna, mencari, dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum
4. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkun, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan teknik reduksi data agar data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

#### 5. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah bagan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel dan foto. Penulis memilih penyajian data seperti ini karena akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

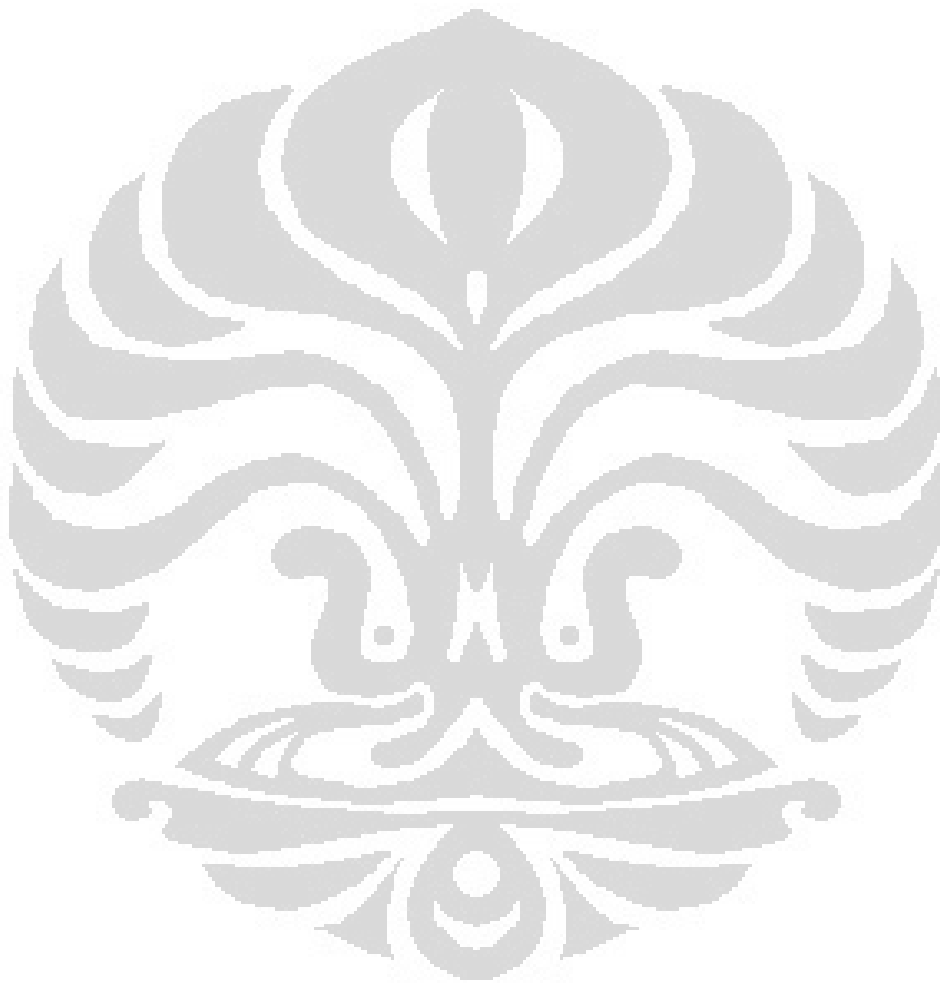
#### 6. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan berdasarkan data – data yang telah didapat dari penelitian yang dilakukan.

### **3.5 Batasan Penelitian**

Terkait dengan keterbatasan rasional dan kemampuan peneliti dalam mengelola permasalahan maka penelitian ini perlu mendapat pembatasan. Penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pembanguna Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus Desa Mayangan Kabupaten Subang Jawa Barat

menggunakan teori dari Riant D Nugroho mengenai empat tepat kebijakan. Penelitian ini mengambil studi kasus di desa Mayangan tahun pelaksanaan 2009, sehingga peneliti mengalami keterbatasan dalam mencari data skunder atau obyek tidak memiliki dokumentasi yang baik.



## BAB 4

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Gambaran Umum Instansi

Pada era Jepang setelah Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang dalam perang Pasifik pada tahun 1942; dilakukan penyesuaian pada bidang Pekerjaan Umum di seluruh wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang. Organisasi Pekerjaan Umum produk Hindia Belanda disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Kantor pusat “V & W” di Bandung, dinamakan *Kotubu Bunsitsu*; sejak saat itulah dipergunakan istilah “Pekerjaan Oemoem” (P.O), Oeroesan Pekerjiaan Oemoem (O.P.O), “Pekerjaan Umum” (PU) disamping *Doboku* yang seharusnya dipergunakan ([http://www.pu.go.id/balai\\_diklat\\_v/sejarah](http://www.pu.go.id/balai_diklat_v/sejarah))

Pada era kemerdekaan Indonesia, setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sejak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai perlahan-lahan merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta atau Bandung) maupun Pemerintahan Daerah. Sejak itu Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan kepemimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu kabinet yang besar disebut dengan nama *Kabinet DwiKora* atau *Kabinet 100 Menteri*, dimana pada masa tersebut dibentuk Koordinator Kementerian. Selanjutnya, setelah peristiwa G.30 S. PKI (1965), Pemerintah segera menyempurnakan *Kabinet Dwikora* dengan menunjuk Ir. Soetami sebagai Menteri PUT (Pekerjaan Umum dan Teknik); demikian pula pada masa Orde Baru dalam *Kabinet Ampera* kembali organisasi PUT berlanjut dengan Ir. Soetami tetap sebagai menterinya ([http://www.pu.go.id/balai\\_diklat\\_v/sejarah](http://www.pu.go.id/balai_diklat_v/sejarah)).

Pada saat ini, sesuai dengan peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki empat Direktorat Jendral dan dua yang setingkat dengan Direktorat Jendral yaitu, Direktorat Jendral Penataan

Ruang, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Jendral Cipta Karya dan dua yang setingkat dengan Direktorat Jendral yaitu Badan Pembinaan Konstruksi dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Dalam Direktorat Jendral Cipta Karya terdapat lima Direktorat yaitu, Direktorat Bina Program, Direktorat Pengembangan Pemukiman, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Pengembangan Air Minum dan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Perumahan.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Instansi**

Dalam menjalankan tugas dan peranan pokoknya Kementerian Pekerjaan Umum berpedoman pada visi dan misi yang telah dibangun pada tiap direktoratnya. Direktorat Jendral Cipta Karya merupakan unit eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dimana dengan dibentuknya Direktorat Jendral Cipta Karya diharapkan dapat memberikan dukungan melalui penyediaan infrastruktur keciptakaryaannya yang lebih dapat ditingkatkan lagi.

##### **4.1.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jendral Cipta Karya**

Visi :

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan”

Misi :

1. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.

2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
3. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.
4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
5. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.
6. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip *good governance*.

Kebijakan yang digunakan dalam melaksanakan tupoksi Direktorat Jendral Cipta Karya melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur mendukung otonomi daerah melalui penerapan *good governance* organisasi yang efisien dan tata laksana yang efektif.

#### **4.1.1.2 Visi dan Misi Pengembangan Permukiman**

Visi :

“Terwujudnya kawasan permukiman (di perkotaan dan di perdesaan) yang layak huni dan produktif secara berkelanjutan”

Misi :



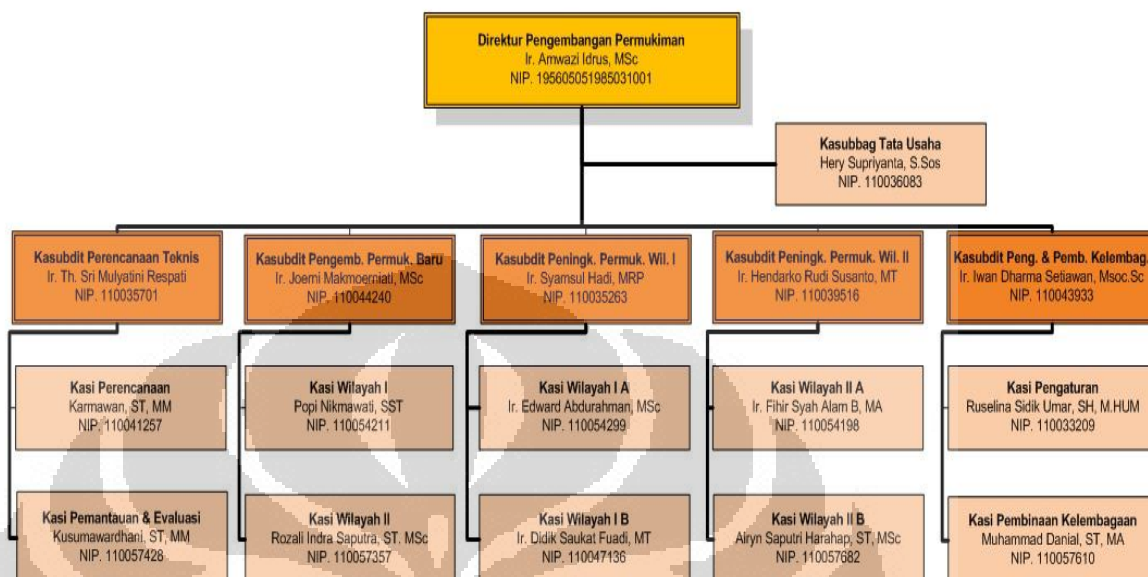
1. Memenuhi kebutuhan pengembangan permukiman (area development) dengan penunjang sarana dan prasarana permukiman.
2. Terwujudnya permukiman yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur.
3. Menjadi bagian penting dalam menentukan arah perkembangan perkotaan.
4. Menunjang kegiatan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur.

Pengembangan permukiman merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat multisektor meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman lama di perkotaan (kecil, sedang, besar, metropolitan) dan di perdesaan (termasuk desa potensial, daerah tertinggal dan terpencil, kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil terluar). Diharapkan dengan Visi dan Misi tersebut dapat melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya dibidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknik dan pengawasan teknik, serta standarisasi teknis dibidang pengembangan permukiman. Pada intinya akan bermuara pada peningkatan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum yang semakin baik kedepannya.

#### **4.2 Struktur Organisasi Instansi**

Dalam setiap Instansi Pemerintahan tentu memiliki jenjang struktural Organisasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa birokrasi itu bersifat hirarkis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tupoksinya masing-masing.

#### 4.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Permukiman



**Gambar 4.1: Struktur Organisasi Direktorat pengembangan Permukiman**

Sumber: Direktorat Jendral Cipta Karya

Direktorat pengembangan permukiman langsung dibawah oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Selain itu Direktorat Pengembangan Permukiman memiliki sub direktorat yaitu, sub direktorat perencanaan teknis, sub direktorat pengembangan permukiman baru, sub direktorat peningkatan permukiman wilayah 1, sub direktorat metropolitan, sub bagian tata usaha dan satker-satker yang ada di pusat dan di propinsi yang berada pada kelompok jabatan fungsional.

#### 4.3 Produk Instansi

PNPM Mandiri merupakan upaya pemerintah untuk mengharmonisasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Selama ini program-program tersebut dilaksanakan secara sektoral dan parsial dengan pendekatan dan prosedur yang beragam. Harmonisasi prinsip, kriteria dan prosedur melalui PNPM Mandiri diharapkan akan mengurangi

inefisiensi dan inefektivitas pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri pada tahun 2007 dikembangkan berdasarkan dua program pemberdayaan masyarakat yang cukup besar yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan mencakup Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk penanganan daerah tertinggal, pasca-bencana dan konflik, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) untuk mempercepat pengembangan infrastruktur wilayah dan perdesaan. Ke depan PNPM Mandiri juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh departemen atau sektor dan pemerintah daerah.

Direktorat Jendral Cipta Karya memiliki program-program yang meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan penataan kawasan. Dari ketiga program tersebut berikuit adalah penjelasan mengenai masing-masing program yang menghasilkan beberapa produk :

1. Pembangunan Infrastruktur

- DSDP

Pembangunan fasilitas pengelolaan air limbah terpusat dalam skala kota di Bali atau Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) selain berfungsi untuk mencegah pencemaran lingkungan juga untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air.

- USDRP

Urban Sector Development Reform Project (USDRP) program yang disiapkan pemerintah indonesia (GOI) bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mewujudkan kemandirian daerah dan pembaharuan dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan, sosial, berbudaya, produktif,

dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

### 1) Perkotaan

- NUSSP

Asian Development Bank (ADB) memilih program *Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project* (NUSSP) untuk dibandingkan dengan program serupa di negara-negara Asia penerima bantuan ADB lainnya. NUSSP adalah program pertama ADB di Indonesia yang dinilai berhasil menerapkan prinsip Community Driven Development (CDD) dalam membangun kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas permukiman.

- P2KP

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (*P2KP*) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. (*Buku Pedoman Umum P2KP-3*, Edisi Oktober 2005).

### 2) Perdesaan

- RIS PNPM

Dalam mendukung pengurangan kemiskinan di perdesaan memberikan berbagai stimulan antara lain melalui Program Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur

Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) atau Rural Infrastructure Support (RISP) pada tahun 2006, dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP).

- PAMSIMAS

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

- PISEW

Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yaitu ada dalam melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah.

#### **4.4 Organisasi dan Manajemen Instansi**

Direktorat Pengembangan Permukiman memiliki rangkaian yang bersifat multisektor meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman lama di perkotaan (kecil, sedang, besar, metropolitan) dan di perdesaan (termasuk desa potensial, daerah tertinggal dan terpencil, kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil atau terluar).

Tugas Direktorat Pengembangan Permukiman (bangkim) adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya dibidang

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknik dan pengawasan teknik, serta standarisasi teknis dibidang pengembangan permukiman. Fungsi bangkim itu sendiri yaitu :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan permukiman di perkotaan dan perdesaan
2. Pembinaan teknik, pengawasan teknik, dan fasilitasi pengembangan kawasan permukiman baru di perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan potensial
3. Pembinaan teknik, pengawasan teknik, dan fasilitasi peningkatan kualitas permukiman kumuh termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana
4. Pembinaan teknik, pengawasan teknik, dan fasilitasi peningkatan kualitas permukiman di kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial
5. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang pengembangan permukiman
6. Pelaksanaan tata usaha Direktorat

#### **4.5 Gambaran Umum PPIP**

Kebijakan Pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMM), dengan mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri diharapkan dapat menjangkau seluruh kecamatan Indonesia yang mencapai 5.623 kecamatan, dimana 1.072 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan perkotaan. Dimulai sejak tahun 2007, PNPMM dilaksanakan dengan memperluas cakupan wilayah sasaran pelaksanaan P2KP dan PPK, dengan skema masing masing program, sebagai PNPMM Inti. Selanjutnya pada tahun 2008 mulai diterapkan PNPMM Perkotaan dan PNPMM Perdesaan. PNPMM Perkotaan tahun 2008 akan dilaksanakan di 955 kecamatan perkotaan yang tersebar di 245 kota/kab dari 33 propinsi se Indonesia. Proses

Pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat tingkat basis kelurahan (BKM), fasilitasi pengintegrasian program jangka menengah penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan (PJM Pronangkis 3 tahun) sesuai kebutuhan masyarakat dengan perencanaan pemerintah, dan eskalasi realisasi PJM Pronangkis.

PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan dan Program nasional yang dituangkan dalam kerangka kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, untuk memutuskan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapinya dengan baik dan benar. PNPM Mandiri membutuhkan harmonisasi kebijakan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan pemilihan sasaran (*targeting*) baik wilayah maupun masyarakat penerima manfaat, prinsip dasar, strategi, pendekatan, indikator, serta berbagai mekanisme dan prosedur yang diperlukan untuk mengefektifkan penanggulangan kemiskinan dan mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dilaksanakan di Desa Mayangan Kabupaten Subang Jawa Barat.

#### **4.6 Gambaran Umum Desa Mayangan Kabupaten Subang Jawa Barat**

Kabupaten Subang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan Ibukotanya adalah Subang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang di tenggara, Kabupaten Bandung di selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di barat.

Desa Mayangan merupakan desa dengan dataran rendah yang berada di tengah-tengah diantara desa yang ada di wilayah kecamatan Legonkulon. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang sekaligus berbatasan dengan Desa Legonkulon di sebelah selatannya. Di sebelah timur desa mayangan berbatasan langsung dengan Desa Legonwetan dan disebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Tegalurung.

#### 4.6.1 Hidrologi dan Klimatologi

Desa Mayangan sesuai dengan topologinya lebih banyak dikelilingi oleh laut dan sungai pembuang Cigadung. Terdapat sungai Cigadung I dan sungai Cigadung II. Iklim desa mayangan memiliki curah hujan 2175 Mm dengan suhu rata-rata harian 27-33 derajat celcius.

Berdasarkan hidrologinya kualitas sumber air bersih di desa mayangan sangat jelek karena kondisi sungai sebagai sumber bersih kondisinya tercemar, keruh dan mengalami pendangkalan atau pengendapan lumpur tinggi serta mempunyai rasa asin yang berasal dari sungai cigadung I, cigadung II, laut jawa yang kebanyakan oleh masyarakat mayangan digunakan sebagai sumber air untuk pertanian dan empang (tambak) serta hutan mangrove secara umum akhir-akhir ini terjadi pendangkalan laut sehingga sering terjadinya rob/banjir. Hampir setiap hari apabila terjadinya laut pasang yang berpengaruh kepada sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat mayangan sebagai penggarap sawah atau petani dan peternak ikan atau empang.

#### 4.6.2 Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di desa mayangan digunakan secara produktif dan hanya sedikit saja yang tidak dapat dipergunakan atau lahan rusak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan desa Mayangan memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap diolah sebagaimana terungkap dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 4.1: Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan  
di Desa Mayangan Tahun 2011**

Sawah (Ha)			Darat (Ha)		Hutan (Ha)		
Teknis	Setengah	Tadah	Pekarangan Permukiman	Perikanan Empang	Mangrove		Hutan Negara
	Teknis	Hujan			Baik	Buruk	
-	29	-	71	122	100	180	

Sumber: Data Desa Mayangan

#### 4.6.3 Kependudukan

Penduduk desa Mayangan berdasarkan data terakhir hasil Sensus 2010 tercatat sebanyak 946 jiwa, tahun 2009 sebanyak 924 jiwa, tahun 2008 sebanyak 878 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Desa Mayangan  
Tahun 2008-2011**

No	Tahun	Jumlah
1	2008	878 jiwa
2	2009	924 jiwa
3	2010	946 jiwa
4	2011	963 jiwa

Sumber: Data Desa Mayangan

#### 4.6.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga pendidikan adalah sebuah investasi di masa yang akan datang. Di desa mayangan tahun 2008-2010, jumlah guru dan murid tiap tahunnya mengalami peningkatan. Guru pada tahun 2010 PAUD berjumlah 2 orang, guru SD sebanyak 9 orang, murid SD sebanyak 172 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3: Data Sarana dan Prasarana Pendidikan  
di Desa Mayangan**

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status	Lokasi (Dusun)	Jumlah Murid
1	PAUD	PAUD	Swasta	Pondok Bali	17
2	RA/DTA Saad Sindir	RA/DTA	Swasta	Krajan	
3	RA/DTA Al-furqon	RA/DTA	Swasta	Pondok Bali	50
4	SDN Sakti Mukya	SD	Negeri	Krajan	172

Sumber: Data Desa Mayangan

Pada masa kepemimpinan desa ini, jumlah sarana dan prasarana sekolah maupun jenjang terus diupayakan baik kuantitas maupun kualitasnya, baik itu negeri maupun swasta.

Jika dilihat pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa lokasi sekolah baik formal maupun non formal berdomisili di dusun krajan dan pondok bali, sehingga sudah cukup baik penyebaran sistem pendidikan di desa mayangan.

#### 4.6.5 Kondisi Pemerintah Desa

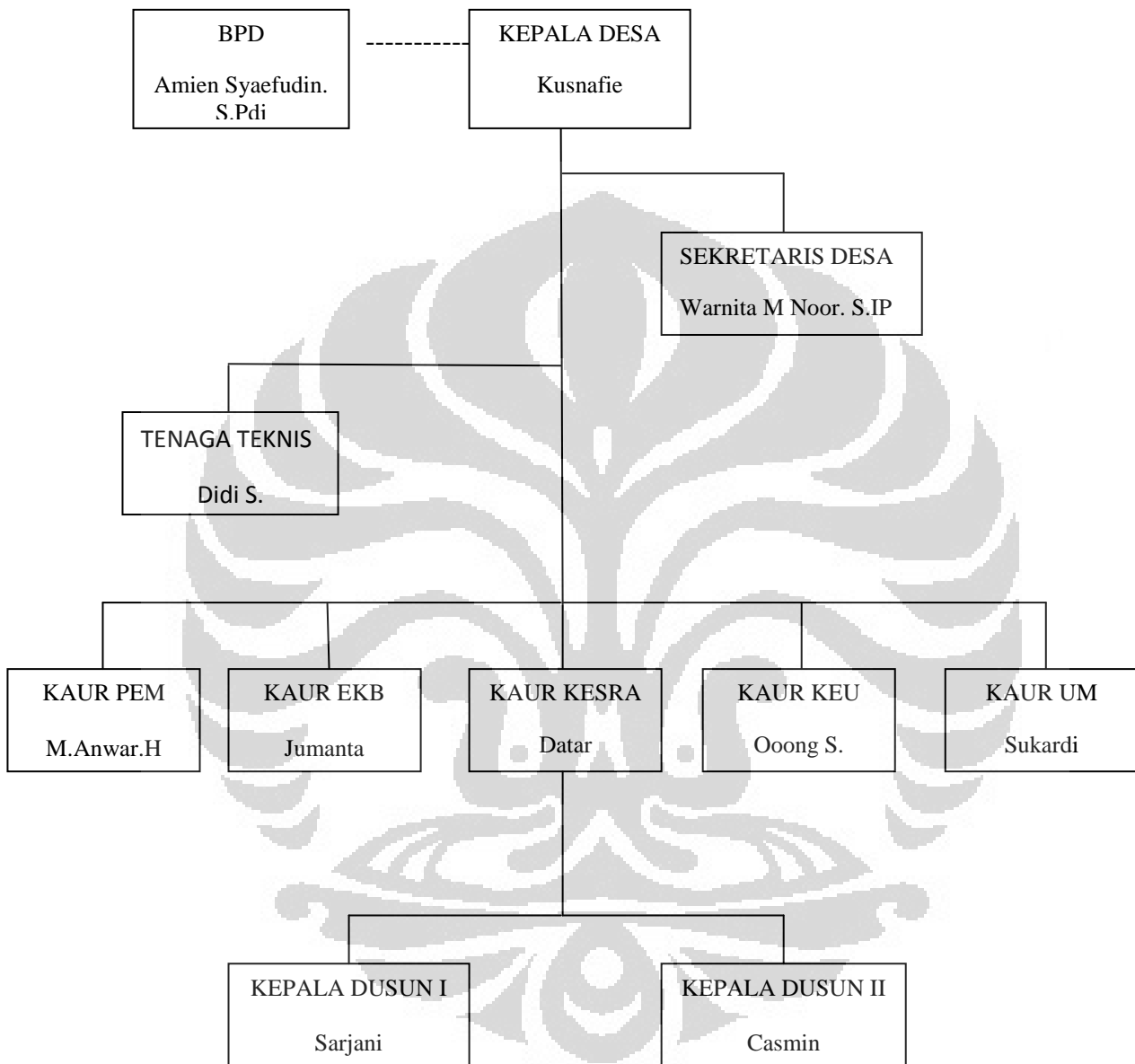
Desa Mayangan terdiri dari dua Wilayah Dusun, dua RW, dan empat RT. Dusun Krajan terdiri dari satu RW dan membawahi dua RT. Sedangkan dusun pondok bali terdiri dari satu RW dan membawahi dua RT. Jumlah pegawai di lingkungan pemerintah desa mayangan sebanyak satu orang kepala desa, satu orang sekretaris, lima orang kaur, dua orang kepala dusun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4: Jumlah Aparatur Pemerintah dan Anggota Kelembagaan di Desa Mayangan**

No	Jenis Layanan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala Urusan	5
4	Kepala Dusun	2
5	Staf Desa	2
6	Ketua RW	2
7	Ketua RT	4

Sumber: Data Desa Mayangan

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pemerintah desa mayangan dapat dilihat pada gambar struktur di bawah ini:

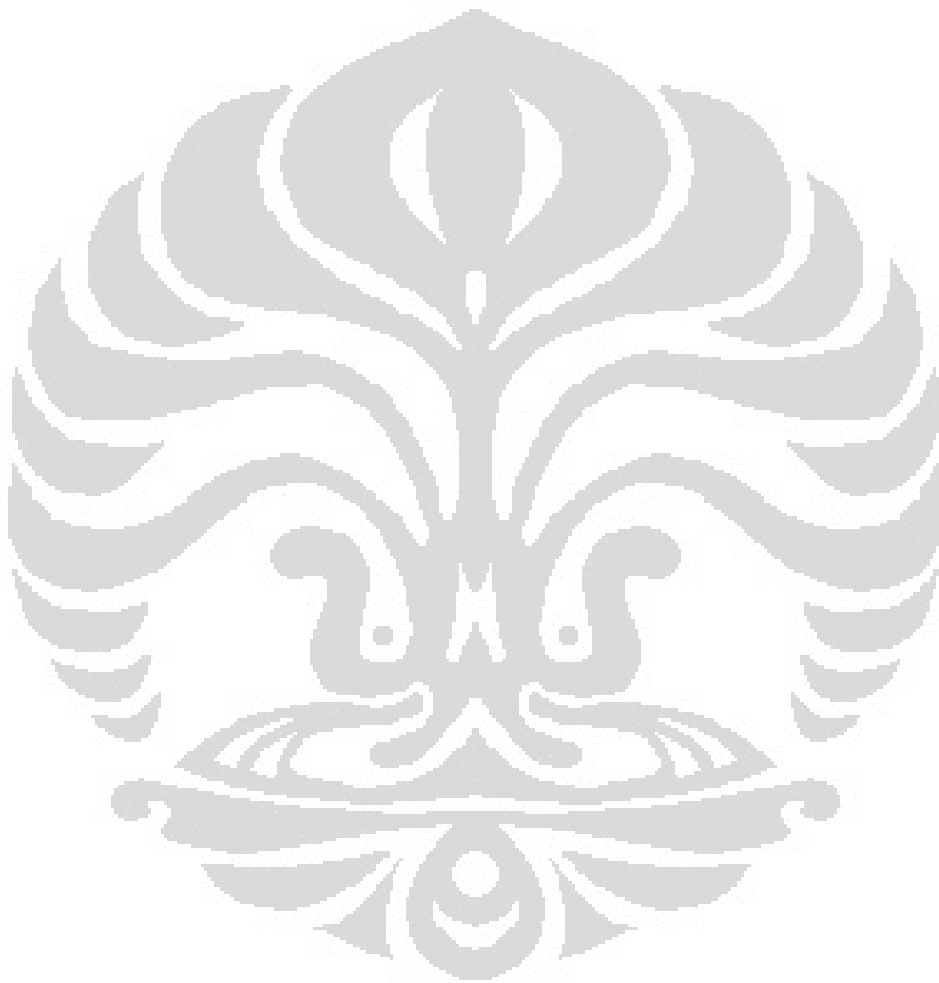


**Gambar 4.2: Struktur Organisasi Pemerintahan  
Desa Mayangan**

Sumber: Data Desa Mayangan

Jumlah pegawai di lingkunganb pemerintah desa Mayangan sebanyak satu orang kepala desa, satu orang sekretaris desa, lima orang kepala urusan dan dua orang kepala dusun. Dalam realitasnya perangkat desa masiih belum mampu

mengelola administrasi desa seperti profil desa yang belum lengkap terisi dan disebabkan oleh SDM perangkat desa masih rendah pengetahuannya sehingga data yang diperlukan banyak yang tidak terisi dan perlu diadakannya pembinaan atau pelatihan administrasi perangkat desa.



## BAB 5

### EVEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) STUDI KASUS: DESA MAYANGAN, KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT

#### 5.1 Efektivitas PPIP di Desa Mayangan

Dalam bab ini akan dianalisis efektivitas pelaksanaan PPIP di Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Analisis ini menggunakan *empat tepat* yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan kebijakan menurut Nugroho (2003). Menurut Nugroho keefektifan suatu kebijakan dilihat dari empat tepat yang perlu dipenuhi. Pertama, apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat, yang kedua adalah tepat pelaksanaannya, yang ketiga adalah tepat target, yang keempat adalah tepat lingkungan.

Pada tepat yang pertama yaitu tepat kebijakan, akan dilihat sejauh mana kebijakan dapat memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dapat pula selanjutnya dilihat apakah kebijakan dirumuskan sesuai dengan karakter permasalahan yang hendak ingin dipecahkan, lalu kesesuaian karakter kebijakan dengan lembaga pembuat kebijakan. Pada tepat yang kedua yaitu mengenai tepat pelaksanaan. Siapa saja aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada tepat yang ketiga adalah tepat target, yang akan melihat apakah target sudah siap untuk menerima kebijakan tersebut dan apakah sesuai dengan perencanaan. Lalu pada tepat yang terakhir yaitu tepat yang keempat mengenai tepat lingkungan, yang terdiri dari lingkungan kebijakan itu sendiri dengan lingkungan publik. Untuk membahas lebih jelasnya maka penulis akan membahas dan menganalisis masing-masing dimensi dengan indikator yang ada.

##### 5.1.1 Ketepatan Kebijakan Pemerintah

Ketepatan kebijakan pemerintah dalam menetapkan atau melaksanakan suatu kebijakan dapat dilihat dari bahasan yang akan dibahas dibawah ini. seperti ketepatan kebijakan yang melatarbelakangi program pemerintah dan apakah kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah atau tidak. Kebijakan dirumuskan

sesuai dengan masalah, dan juga akan membahas dari sisi lembaga pembuat kebijakan yang merumuskan kebijakan tersebut.

#### **5.1.1.1 Ketepatan Kebijakan**

Kebijakan pemerintah terkait dengan PPIP berawal dari dukungan akan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program pembangunan infrastruktur perdesaan atau yang lebih dikenal dengan PPIP ini berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan kemiskinan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan atau PPIP merupakan program pemerintah yang berbasis pemberdayaan yang berada di bawah payung PNPM Mandiri, yang bantuannya meliputi fasilitasi dan memobilisasi masyarakat desa dalam melakukan identifikasi permasalahan yang ada di desa mereka, lalu dilanjutkan dengan penyusunan rencana dan pembangunan infrastruktur desa.

Bertahap dan berjenjang, itulah penyelenggaraan PPIP. Mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian bahkan sampai pemanfaatan hingga pemeliharaan. Maka secara garis besar dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendra Cipta Karya melaksanakan program yang satu diantaranya adalah PPIP, yang berawal dari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, dan berujung pada terbentuknya program PKPS-BBM IP yaitu program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak dibidang infrastruktur perdesaan pada tahun 2005 lalu berubah namanya menjadi PPIP pada tahun 2007. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Posma HS Simanjuntak, Plt Kepala Satker PPIP Pusat yaitu:

*“jadi kalau melihat sejarahnya PPIP ini diawali dari PKPS BBM IP pada tahun 2005 ya jadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak tahun 2005 yaitu dikhususkan untuk Infrastruktur Perdesaan di desa tertinggal, desa tertinggal disini maksudnya tu desa*

*yang secara infrastruktur itu masih banyak membutuhkan infrastruktur dasar” (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)*

Adanya pembangunan infrastruktur yang di bangun di desa, maka masyarakat desa dapat melakukan mobilisasi lebih baik lagi. Sehingga perekonomian masyarakat desa juga akan terbantu dan meningkat melalui kegiatan-kegiatan yang masyarakat desa lakukan. Seperti perdagangan ke pasar menjadi lebih lancar karena akses yang sudah menjadi lebih mudah.

### **1. Kebijakan dapat memecahkan masalah**

Masalah yang dihadapi ialah kemiskinan yang tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga kondisi tidak lebih baik terjadi di perdesaan. Kemiskinan yang terjadi di perdesaan ini mengakibatkan masyarakat desa menjadi semakin terbelakang dalam segala keterbatasan yang ada, termasuk juga dalam keterbatasan infrastruktur. Kondisi infrastruktur yang tidak mendukung masyarakat desa untuk melaksanakan kehidupan yang lebih layak ini mengakibatkan masyarakat perdesaan menjadi mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum, Amwazi Idrus sebagai berikut:

*“Pada saat itu pemerintah melihat bahwa dengan kenaikan BBM ini masyarakat yang miskin ya semakin terpuruk. Artinya mereka kan tidak membutuhkan BBM untuk kendaraan pribadi, tapi dampak dari itu kan ada kenaikan harga-harga dan kemudian kenaikan biaya sarana transportasi kemudian kita melihat mereka semakin kesulitan” (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)*

Kebijakan PPIP ini bila dilihat secara umum dapat memecahkan permasalahan kemiskinan di perdesaan yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dengan adanya program-program terdahulu sebelum adanya PPIP, maka PPIP dapat menjadi lebih efektif apabila dibandingkan dengan program yang terdahulunya. Karena apabila di bandingkan dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat atau BLM yang akan memberikan dampak ketergantungan masyarakat kepada pemerintah karena tidak adanya proses pemberdayaan di dalamnya, sehingga masyarakat yang menerima BLM tidak akan susah untuk

menghabiskan uang yang mereka dapatkan dari BLM itu. Adalagi dengan program Inpres Desa yang sama sifatnya yaitu bantuan untuk masyarakat di perdesaan, tetapi program inpres desa disini bersifat *top-down* yang artinya pemerintah pusat yang menentukan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa tersebut, sedangkan pemerintah pusat tidak benar-benar mengerti dengan apa permasalahan yang sebenarnya desa tersebut hadapi. Sehingga masyarakat kurang merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan pada saat itu dikarenakan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan masalah yang desa itu hadapi.

Hadirnya PPIP yang bersifat *bottom-up* seakan-akan menyempurnakan program bantuan untuk masyarakat perdesaan yang sebelumnya bersifat *top-down*. Program pembangunan infrastruktur perdesaan atau PPIP ini juga menyempurnakan program BLM yang tidak memberdayakan masyarakat. Pembangunan perdesaan membutuhkan pemberdayaan masyarakat desanya itu sendiri, karena dengan memberdayakan masyarakat maka dari situ masyarakat menjadi lebih mandiri. Dengan perencanaan yang bersifat *bottom-up* maka masyarakat dapat menentukan pembangunan apa yang dibutuhkan di desanya, sehingga masyarakat akan merasakan manfaat yang lebih besar karena pembangunan yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang desa itu hadapi. Seperti yang juga disebutkan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus sebagai berikut:

*“Masyarakat juga mulai terbina mereka bagaimana membentuk lembaga masyarakat, bagaimana untuk musyawarah dan ini selama ini kurang karena sejak jaman orde baru itu semuanya driving dari atas. Ada inpres kalau kamu lihat sejarah pembangunan di Indonesia. Macem-macem sampai inpres sapi, tapi semua dari atas kelemahannya adalah pusat apakah tau persis persoalan yang ada di daerah jadi pemerintah sok tau”*  
(Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)

Dapat dikatakan bahwa dengan hadirnya PPIP dalam bantuan masyarakat perdesaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa Indonesia kebijakan ini dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu desa. Ditambah lagi dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan serta pengelolaannya. Senada



dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Permukiman Amwazi Idrus:

*“Artinya kebijakan program penanganan kemiskinan melalui PPIP ini dan kemudian permasalahan yang ditemui di lapangan sebetulnya menjawab gak jauh-jauh amat melesetnya. Paling kalau meleset ya meleset lokasi, kalau meleset lokasi dia gak miskin kita kan gak tau persis kita dari angka-angka BPS. tapi kalau diukur berhasil ya kita sangat berhasil dengan pola itu, karena semua infrastruktur yang dia bangun dimanfaatkan. Kan bisa dilihat berhasilnya juga dari situ. Jika bangunannya di bangun tetapi tidak dimanfaatkan atau mereka tidak memelihara kita anggep kurang berhasil. Kalau PPIP kan hampir semuanya mereka senang”* (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)

Hal serupa di katakan pula oleh Plt. Kepala Satker PPIP Pusat Posma HS Simanjuntak mengenai tingkat keberhasilan PPIP yang artinya berhubungan dengan pemecahan masalah yang ada di desa-desa yaitu:

*“kalau keberhasilannya kita tidak mungkin menilai diri sendiri ya. Untuk itu kita kan selalu di audit setiap tahun kita di audit oleh BPKP baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Auditnya ini bukan audit keuangan, tetapi penekanannya pada kinerja jadi bukan hanya uang sekian masuk, uang sekian keluar saja. Karena kita ada proses pemberdayaan itu jadi yang di audit itu. Jadi yang di audit kinerja si fm itu bagaimana sih mendampingi masyarakat. Kinerja satker kabupaten bagaimana sih membimbing si fm, kinerja satker provinsi gimana sih membina kabupaten, kinerja pusat gimana sih mengeluarkan kebijakan benar gak sih nyusun jadwal, nyusun pedoman benar gak. Itu penekannya disitu walaupun ada keuangan tetap ada tekanan kinerjanya itu yang lebih utama. dari tahun ketahun lumayan nilai kita naik terus walaupun tipis-tipis gitu ya, tapi paling tidak naiklah. Tapi ya itu dari audit kita dari tahun ke tahun semakin baik”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Berdasarkan dari pendapat kedua narasumber di atas, pihak pemerintah pusat sebagai pembuat dan pemegang kebijakan merasakan bahwa kebijakan mengenai PPIP dapat memecahkan permasalahan yang ada. Terlebih lagi bila membandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang terdahulu yang tidak bersifat *open menu* sehingga masyarakat desa hanya menerima apa yang pemerintah pusat berikan. Audit mengenai kinerja juga dilakukan bahkan dilakukan pula oleh pihak eksternal yaitu BPKP, kinerja yang bagus akan menghasilkan output yang baik

sehingga dapat dikatakan kebijakan yang ada dapat menopang suatu program untuk memecahkan permasalahan yang ada.

#### 5.1.1.2 Kebijakan dirumuskan sesuai dengan masalah

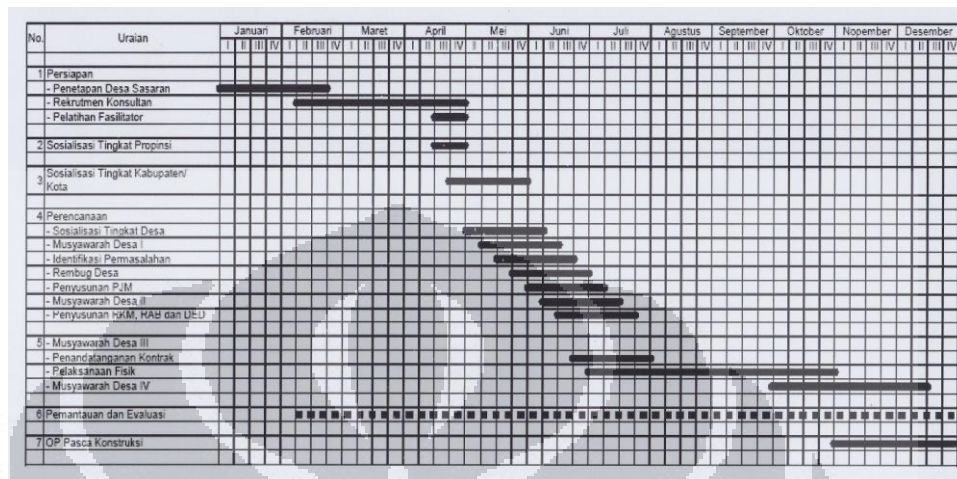
Keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah berkaitan pula dengan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang ada pada saat perumusan kebijakan itu berlangsung. Pada PPIP pertimbangan-pertimbangan itu langsung pada pokok permasalahan kemiskinan. Maka dengan itu dirumuskanlah kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat yang bersifat *bottom-up* guna mengatasi permasalahan yang ada di desa seperti yang juga dikatakan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus seperti dibawah ini:

*“tekanan kemiskinan di daerah atau di perdesaan dengan akibat dari kebijakan pemerintah kenaikan BBM, ternyata ada masalah transisi ekonomi yang makro turbulensi ekonomi yang besar ini kita buat begitu. Awalnya seperti itu tapi ternyata ini efektif untuk membantu masyarakat mendapat pekerjaan. Itu kalau kita hitung eehm dalam satu tahun itu mempekerjakan orang selama 2 bulan 1 desa 50 orang saja paling tidak persoalan ketenaga kerjaan temporary bisa dikurangi gitu” (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)*

Adanya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dapat juga menjadikan masyarakat desa sebagai pekerjanya yang akan mendapatkan upah dalam PPIP, sehingga masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan dapat diberdayakan, dan memang orang-orang yang dipekerjakan dalam PPIP di suatu desa adalah masyarakat-masyarakat miskin di desa tersebut. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus yaitu:

*“...kalau BLT itu ya ada positifnya tapi banyak negatifnya gitu. Tidak mendidik yang pertama, yang kedua juga mencari orang yang benar-benar membutuhkan juga susah karena pada waktu itu saya juga ikut pak menteri waktu itu pak menteri memantau pada saat itu yang tahap pertama kan lewat kantor pos ya, itu ada yang datang pake sepeda bagus gitu pake pakai-pakaiannya rapih, sepedanya lebih bagus daripada sepeda saya. Ambil uang tiga ratus ribu kan untuk tiga bulan setelah keluar dari sana dia beli vcd gitu ya yang di kaki-kaki lima jadi banyak yang tidak mendidiknya datanya juga tidak jelas sehingga kadang-kadang keliru ada orang yang tidak mampu kemudian pemanfaatnya jadi konsumtif begitu. Tapi kalau mereka mencari dengan usaha artinya mereka bekerja mereka agak mikir ngeluarin duit, kan kalo dapet duit gitu*

*kayak dapet lotre tiga ratus ribu ya beli pulsa lah gitu ya, bukannya beli makanan atau apa kek nah itu yang kemudian BLT itu hilang sekarang namanya BLSM ya masih dengan pola yang seperti itu tapi tidak di jadikan kebijakan yang menerus seperti PPIP ini” (Hasil wawawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)*



**Gambar 5.1: Jadwal pelaksanaan PPIP**

Sumber: Buku Pedoman PPIP

Jadwal pelaksanaan PPIP mulai dari persiapan, sosialisasi, pelatihan tenaga pendamping, persiapan dan perencanaan tingkat desa, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan fisik, sampai kepada operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat dan pengendalian seperti pemantauan, pelaporan, dan evaluasi program semua sudah tertulis dalam jadwal pelaksanaan, sehingga apabila ada desa yang melaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan dianggap kurang efektif dalam melaksanakan tetapi bukan berarti kurang efektif dalam hasil atau pemanfaatannya.

Pola PPIP yang berbeda dengan pola bantuan langsung yang dulu diterapkan lebih bersifat memanjakan masyarakat dan tidak mengembangkan masyarakat miskin untuk dapat lebih mandiri lagi. Tetapi dengan adanya pola pada PPIP yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan open menu, masyarakat desa miskin dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat itu inginkan dan masyarakat desa juga menjadi lebih berkembang dengan adanya pemberdayaan terlebih khususnya masyarakat desa itu bekerja untuk mengembangkan desanya sendiri.

## 1. Pertimbangan dalam menetapkan kebijakan

Pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam penetapan kebijakan mengenai bantuan langsung untuk masyarakat perdesaan yaitu mengenai pola-pola yang diterapkan di dalam kebijakan program PPIP. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus yaitu:

*“ya itu tadi kita kan berangkat dari pengurangan kemiskinan. Kita melihat penanganan kemiskinan dengan pola yang memberi jangankan di kasih ikan tapi dikasih pancing. Pendekatan kita adalah tahap awal kita ngasih ikan langsung karena memang mereka susah miskin ya itu yang BLT tadi. Kemudian kita beri pancing dengan pola PPIP ini kalau mereka sudah semakin maju kita kasih perahu gitu. Dengan adanya KUR kredit usaha rakyat. Yang itu cluster berikutnya dari penanganan kemiskinan tapi yang PPIP ini ada di cluster kedua pemberdayaan kan dia. Cluster pertama ya yang charity itu langsung nah kita sudah pada proses pembinaan pemberdayaan”* (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)

Pertimbangan-pertimbangan diantaranya adalah mengenai pola pemberian bantuan kepada masyarakat. Pola yang diterapkan dalam PPIP ini adalah masuk pada *cluster* yang kedua yaitu sudah pada tahap pemberdayaan masyarakat. Karena menurut Amwazi Idrus ada tiga cluster dalam bantuan masyarakat untuk menangani kemiskinan:

- *Cluster* pertama yaitu memberi bantuan kepada masyarakat dimana bantuan tersebut langsung diberikan tanpa ada proses pemberdayaan seperti contohnya program BLT, pada pola ini masyarakat miskin diberikan uang tunai. Masyarakat miskin dengan program BLT ini seakan-akan disuapi oleh pemerintah sehingga dapat menimbulkan ketidakmandirian dan masyarakat desa akan menjadi ketergantungan oleh bantuan yang diberikan tanpa ada usaha yang mereka lakukan. Dan menurut Amwazi Idrus program yang seperti itu tidak mendidik masyarakat miskin untuk menjadi lebih berkembang dan maju.
- *Cluster* kedua yaitu bantuan masyarakat dengan pola pemberdayaan. Disini masyarakat desa bukan hanya dijadikan sebagai subjek tetapi juga sebagai objek pembangunan. Masyarakat diberdayakan sehingga dengan proses pemberdayaan yang ada diharapkan masyarakat desa dapat belajar

dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Harapan lainnya adalah masyarakat desa juga menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan pemerintah.

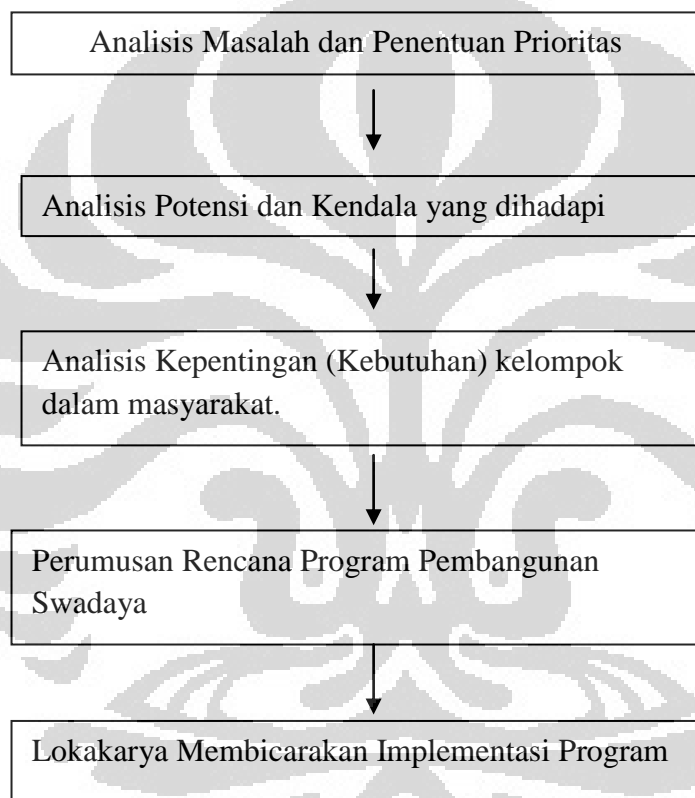
- *Cluster* yang ketiga menurut Amwazi Idrus adalah jika masyarakat sudah lebih mandiri yaitu contohnya dengan adanya program KUR kredit Usaha Rakyat. Masyarakat desa diberikan pinjaman uang untuk membantu menjangkakan usahanya, dan nantinya uang tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah lalu diulir ke daerah lainnya yang belum mendapatkan program tersebut.

Pada PPIP disini berada di *cluster* yang kedua dengan pertimbangan masyarakat di perdesaan masih banyak yang membutuhkan bantuan dengan pola pemberdayaan. Selain itu pertimbangan lainnya dari pola pemberdayaan masyarakat yaitu, dengan harapan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah untuk ditumbuh kembangkan sehingga dapat melaksanakan pembinaan yang akan mendorong kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Plt. Kepala Satker PPIP pusat Posma HS Simanjuntak yaitu:

*“kita ada pelatihan-pelatihan kadang workshop gitu ya ada workshop ditingkat pusat kemudian pelatihan ditingkat propinsi kemudian itu kita undang semua tu aparat di kabupaten. Paling tidak kita upgrade kemampuan mereka mengenai program. Jadi program ini jangan dicampur adukkan seperti proyek biasa, ini adalah program pemberdayaan. Tujuan akhirnya itu bukan semata-mata infrastruktur tapi ada juga aspek bahwa masyarakat itu meningkat pengetahuannya”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat dilaksanakan secara bersinergi dan lebih terarah pada kelompok masyarakat miskin dan wilayah tertinggal.

Dengan itu PPIP disini untuk mendukung program pemerintah yang sedang berlangsung yaitu untuk meningkatkan pelaksanaan PNPM Mandiri melalui dana BLM kepada masyarakat. Dana BLM disalurkan langsung ke desa sasaran untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan usulan prioritas desa yang telah disusun oleh masyarakat desa. Masyarakat juga dapat memilih apakah BLM tersebut akan dipergunakan membiayai satu jenis kegiatan atau bahkan lebih dari itu. Tentunya keputusan tersebut diambil sendiri oleh masyarakat melalui musyawarah desa yang dilakukan.



**Gambar 5.2: Tahap Perencanaan Tingkat Desa**

Sumber: Diolah oleh peneliti

### 5.1.1.3 Lembaga pembuat kebijakan

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya membuat program yang masih berada di bawah naungan PNPM Mandiri, yaitu PPIP. Kementerian PU menanggulangi masalah kemiskinan melalui pembangunan fisik atau lebih tepatnya *concern* pada hal infrastruktur, sehingga

kementerian PU melakukan peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui BLM.

Kementerian PU lebih khususnya Direktorat Jendral Cipta Karya bertugas selaku tim pelaksana pusat. Tim pelaksana pusat merupakan institusi penyelenggara PPIP yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan program. Tim pelaksana pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan penyelenggaraan program PPIP
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program PPIP
- Melaporkan penyelenggaraan program kepada tim pengendali PNPM-Mandiri
- Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan

Mengenai lembaga pembuat kebijakan apakah sejalan dengan kewenangan yang lembaga itu miliki, karena apabila suatu kebijakan tidak sesuai dengan kewenangan dari lembaga tersebut bagaimana kebijakan itu dapat berjalan dengan baik untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dengan demikian pelaksana pembuat kebijakan ini juga perlu diketahui untuk membantu mengetahui apakah sesuai dengan kewenangan yang lembaga itu miliki.

### **1. Kewenangan lembaga pembuat kebijakan**

Program pembangunan infrastruktur perdesaan atau PPIP ini berada di bawah payung PNPM Mandiri, sehingga kelompok kerja pengendali PNPM Mandiri beserta keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dengan demikian PPIP yang dilaksanakan di bawah kuasa Direktorat Jendral Cipta Karya memiliki kewenangan dalam permasalahan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur di desa-desa. Senada dengan yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus yaitu:

*“kemiskinan itu masalah bangsa ya, jadi semua institusi atau KL kementerian lembaga itu harus juga memikirkan itu. Nah karena kita PU*

*itu domainnya adalah infrastruktur kita masuknya melalui itu” (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)*

Dengan adanya PPIP sebagai produk dari PNPM Mandiri yang dimiliki oleh Kementerian PU, yang juga memiliki wewenang dalam bidang pembangunan infrastruktur, maka kebijakan yang di buat dalam penerapan PPIP sudah dapat dikatakan sesuai dengan kewenangan Kementerian PU dalam mengatasi permasalahan keterbatasan infrastruktur yang masyarakat desa hadapi.

Kebijakan meliputi *bina lingkungan, bina sosial, dan bina ekonomi*. Terkait dengan bina lingkungan yaitu untuk meningkatkan daya pembangunan agar tercipta lingkungan yang lestari dan berkelanjutan dan bina sosial yaitu untuk meningkatkan daya sosial agar terciptanya masyarakat efektif, sedangkan bina ekonomi disini untuk meningkatkan daya ekonomi agar tercipta masyarakat yang produktif. Arah kebijakan program yaitu komunitas sebagai pemanfaat dan komunitas juga sebagai pelaku pembangunan, pengambilan keputusan oleh komunitas itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus sebagai berikut:

*“jadi tri bina tadi ada bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia ya. Bina usaha seperti sosial ekonomi termasuk eehm apa orang jompo dikasih santunan. Dari tiga bina itu yang nyebrang ke PPIP hanya bina lingkungan saja. Bina usaha dan bina mausianya tidak secara langsung. bina lingkungan ini ada bina mausia disini dalam arti kelembagaan tadi prosesnya berjalan” (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)*

Maka dengan penerapan tri bina tersebut dalam PPIP juga menambah poin bahwa Kementerian PU memang *concern* pada pembangunan fisik atau infrastruktur yang didampingi pula dengan pemberdayaan masyarakat. Apabila kementerian PU mengambil kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui dana bergulir atau melalui pinjaman-pinjaman untuk daerah itu dapat dikatakan bahwa kewenangan dalam pembuatan kebijakan tidak sempurna karena bukan pada tugas pokok dari lembaga pembuat kebijakan tersebut. Senada dengan yang diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus sebagai berikut:



*“...gak mungkin juga kita kasih modal itu kan kerjanya UMKM atau perbankan bukan kita sehingga contohnya JEK ini dari jepang memaksa kita memakai kredit bergulir tapi kita gak mau karena bukan domain kita gitu lho walaupun ide awalnya ada di kita tapi kalau itu kita yang nangani loh gak pas. Jadi kita masuknya ya melalui jalur kita punya kewajiban untuk itu yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan dasarnya kan sandang pangan papan. Papan menpera tapi kemudian lingkungannya supaya dia bisa dapet sandang yang baik, pangan yang baik, papan yang baik, kita sediakan infrastrukturnya” (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)*

Keputusan yang diambil oleh kementerian PU untuk membantu masyarakat miskin yaitu melalui pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat yang artinya masyarakat dibebaskan untuk membangun infrastruktur apa yang sesuai dengan permasalahan di desa mereka dan tentunya sesuai dengan skala prioritas yang telah dibuat sebelumnya. Kementerian PU tetap berada pada wewenangnya yaitu memiliki kebijakan program bantuan masyarakat yang bertumpu pada pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan atau program lainnya diharapkan dapat saling bersinergi dan mendukung untuk mengurangi masyarakat miskin di perdesaan.

## **2. Pelaksana pembuat kebijakan**

Kebijakan PPIP yang diawali dengan adanya PKPS-BBM selalu mengalami perubahan. PPIP merupakan dana stimulus, kebijakan tersebut dipilih oleh menteri PU dalam sidang kabinetnya. Maksud dari dana stimulan ini ialah, bantuan yang PPIP berikan bukan merupakan dana bergulir, PPIP hanya sekali dan tidak berkelanjutan di satu desa melainkan pindah dari satu desa ke desa lainnya lagi. Dengan dana stimulan yang pemerintah pusat berikan kepada masyarakat desa ini diharapkan masyarakat desa sasaran menjadi terdorong dalam melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa, dengan memberikan peran yang besar kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan mengelolanya sendiri. Pelaksanaan PPIP juga diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya dengan menyusun usulan prioritas desa dan rencana kerja masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan

permasalahannya. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus yaitu:

*“...eeehm ini kan program ini mencuat lagi sebetulnya ditahun 2007 ya pada saat itu terjadi juga harga minyak dan permasalahan ekonomi lah kenaikan harga BBM juga, pada saat itu dimulai dengan yang namanya stimulus, waktu itu PU yang sebetulnya jadi pada saat pemerintah sedang menghadapi persoalan eeehm sidang kabinet menetri PU waktu itu dengan pengalaman PKPS BBM mengusulkan kenapa gak kita carikan dana itu jadi stimulus sifatnya memberi stimulus kepada masyarakat untuk mereka berusaha sendiri jadi dana itu dana bantuan sosial ya BLM ya bantuan langsung masyarakat kita berikan sehingga mereka bisa diberi kesibukan mereka bisa bekerja jadi di gagas oleh PU sebetulnya tapi di angkat jadi kebijakan pemerintah yang pada saat itu disamping adanya PPIP ini juga pernah ada yang namanya kamu pernah denger BLT bantuan langsung tunai. Itu juga pemikiran pengentasan secara macem-macem kan salah satunya yang kita angkat yang diusulkan oleh PU adalah ya PPIP ini” (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)*

Menurut Amwazi Idrus, gagasan awal dari Kementerian PU mengenai PPIP ini lalu pemerintah menyetujui dengan adanya program BLM yang open menu dan pemberdayaan ada juga di dalam PPIP sehingga dengan adanya kebijakan ini kementerian PU mengharapkan masyarakat dapat mengatasi permasalahan keterbatasan infrastruktur yang dapat menghambat mobilisasi yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat desa dan melakukan pembangunan infrastruktur untuk dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikatak oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus yaitu:

*“jika masyarakat miskin secara infrastuktur otomatis ekonominya juga. Karena infrastuktur itu adalah penunjang, pendukung ekonomi. Dia akan kesulitan berusaha, kesulitan meningkatkan ekonominya kalau infrastrukturnya gak ada. Jadi istilah kemiskinan infrastuktur itu sendiri sebenarnya tidak ada yang ada miskin ekonomi ya kan. Nah agar supaya ekonominya bisa bergerak kita dukung dengan infrastuktur itu dari skala desa, nasional pun begitu”(Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)*

Dengan demikian Kementerian PU dalam menetapkan kebijakan PPIP tetap berada pada jalurnya yaitu penanganan masalah infrastruktur perdesaan. Sehingga kebijakan ini dinilai tepat dibuat oleh lembaga yang memiliki

wewenang dan dijalankan pula oleh lembaga yang memiliki domainnya pada bidang infrastruktur.

### 5.1.2 Ketepatan Pelaksanaan

Pelaksanaan PPIP melibatkan berbagai unsur dan instansi terkait yang berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. Namun diharapkan peran pemerintah daerah selaku pembina pembangunan di wilayahnya dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan PPIP ini dengan memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program dan mewujudkan harmonisasi program dan koordinasi antar tingkat atau jenjang pemerintah yang lebih optimal. Sehingga perlu untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam implementasi PPIP. Seperti yang dikatakan oleh Plt. Kepala Satker PPIP Pusat Posma HS Simanjuntak yaitu:

*“kalau pelaksananya itu ditingkat pusat, provinsi sama kabupaten membentuk namanya satuan kerja ya. Satuan kerja ini SK nya dari meneri PU itu untuk menyalurkan dananya. Disamping satuan kerja juga ada namanya tim pelaksana itu di semua tingkatan juga, tingkat pusat, provinsi, kabupaten”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Selain adanya satuan kerja yang di bentuk pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, tim pelaksana juga ada pada tiap jenjang pemerintah. Setelah itu adanya juga konsultan dan fasilitator masyarakat yang akan mendampingi masyarakat di desa dalam melakukan pembangunan. Senada dengan yang dibicarakan oleh Plt. Kepala Satker PPIP Pusat Posma HS Simanjuntak yaitu:

*“Kita juga ada konsultan, konsultan yang mendampingi mulai dari tingkat pusat provinsi juga kabupaten selain itu kita ada namanya fasilitator masyarakat, fasilitator masyarakat ini yang day to day nya setiap hari mendampingi masyarakat. Mulai dari identifikasi masalahnya, perencanaanya, pelaksanaannya sampai nanti penyusunan oprasi dan pemeliharaan. Ini semua rantai mbak jadi sambung menyambung seperti mesin”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PPIP ini diantaranya:

### **1. Tingkat Pusat**

Kegiatan PPIP di tingkat pusat berada pada satuan kerja pembinaan pembangunan infrastruktur perdesaan dimana kuasa pengguna anggaran dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh menteri PU. penyelenggaraan PPIP pada tingkatan ini di selenggarakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPK PIP). PPK PIP tingkat pusat inilah yang nantinya juga akan mengelola anggaran PPIP pada tiap tahun pelaksanaannya. Satuan kerja tingkat pusat akan melakukan koordinasi dengan tim pelaksana pusat dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat.

### **2. Tingkat Provinsi**

Sedangkan kegiatan PPIP di tingkat provinsi berada pada satuan kerja pengembangan kawasan permukiman dan pejabat inti di satker provinsi diangkat oleh menteri PU. Pada tingkat provinsi juga terdapat tim pelaksana yang nantinya akan berkoordinasi oleh satker, selain berkoordinasi dengan tim pelaksana provinsi juga akan berkoordinasi dengan tim pelaksana yang berada di pusat dan kabupaten. Fasilitator masyarakat akan di rekrut oleh satker provinsi.

### **3. Tingkat Kabupaten**

Kegiatan PPIP di tingkat kabupaten berada pada satuan kerja pembangunan infrastruktur permukiman kabupaten dimana kuasa dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh menteri PU. Tingkat kabupaten sudah langsung memberi arahan kepada organisasi masyarakat setempat atau OMS.

### **4. Tingkat Kecamatan**

Tingkat kecamatan dalam hal ini adalah perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat dengan tugas yaitu mengkoordinasikan kepada masyarakat dalam hal pemberdayaannya, penerapannya, serta pemeliharaan infrastruktur nantinya. Pihak kecamatan juga melakukan pembinaan pada pemerintah desa.

## 5. Pemerintah Desa

Pemerintah desa dalam hal ini adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa dan tentunya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

## 6. Masyarakat

Masyarakat desa sasaran merupakan pemilik PPIP sehingga masyarakat harus dapat memberikan dukungan dan berperan aktif selama penyelenggaraan program. Masyarakat merupakan pelaksana utama dalam pelaksanaan program di tingkat desa, sehingga keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat tersebut baik dalam proses penyiapan masyarakat, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharannya.

### Struktur Organisasi PPIP

Penyelenggaraan PPIP melibatkan instansi terkait dan komponen pelaksana mulai dari tingkat desa, kabupaten, propinsi sampai tingkat pusat, yaitu terdiri dari:

Pusat	Propinsi	Kabupaten	Desa
1. Tim Pelaksana Pusat	1. Tim Pelaksana Propinsi	1. Tim Pelaksana Kabupaten	1. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)
2. Satuan Tugas	2. Satker Propinsi	2. Satker Kabupaten	2. Kelompok Pemanfaat Penerima
3. Konsultan Manajemen Pusat	3. Tenaga Ahli Majemen Propinsi (konsultan)	3. Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (konsultan)	3. Kader Desa
			4. Aparat Desa
			5. Fasilitator (konsultan)

**Gambar 5.3: Struktur Organisasi PPIP**

Sumber: Buku Pedoman PPIP

Dari semua elemen-elemen yang terkait dalam pelaksanaan PPIP ini masyarakat yang berperan sangat besar untuk keberhasilan program tersebut di desanya. Karena program ini adalah program pemberdayaan masyarakat maka peranan masyarakat dituntut besar dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus sebagai berikut:

*“...full masyarakat. Pemerintah melalui PU, lalu pemerintah tingkat propinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat sendiri”* (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)

Semua tingkat pemerintah saling mempengaruhi, apabila tingkat pusat kurang bisa berkoordinasi secara baik dengan tingkat provinsi, lalu provinsi dengan kabupaten, kabupaten dengan kecamatan, kecamatan dengan pemerintah desa dan seterusnya. Maka bisa saja terjadi kekacauan pada tahap pelaksanaan, karena masing-masing tingkatan pemerintah mempunyai tugas masing-masing dan bersifat berjenjang. Senada dengan yang dikatakan oleh Plt. Kepala Satker Pusat Posma HS Simanjuntak yaitu:

*“Ini semua rantai mbak jadi sambung menyambung seperti mesin, ada yang kecil ada yang besar kalau satu berhenti yang memang otomatis itu semuanya terganggu”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Maka dengan adanya pelaksana di tiap tingkatan pemerintah, akan memudahkan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaan, akan dapat ditelusuri dari tingkatan pemerintah mana yang melakukan ketidaksesuaian terhadap pedoman yang sudah ditentukan tersebut. Karena lebih mudah untuk mempertanggung jawabkan pada tingkatan pemerintah yang mana terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Plt. Kepala Satker PPIP Pusat Posma HS Simanjuntak yaitu:

*“tergantung, ya kalau kejadiannya di tingkat kabupaten maka tanggung jawab pertama yang harus sebenarnya kita harapkan ditingkat kabupaten itu juga bisa menyelesaikan kalau disitu tidak bisa naik ke provinsi, kalau di provinsi tidak bisa naik ke pusat seperti itu jadi kita penanganannya juga berjenjang harapannya ya itu tadi salah satu pemberdayaan dari aparat tadi. Jadi jangan sedikit-sedikit kita minta petunjuk ke pusat selain di era otonomi sekarang itu tidak pas lagi kita juga memberi ada sedikit*

*tujuan dari PPIP ini pengen menmgembalikan wewenang provinsi kan sejak otonomi daerah ini seolah-olah kabupaten itu sudah tidak peduli sama provinsinya jadi langsung main pusat, kita gak mau. Kalo ada masalah dikabupaten emang mereka lapor ke pusat juga tapi kita tanya lagi ke provinsinya sudah mengetahui belum tentang masalah ini, jadi diselesaikan dulu ditingkat provinsi kalau tidak bisa baru ke tingkat pusat seperti itu. Jadi penyelesaian masalahnya juga berjenjang, kita sangat mengharapkan permasalahan itu tidak perlu sampai ke pusat” (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)*

Dengan adanya jenjang dalam pelaksanaan PPIP, diharapkan permasalahan yang terjadi juga ditangani secara berjenjang. Karena dengan adanya PPIP diharapkan pemerintah daerah juga lebih mandiri untuk menangani masalah yang ada di daerahnya. Mengenai pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PPIP juga ada pihak swasta yang ikut terlibat tetapi tidak di semua desa keterlibatan pihak swasta ini ada. Keterlibatan pihak swasta biasanya terjadi karena infrastruktur yang desa tersebut bangun dapat mempengaruhi suatu perusahaan yang ada di sekitarnya. Dengan itu maka pihak swasta akan ikut serta dalam proses pembiayaan, sehingga dana yang dikucurkan pemerintah sebesar 250 juta akan bertambah dengan adanya keterlibatan pihak swasta. Serupa dengan yang dikatakan oleh Plt. Kepala Satker PPIP Pusat Posma HS Simanjuntak yaitu:

*“Jadi eeem seperti kemarin di Penajam yang saya lihat itu Penajam pasir utara di Kalimantan Timur PPIP masuk dia punya apa rencana membangun jalan dan semacam jembatan tapi di cor beton gitu, diujung sana dia juga merencanakan untuk perbaikan apa tambatan perahunya nah karena disitu ada perusahaan minyak juga gak usah saya sebutkan namanya yang beraktivitas disitu yaudah mereka akhirnya kalian beresin saja itu tambatan perahu biar yang untuk jalan dan cor betonnya itu dari kami” (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)*

Keterlibatan swasta dalam pelaksanaan PPIP sebenarnya disambut dengan baik oleh pemerintah. Karena dengan adanya keterlibatan swasta, infrastruktur juga menjadi lebih berkembang dan semacam ada simbiosis mutualisme antara perusahaan swasta yang ada disekitar desa dengan masyarakat desa tersebut. Hal ini juga dikatakan oleh Plt. Kepala Satker PPIP Pusat Posma HS Simanjuntak mengenai kerjasama antara swasta yaitu sebagai berikut:

*“dan sebenarnya itu juga kita harapkan eeemh namanya PNPM Mandiri kan produknya itu namanya PJM desa itu yang sebenarnya kita harapkan di jual-jual ke swasta ini yang dinamakan channelling jadi mungkin dana mereka ada yang CSR nya mereka itu bisa dipake untuk membiayai yang tertulis di PJM nya tapi itu memang masih belum begitu banyak ya kalo di PPIP, kalo di PNPM yang*

*lain sudah banyak di PNPB Perkotaan dan P2KP itu sudah banyak” (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)*

Dengan adanya keterlibatan swasta seperti yang dijelaskan oleh narasumber di atas, memang sebenarnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peranan industri dan usaha juga dinilai perlu berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

### **5.1.3 Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran ini sangat penting untuk dilihat, karena apabila sasaran tidak tercapai maka nantinya dapat dikatakan suatu program tersebut kurang berhasil dilaksanakan di suatu desa. Tujuan PPIP itu sendiri adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam PPIP masyarakat desa merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Oleh karena itu perlu dilakukan persiapan yang matang bagi keterlibatan masyarakat dan dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat bukan berarti kinerja program buruk. Bisa juga berarti bahwa masyarakat menjadi terberdaya dan lebih sadar, peduli dan secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

Program ini akan mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat, mememberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merancang, melaksanakan, mengelola dan memantau program-program berbasis komunitas. Selain itu juga untuk penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat, peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui BLM. Senada dengan yang diungkapkan oleh Plt. Kepala Satker Provinsi Suparno Prawitorejito yaitu:

*“seperti yang saya bilang tadi ya masyarakat dilibatkan dalam hal mulai dari membentuk pengurusnya kan masyarakat juga, kemudian mereka dalam hal penyusunan RPJM nya kan masyarakat juga, terus dalam hal perencanaan masyarakat juga dilibatkan” (Hasil wawancara dengan Suparno Prawitorejito, 23 Mei 2012)*

Sasaran desa pada penelitian ini ialah desa Mayangan yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Desa mayangan mendapatkan dana dari



PPIP pada tahun 2009 atas dasar data dari BPS dan desa mayangan termasuk desa miskin yang pada saat itu memiliki permasalahan banjir rob yang mengakibatkan tambak udang sebagai mata pencaharian masyarakat desa mayangan juga terkena dampak dari adanya banjir rob tersebut. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai siapa saja kelompok sasaran PPIP, apa saja manfaat dari adanya PPIP, bagaimana dampak dari adanya PPIP, dan apa saja perubahan yang terjadi setelah adanya PPIP di desa Mayangan.

### 5.1.3.1 Kesesuaian sasaran dengan perencanaan PPIP

Perencanaan PPIP di desa mayangan di jalankan oleh masyarakat, karena PPIP adalah program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat disini aktor utamanya. Mulai dari perencanaan pembangunan sampai kepada pelaksanaan pembangunan bahkan tahap setelah pembangunan infrastruktur yaitu pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun, karena perencanaannya masyarakat yang menyusun dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan langsung mengenai pada sasaran yang desa tersebut tuju dan langsung dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tersebut. Selain itu masyarakat juga menjadi pengurus dalam proses PPIP berlangsung, mulai dari ketua organisasinya sampai pada pengerjaan infrastrukturnya. Seperti yang disampaikan oleh PPK satket provinsi jawa barat Suparno Prawitorejo sebagai berikut:

*“seperti yang saya bilang tadi ya masyarakat dilibatkan dalam hal mulai dari membentuk pengurusnya kan masyarakat juga, kemudian mereka dalam hal penyusunan RPJM nya kan masyarakat juga, terus dalam hal perencanaan masyarakat juga dilibatkan”* (Hasil wawancara dengan, Suparno Prawitorejo, 23 Mei 2012)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa mayangan Kusnafie yaitu:

*“jadi ketika dibangun itu dibuat semacam panitia, namanya lupa lagi saya, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan panitia itulah yang membangun jadi tidak melibatkan aparat desa jadi dari masyarakat dan yang memilih masyarakat”* (Hasil wawancara dengan Kusnafie, 21 Mei 2012)

Pada proses perencanaan juga tidak berjalan dengan mulus, tetapi hambatan itu hanya sekedar perbedaan pendapat mengenai infrastruktur apa yang

nantinya akan di bangun di desa mayangan, tetapi dengan adanya musyawarah desa yang dilakukan oleh masyarakat dean dengan memperhatikan prioritas desa, maka masyarakat sepakat untuk membangun pintu air untuk mengatasi permasalahan banjir rob yang sering terjadi dan membangun sumber air dengan menggunakan jetpam yang di aliri kerumah masyarakat karena mengingat sulitnya untuk mendapatkan air bersih di desa mayangan. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa mayangan Kusnafie yaitu:

*“Jadi ketika musyawarah desa itu memang banyak yang di usulkan masyarakat. Ada jalan, ada pintu air, ada air bersih dan lain sebagainya. Cuman yang paling diperlukan masyarakat karena ini menyangkut satu dusun maka pada waktu itu diputuskan dua. Yang prioritas satu pintu air satunya lagi air bersih. Karena mengingat banjirnya dan kekurangan air. yang peertama karena masyarakat sadar bahkan sangat sadar bahwa di dusun krajan itu memang kalau air besar itu selalu kebanjiran terutama dari persawahan juga, lingkungan masyarakat termasuk empang. Jadi kalau pintu air tidak ada empang tidak berfungsi, sawah terancam dan masyarakat jelas terendam. Maka musyawarah itu benar-benar dijelaskan fungsi dan perkiraan dampak dari bangunan yang akan dibangun. Masyarakatpun akhirnya mengerti dan sepakat dengan hasil musyawarah”* (Hasil wawancara dengan Kusnafie, 21 Mei 2012)

Dengan diputuskannya pembangunan pintu air dan air bersih yang akan dilakukan di desa mayangan dari program PPIP, berbagai pertimbangan muncul karena adanya permasalahan yang ada di desa mayangan, seperti yang dikatakan oleh sekretaris desa mayangan Warnita M Noor yaitu:

*“ehhm kalo yang ikut pada saat itu kan komponen masyarakat waktu itu juga dibuat ada lembaga masyarakat yang memang sebagai orang yang akan ikut berperan dalam perawatan dan sebagainya dan sosialisasinya. Nah kita banyak sosialisasi kepada masyarakat karena pada saat itu kondisi masyarakat mayangan memang benar-benar khususnya di dusun krajan, di dusun krajan ini selalu tenggelam karena banjir air pasang atau banjir rob. Maka satu-satunya jalan untuk menguragi dari itu dibuatnya pintu air, nah alhamdulillah sampe sekarang juga masih kita pake dan masih kita pergunakan, karena fungsinya pada saat air pasang itu kita tutup. Tapi pada saat air dari hulu turun nah itu kita buka. Jadi sebenarnya fungsinya ada dua karena saluran itu juga saluran pembuang. Terus juga ini untuk pembangunan air bersih itu juga dari sana anggarannya, jadi alhamdulillah sih dengan adanya PPIP itu terasa manfaatnya untuk desa mayangan”* (Hasil wawancara dengan Warnita M Noor, 21 Mei 2012)

Adanya perencanaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa mayangan, dibawah ini akan dibahas mengenai kelompok sasaran dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah adanya PPIP di desa mayangan dan bagaimana keadaan desa mayangan sebelum adanya PPIP di desa tersebut, sehingga dapat dilihat apa perencanaan yang telah masyarakat desa buat mengenai sasaran yang dituju atau tidak.

### 1. Kelompok sasaran PPIP

Masyarakat miskin yang menjadi sasaran pada PPIP. Artinya orientasi kegiatan PPIP baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk miskin. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Plt. Kepala Satker PPIP Pusat Posma HS Simanjuntak yaitu:

*“kalau desa sasaran jelas ya seperti tadi yang dulunya desa tertinggal sekarang menjadi desa miskin, kalo kelompok sasarannya kita mengaharapkan itu keompok yang miskin di desa itu tapi bukan berarti dalam hal ini aja mbak kita pengen infrastruktur yang terbangun itu adalah infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan bukan yang diinginkan. Dan kalo dibutuhkan itu harapannya adalah yang dibutuhkan oleh kelompok miskin, biasanya dalam satu desa itu tidak hanya satu dusun saja, nah infrastruktur diharapkan dibangun di dusun yang banyak masyarakat miskinnya. Kelompok sasarannya itu dan di prioritaskan di kelompok yang miskin itu. Dan dari pekerjanya juga orang-orang yang miskin itulah yang dipekerjakan”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari PLT. Kepala Satker PPIP Provinsi Suparno Prawitorejo yaitu:

*“bahwa yang menerima kegiatan PPIP ini kan desa yang tertinggal yang sudah databasnya kan ada di bapenas dan menkokesra. Rencananya sampai 2014 di tangannya”* (Hasil wawancara dengan Suparno Prawitorejo, 23 Mei 2012)

Maka desa sasaran yang mendapatkan dana PPIP ini yaitu desa miskin yang memiliki keterbatasan infrastruktur, sedangkan yang berkerja dalam proses pembangunan juga masyarakat miskin. Seperti yang di ungkapkan pada kutipan wawancara dengan Plt. Satker PPIP Pusat Posma HS Simanjuntak bahwa masyarakat miskin sangat di prioritaskan dalam PPIP, baik dalam proses perencanaannya maupun pembangunannya. Pada tahap perencanaan

pembangunan infrastruktur akan lebih di dahulukan dan di prioritaskan infrastruktur yang masyarakat miskin benar-benar butuhkan, bukan yang masyarakat inginkan, sehingga bangunan yang dibangun nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat desa setempat dan sehingga infrastruktur tersebut juga akan dipelihara dengan baik oleh masyarakat desa, karena apabila infrastruktur itu dimanfaatkan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat miskin maka bangunan itu akan di pelihara dengan baik agar bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Atau mungkin saja apabila pemberdayaan masyarakat juga masih berjalan dengan baik di desa itu, bangunan yang PPIP berikan dapat berkembang dari adanya swadaya yang masyarakat berikan.

## 2. Manfaat PPIP

Manfaat dari PPIP sangat dirasakan oleh masyarakat di desa Mayangan. Desa ini seringkali dilanda banjir yang diakibatkan pasnagnya air laut atau sering disebut banjir rob. Ketika banjir rob sedang terjadi di desa mayangan, maka rumah masyarakat juga terkena imbasnya, karena air itu memasuki sampai ke rumah-rumah penduduk. Selain itu tambak atau yang biasa di sebut empang oleh masyarakat desa mayangan juga semakin sempit lahannya karena akibat banjir rob tersebut. Selain banjir menggenangi rumah dan tambak, air rob juga menggenangi sawah-sawah masyarakat desa mayangan.

Hadirnya PPIP memang banyak dirasakan manfaatnya. Bukan hanya saja PPIP yang hadir di desa mayangan. Manfaat PPIP selain dirasakan oleh masyarakat desa juga dirasakan oleh fasilitator masyarakat sebagai elemen lainnya dan bagian dari rakyat Indonesia, dengan itu juga akan menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat lainnya, jadi bukan hanya masyarakat desa saja yang merasakan manfaatnya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Plt. Kepala Satker PPIP Provinsi Suparno Prawitorejo yaitu:

*“manfaatnya banyak ya, termasuk tadi yaitu mengenai aksebelitas perekonomian masyarakat terus mengurangi pengangguran, terus dengan adanya fasilitator mengurangi pengangguran sarjana”* (Hasil wawancara dengan Suparno Prawitorejo, 23 Mei 2012)

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Kepala Satker PPIP Kabupaten Musril Jaya yaitu:

*“oh sangat besar manfaatnya. Tapi ya kita menilainya gak bisa menilai uang. Tapi menilai manfaatnya dulu, nilai manfaat sangat besar. Bahkan mereka masih sangat membutuhhkan”* (Hasil wawancara dengan Musril Jaya, 21 Mei 2012)

Masyarakat desa mayangan itu sendiri sangat berterimakasih dengan adanya PPIP di desanya, manfaat dari adanya PPIP di desa mayangan sangat dirasakan dari tahun 2009 pada saat pembangunan itu dilakukan dan manfaat itu masih juga dirasakan sampai sekarang tahun 2012. Seperti yang dikatakan oleh anggota masyarakat desa mayangan Wawan Djuanda yaitu:

*“yang pertama PPIP itu justru banyak sekali manfaatnya diantaranya itu menahan air laut istilahnya menahan masuk ke rumah-rumah warga karena memang terlalu dekat dengan laut. Yang kedua menahan lagi yang istilahnya masuknya air ke sawah-sawah yang di sebelah selatan itu, itu di antara manfaat PPIP yang ada di sana”* (Hasil wawancara dengan Wawan Djuanda, 22 Mei 2012)

Pernyataan dari Wawan Djuanda juga diperkuat oleh pernyataan dari masyarakat desa Mayangan lainnya sebagai informan yaitu Eti sebagai berikut:

*“sebagai penerima manfaat alhamdulillah saya bisa merasakan dapet air bersih gitu dari PPIP, saya dulu mah nyalur ke tetangga tapi kan lama-lama gak enak juga jadi setelah ada PPIP penyalurannya bagus dan airnya banyak keluaranya jernih gitu. ya ada manfaatnya itu, banjir itu jadi gak terlalu masuk gitu. Jadi ada manfaatnya juga”* (Hasil wawancara dengan Eti, 22 Mei 2012)

Masyarakat desa mayangan yang bertindak sebagai informan juga mengatakan hal yang serupa seperti yang sebelumnya dikatakan oleh dua Informan masyarakat desa Mayangan. Hal ini dikatakan oleh Sukardi yaitu:

*“Dengan adanya pintu air itu jadi agak mengurangi itu mbak banjirnya. Kalau ada air pasang agak sedeng tu gak masuk ke rumah penduduk dan ke pertanian. Jadi saya tu sangat mendukung sekali baguslah kalau ada PPIP itu dan air bersih dulu mah susah masyarakat kalo sekarang jadinya banyak air yang ngalir ke masyarakat. Di tiap-tiap dusun, di tiap-tiap RT. Dulu mah kan susah air tawar tu. Jadi dulu mah pakenya sanyo buka pake jetpam, sekarang kan pake jetpam jadi enak airna banyak. masyarakat sangat merasa manfaatnya”*(Hasil wawancara dengan Sukardi, 22 Mei 2012)

Informan lainnya masih berpendapat hal yang serupa dengan adanya PPIP, masyarakat merasakan manfaatnya walaupun tidak maksimal. Yaitu yang dikatakan oleh Tosin:

*“ya seperti adanya PPIP setelah dilaksanakan itu karena tujuan awalnya adalah penanggulangan masalah bencana jadi dapat terkabulkan walau tidak maksimal tapi masyarakat sangat beruntung sekali merasa bersyukur dapat tertanggulangi masalah bencana yang kecil lah terutama. Terutama dalam sektor usaha tambak dan sektor tani barangkali dapat diselamatkan untuk sementara ini. akhirnya masyarakat ya sangat bersyukur dengan adanya PPIP ini. Apalagi dalam PPIP itu bukan hanya satu persoalan penanggulangan ya termasuk juga penanggulangan permasalahan kelangkaan air bersih nah itu juga sudah tercover masalah tadi sehingga ya sangat dan sangat masyarakat itu merasa aspirasinya dapat di bantu dan disalurkan dan akhirnya ucapan terimakasih terhadap PPIP masyarakat betul-betul mengatasi kendala permasalahan ekonominya”* (Hasil wawancara dengan Tosin, 21 Mei 2012)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang disebut dengan PPIP yang berada di desa Mayangan sangat diraskan manfaatnya oleh masyarakat setempat, bahkan masyarakat desa mayangan berterimakasih dengan adanya PPIP di desanya. Karena dengan adanya PPIP masyarakat desa mayangan terbantu dari banjir rob yang sering terjadi di desa tersebut, dan permasalahan air bersih juga teratasi setelah dibangunnya jetpam di lima titik untuk disalurkan air bersih ke rumah-rumah masyarakat desa mayangan.

Masyarakat desa mayangan merasakan manfaat dari adanya dua jenis bangunan yang di bangun di desanya, yang pertama adalah dibangunnya pintu air yang dapat mencegah air laut masuk ke sekitar masyarakat pada saat air laut pasang, walaupun ketika air pasang yang besar datang pasti akan tetap masuk ke sekitar masyarakat desa tetapi jika air pasang tidak besar, maka masyarakat desa mayangan terselamatkan dengan adanya pintu air tersebut. Masyarakat desa pun juga dapat beraktifitas seperti biasa walaupun air pasang yang kecil datang. Selain itu bangunan lain yang didirikan oleh masyarakat desa mayangan adalah jetpam, dengan adanya jetpam yang di salurkan ke lima titik ini, masyarakat menjadi tidak sulit untuk mendapatkan air bersih. Air pun tidak lagi merupakan barang langka di desa mayangan, karena sejak didirikannya jetpam di desa itu air bersih sudah

dapat mengalir dengan banyak ke rumah-rumah masyarakat desa mayangan. Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1: Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Mayangan**

No	Jenis Bangunan	Letak	Manfaat
1.	Pintu Air	Dusun Krajan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghalangi air masuk ke rumah penduduk (jika air pasang tidak besar)</li> <li>2. Menghalangi air masuk ke persawahan penduduk (jika air pasang tidak besar)</li> <li>3. Menghalangi air masuk ke tambak warga atau empang (jika air pasang tidak besar)</li> </ol>
2.	Jetpam	Dusun Pondok Bali dan Dusun Krajan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan penduduk desa Mayangan mendapatkan air bersih</li> </ol>

Sumber: diolah oleh peneliti

Berikut adalah visualisasi dari pembangunan yang dilakukan di desa Mayangan yaitu pintu air dan Jetpam yang dialirkan ke rumah-rumah warga:



**Gambar 5.4: Pintu Air**

Sumber: diolah oleh peneliti





**Gambar 5.5: Gambar Tower Air penampungan Jetpam**

Sumber: diolah oleh peneliti

Adanya manfaat yang masyarakat rasakan atas hadirnya PPIP di desa mayangan merupakan suatu harapan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, karena dengan adanya manfaat yang masyarakat desa rasakan dapat pula dikatakan bahwa PPIP berjalan dengan baik di desa tersebut dan masyarakat desa mayangan akan memelihara infrastruktur yang ada dikarenakan masyarakat merasakan manfaat dari bangunan tersebut. Ketika bangunan tersebut dipelihara dengan baik oleh masyarakat, maka masyarakat bertujuan agar bangunan tersebut dapat tetap ada dan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat desa mayangan.

### **3. Perubahan yang terjadi setelah adanya PPIP di desa mayangan**

Sebelum membahas perubahan yang terjadi dengan adanya PPIP di dalam desa mayangan, terlebih dahulu akan mengemukakan perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya PPIP secara garis besar. Pada umumnya perubahan yang

terjadi setelah adanya PPIP yaitu masyarakat menjadi lebih baik dalam bersosialisasi. Dalam artian masyarakat yang tadinya terisolir tetapi setelah adanya PPIP masyarakat jadi dapat melakukan interaksi sosial lebih baik. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus yaitu:

*“masyarakat itu sangat menikmati apa yang dia bangun sendiri, karena beberapa kali kita ke lapangan ada jembatan yang tadinya mereka harus keliling jauh atau memang tidak terhubung sekarang sudah terhubung dan secara sosial hubungan mereka dengan desa yang terisolir tadi jadi lebih baik gitu ya secara ekonomi pastilah mereka aksesnya ke pasar menjadi lebih mudah. Mereka menjadi lebih hidup aja dengan adanya infrastruktur yang tadinya mereka kesulitan air sekarang mereka bisa mendapatkan air yang lebih murah dan lebih baik gitu, artinya hampir seluruhnya itu bisa dikatakan bahwa infrastruktur yang mereka bangun mereka nikmati itu mereka senang gitu. Jadi berbeda dengan jaman inpres dulu, bukan menyalahkan yang lama ya, karena yang di bangun tidak yang mereka inginkan ya itu mereka dapet syukur terus dipelihara juga enggak ini bedanya karena ini polanya yang berbedaya open menu tadi”* (Hasil wawancara dengan Amwazi Idrus, 25 Mei 2012)

Dengan pola *open menu* tersebut masyarakat merasakan perubahan bukan hanya dalam hal bertambahnya infrastruktur yang tersedia di desa. Melainkan juga masyarakat desa dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut sesuai dengan kebutuhan yang selama ini membuat masyarakat terbatas dalam hal mengakses ke suatu tempat atau bahkan bersosialisasi lebih baik lagi. Selain itu perubahan-perubahan yang terjadi secara umum dengan adanya PPIP ini dapat pula dalam bentuk pola masyarakat desa dalam berorganisasi, para masyarakat menjadi lebih terorganisir dalam hal kepengurusan desanya, dan wawasan masyarakat menjadi lebih luas, seperti yang dikatakan oleh PPK Provinsi Jawa Barat Suparno Prawitorejo sebagai berikut:

*“secara perubahan tadi terutama dari segi kepengurusan ya. Mereka diajari membuat RPJM jadi lebih mengertilah menambah wawasan mereka. Kalau perubahannya untuk masyarakat secara umum ya perekonomian tadi bu”* (Hasil wawancara dengan Suparno Prawitorejo, 23 Mei 2012)

Perubahan yang terjadi setelah adanya PPIP di desa mayangan yaitu berkurangnya air yang masuk kerumah-rumah warga masyarakat karena adanya pintu air yang dibangun. Pintu air tersebut dapat mengantisipasi masuknya air laut

ketika air pasang, tetapi jika air laut pasang dalam jumlah yang besar perumahan warga akan tetap tergenangi air laut. Pintu air yang didirikan di desa mayangan hanya dapat membantu mengantisipasi masuknya air laut jika air pasangannya kecil, sedangkan air bersih di desa mayangan dahulu sebelum adanya PPIP, masyarakat desa hanya sedikit yang menggunakan sanyo untuk mendapatkan air yang layak dan sebagiannya lagi yang tidak memakai sanyo meminta pada tetangga di sekitarnya yang memiliki pompa sanyo. Setetelah adanya PPIP di desa mayangan, semua masyarakat desa sudah di alirkan air dari galian jetpan melalui pipa-pipa ke rumah masing-masing warga desa mayangan.

Banjir rob yang seringkali terjadi di desa mayangan semakin bertambah intensitasnya tanpa bisa di prediksi, karena dulu air pasang itu dapat diprediksi ketika terjadinya bulan purnama atau hanya pada tanggal tertentu saja. Banjir rob yang tidak bisa diprediksi ini terjadi diperkirakan masyarakat desa mayangan sejak terjadinya tsunami di aceh, karena sejak saat itu ketika terjadi pasang volume air menjadi lebih besar dan tidak bisa di perkirakan kapan air laut akan pasang. Hal ini dikemukakan pula oleh sekretaris kecamatan Legonkulon yaitu Soedarya:

*“mayangan itu daerah rawan banjir karena terkena rob, sedangkan rob sekarang tidak bisa diprediksi seperti yang dulu-dulu akibat tsunami yang di sumatera itu. Tanpa di prediksi itu, biasanya kan orang mayangan orang nelayan kan prediksinya setiap akhir bulan atau bulan purnama. Pokoknya jadi tidak bisa di prediksi dan jadi berubah-ubah”* (Hasil wawancara dengan Soedarya, 22 Mei 2012)

Hal ini diperkuat juga oleh pernyataan dari tokoh masyarakat desa mayangan, seperti yang dikatakan oleh Edi Watma sebagai berikut:

*“ini sejak tsunami aceh itu sampai sekarang jadi tidak bisa diprediksi kapan banjir rob datang. Sejak 2004 lah ya itu kira-kira. Dulu sebelum ada gempa aceh mah belum begini neng”* (Hasil wawancara dengan Edi Watma, 22 Mei 2012)

Tokoh masyarakat desa mayangan Anwar juga menyatakan hal yang serupa seperti dua narasumber di sebelumnya yaitu:

*“Dari tahun 2004. Jadi setelah tsunami di Aceh, kalau tidak salah, 10 hari kemudian atau 15 hari kemudian, dampaknya masuk ke daerah kami ini, sampai sekarang”* (Hasil wawancara dengan Anwar, 22 Mei 2012)

Dari pernyataan yang di lontarkan oleh ketiga narasumber diatas mengatakan bahwa desa mayangan menjadi lebih parah terkena banjir rob sejak adanya tsunami yang terjadi di aceh. Banjir rob yang terjadi di mayangan menggenani permukiman warga, persawahan serta tambak milik warga. Sehingga warga mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun dalam hal ekonomi. Keadaan desa mayangan sebelum adanya PPIP seperti yang dikatakan oleh anggota masyarakat mayangan yaitu Sukardi sebagai berikut:

*“ya agak sulit air tawar aja ada yang minta ke tetangga. Kalau banjirnya dulu mah memang banjirnya sering”* (Hasil wawancara dengan Sukardi, 22 Mei 2012)

Anggota masyarakat mayangan lainnya yaitu Tosin juga berpendapat menenai keadaan desa mayangan sebelum adanya PPIP sebagai berikut:

*“ya katakanlah keadaan desa dikita itu sebelum adanya PPIP betul-betul dalam keadaan kurang stabil gitu ya sebab apa, ya yang tadi itu sumber dayanya itukan bisa dikatakan sumbernya terganggu akhirnya dengan sendirinya perekonomian itu sedikit zigzag lah itu agak kurang stabil”* (Hasil wawancara dengan Tosin, 21 Mei 2012)

Kesulitan yang masyarakat desa mayangan alami akibat terbatasnya air bersih dan di tambah pula dengan datangnya banjir rob yang sudah tidak bisa di prediksi lagi mengakibatkan masyarakat desa mayangan kesulitan menjalani aktivitasnya. Baik dalam menjalani aktivitas pertanian, pertambakan, ataupun melaut. Selain itu sekolah yang berada di susun krajan juga ikut terendam jika banjir rpb datang sehingga seringkali siswa atau siswi sekolah dasar tersebut berada di kelas dalam keadaan banjir yang menggenani kelas-kelas di sekolah dasar tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh masyarakat desa mayangan yaitu Tosin sebagai berikut:

*“mau air sekecil apa juga masuk aja ke sekolah ya, jadi siswa disini sering belajar di dalam kelas ada air yang tergenang di dalamnya”* (Hasil wawancara dengan Tosin, 21 Mei 2012)

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh pernyataan dari staff kecamatan Legonkulon Soedarya sebagai berikut:

*“Biasanya disekolahan sana kalo begitu ada air langsung masuk, ini tidak bisa masuk, tapi memang bila ada PPIP berkelanjutan dan ada proyek-proyek yang lain kayaknya agak tertanggulangi”* (Hasil wawancara dengan Soedarya, 22 Mei 2012)

Program pembangunan infrastruktur perdesaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPIP yang dilaksanakan pada tahun 2009 di desa mayangan telah memberi perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat mayangan. Masyarakat desa mayangan menjadi lebih mudah mendapatkan air bersih karena adanya jetpam dan pipa-pipa yang di aliri ke rumah masyarakat. Sedangkan di pembangunan lainnya yaitu pintu air yang di bangun di dusun krajan dapat mengurangi volume air yang masuk kerumah-rumah masyarakat ataupun masuk ke areal persawahan. Karena sebelum adanya PPIP, air laut masuk ke areal persawahan masyarakat sehingga tanah yang dipakai untuk ditanami padi atau sayuran lainnya menjadi tidak subur dan memiliki tingkat keadaman yang tinggi akibat pengaruh dari tergenangnya air laut ke dalam areal pertanian masyarakat mayangan.

Pembangunan pintu air atau yang di sebut sebagai pintu klep oleh masyarakat desa mayangan memang tidak menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di desa mayangan. Bangunan pintu air itu hanya bersifat mengurangi banjir yang masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat, ke dalam sekolah, tambak udang dan ke areal persawahan. Karena apabila volume air pasang dalam jumlah yang besar, pintu air tersebut juga nantinya akan dilewati dan diganangi oleh air laut atau banjir rob tersebut, tetapi jika air laut datang dalam volume yang kecil, pintu air tersebut masih bisa mengatasi untuk mencegahnya air laut atau banjir rob masuk ke sekitar masyarakat desa mayangan.

Masyarakat desa mayangan yang dulu sebelum adanya PPIP selalu akan terkena banjir rob ke dalam rumahnya. Walau air laut atau banjir rob datang dalam volume yang kecil sekalipun, masyarakat desa mayangan akan terkena dampak dari banjir rob. Tetapi setelah adanya pintu air yang dibangun dari dana PPIP, masyarakat bisa lebih tenang walaupun harus tetap waspada karena banjir

rob tidak dapat di prediksi kapan akan datang dan apakah datang dalam jumlah volume yang kecil atau besar. Tetapi setidaknya pintu air tersebut mengurangi banjir yang seringkali terjadi di desa mayangan. Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat desa mayangan Tosin mengenai perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya infrastruktur yang di bangun dari dana PPIP yaitu sebagai berikut:

*“ya jelas tadi itukan menjadi sumber bencana ya katakan lah jadi penghambat berkembangnya ekonomi ya sedikitnya tadi dengan adanya PPIP itu alhamdulillah bisa terantisipasi akhirnya perekonomian sawah juga masih bisa dipanen walaupun katakanlah tidak maksimal, kemudian tambak juga khususnya di wilayah yang di zona PPIP, kalo yang kesana lain, kesana pemanfaatnya hanya sumber air bersih, air bersihnya juga sangat berterimakasih dengan adanya sumber air bersih, kalau disini ganda. Pintu air iya, air bersih juga iya. Jadi pertanian dan tambak masih bisa terselamatkan”* (Hasil wawancara dengan Tosin, 21 Mei 2012)

Masyarakat desa mayanag yang berada di dusun krajan mengalami perubahan ganda dari adanya PPIP. Karena di dusun itu jetpam ada dan pintu air untuk menghalangi banjir rob juga terdapat di dusun krajan. Sedangkan dusun pondok bali hanya berubah dalam hal ketersediaan air bersih. Dusun pondok bali terletak di bibir pantai, sehingga tidak memungkinkan jika pintu air di bangun di dusun tersebut, dengan adanya musyawarah desa dan mengukur skala prioritas desa, akhirnya masyarakat desa mayangan memutuskan untuk membangun pintu air di dusun krajan. Seeprti yang diungkapkan oleh sekretaris desa yaitu Warnita M Noor sebagai berikut:

*“Pada saat itu kita buat rangkingan dan kita buat skala prioritas yang mana sih yang lebih tepat pada saat ini dibutuhkan untuk pebangunan oleh dana itu. Akhirnya yang di sepakati adalah pembangunan pintu air dan air bersih, karena kaitannya adalah dengan kaitan penyelamatan, penyelamatan untuk areal sawah dari bisa tertutpnya atau terbangunnya pintu air bisa diselamatkan lagi sebagian tambak milik masyarakat khususnya areal pertanian terselamtakn pada akhirnya”* (Hasil wawancara dengan Warnita M Noor, 21 Mei 2012)

Pada akhirnya dengan terbangunnya dua infrasruktur yang berasal dari dana bantuan PPIP yaitu pembangunan air bersih dengan membuat jetpam yang dialiri memakai pipa ke rumah masyarakat desa mayangan dan pembuatan pintu air untuk mengatasi permasalahan banjir rob, masyarakat desa mayangan bersyukur dan berterimakasih dari adanya PPIP karena dapat mengtasi kesulita

dan keterbatasan yang dulunya sebelum adad PPIP dialami oleh masyarakat desa mayangan. Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat desa mayangan Sukardi yaitu:

*“ya bagus sekali banyak yang ditunggu tunggu oleh masyarakat kami. Dulu tuh 2009 ya kalo gak salah. Dengan adanya pintu air itu jadi agak mengurang itu mbak banjirnya. Kalau ada air pasang agak sedeng tu gak masuk ke rumah penduduk dan ke pertanian. Jadi saya tu sangat mendukung sekali baguslah kalau ada PPIP itu dan air bersih dulu mah susah masyarakat kalo sekarang jadinya banyak air yang ngalir ke masyarakat. Di tiap-tiap dusun, di tiap-tiap RT. Dulu mah kan susah air tawar tu. Jadi dulu mah pakenya sanyo bukan pake jetpam, sekarang kan pake jetpam jadi enak airna banyak”* (Hasil wawancara dengan Sukardi, 22 Mei 2012)

Selain itu anggota masyarakat yang lainnya juga memperkuat pernyataan mengenai perubahan-perubahan positif yang terjadi di desa mayangan setelah adanya PPIP di desa ini. seperti yang dinyatakan oleh Tosin sebagai berikut:

*“ya PPIP itukan tadi yang saya bilang manfaatnya sangat banyak sekali khususnya di sektor-sektor kepentingan ya baik pendidikan kemudian sarana sosial lainnya terutama ekonomi usaha dan sebagainya, kami saja yang berada di sekolah ini kan alhamdulillah kan selain tidak langsung dengan adanya pintu itu kan air tidak langsung masuk kesini. Kan dengan adanya itu ini kan tekanan airnya juga ajdi pelan, nah gimana agar sekolahan ini tidak terendam bila air besar itu yang harus dipikirkan. Kalau dulu kan enggak, mau air sekecil apa juga masuk aja ke sekolah ya, jadi siswa disini sering belajar di dalam kelas ada air yang tergenang di dalamnya. Desa pun sama, karena sering banjir juga masuk ke kantor desa juga. Sekarang ini sudah ada upayalah ya. Kalau kecil tidak masuk, tapi kalau besar aja airnya pasti lewat”* (Hasil wawancara dengan Tosin, 21 Mei 2012)

Perubahan-perubahan yang terjadi di desa mayangan setelah infrastruktur terbangun dirasakan oleh semua masyarakat desa mayangan, walaupun banjir juga masih menggenangi desa mayangan jikalau air pasanganya dalam jumlah yang besar. Tetapi masyarakat desa mayangan merasa terbantu dengan adanya pintu air karena jika air pasanganya tidak begitu besar tidak akan masuk ke dalam rumah masyarakat ataupun ke area persawahan milik masyarakat desa mayangan. Selain rumah-rumah masyarakat, kantor desa dan sekolah yang berada di dusun krajanpun juga merasa terbantu dengan adanya pintu air. Sedangkan air bersih, masyarakat jadi lebih mudah untuk mendapatkan dan tidak perlu lagi minta ke

tetangga sekitarnya karena air bersih sudah di aliri dengan pipa ke rumah-rumah masyarakat desa mayangan.

### 5.1.3.2 Intervensi selama pelaksanaan PPIP

Pelaksanaan PPIP dapat saja dipengaruhi oleh kebijakan lainnya atau tingkatan pemerintah lain dan dengan adanya hal tersebut memungkinkan timbulnya benturan-benturan kepentingan antar lembaga yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya intervensi dari kebijakan atau tingkatan pemerintah lainnya itu mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan PPIP di tingkatan manapun. Sehingga dibawah ini akan dibahas mengenai intervensi-intervensi yang ada dalam pelaksanaan PPIP. Dalam hal intervensi Plt. Kepala satker PPIP pusat Posma HS Simanjuntak mengatakan sebagai berikut:

*“Kalau sebelumnya itu di 2005 di 2006 sampai 2008 penentuan nama desa itu prerogatifnya Kementerian PU, nah sejak 2009 itu sejak MK memutuskan suara terbanyak yang masuk kesenayan nah itu mulailah ada intervensi dalam hal pemilihan nama desa”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Seperti yang dikatakan oleh Posma HS Simanjuntak di atas, bahwa intervensi kebijakan mengenai pemilihan desa memang ada, berarti adanya intervensi tersebut dapat dikatakan sebagai intervensi dari kebijakan lainnya. Adanya intervensi dari kebijakan lain terhadap pelaksanaan PPIP dapat juga memberi implikasi terhadap berjalannya program ini. Bagaimana dengan intervensi dari tingkatan pemerintah lainnya, seperti contohnya pemerintah pusat yang langsung mengatasi permasalahan di kabupaten tanpa melewati pihak provinsi terlebih dahulu. PPIP ini adalah program yang dilaksanakan secara berjenjang. Maksud berjenjang disini ialah, masing-masing tingkatan pemerintah memiliki tugasnya dan alur yang berbeda, sehingga pusat, provinsi, kabupaten dan pemerintrah desa merupakan tingkatan dari organisasi yang ada di PPIP. Seperti yang dikatakan oleh PPK satker provinsi Suparno Prawitorejo yaitu:

*“kita kan selalu koordinasi ya. Kita selalu mengadakan rapat koordinasi dengan kabupaten, kalau perlu jika kita ada kendala kita konsultasi dengan pusat. Jadi alhamdulillah semua saling membantu. Pusat kalau ada apa-apa juga menyampaikan”* (Hasil wawancara dengan Suparno Prawitorejo, 23 Mei 2012)



Koordinasi yang dilakukan oleh pusat dengan provinsi, lalu provinsi dengan kabupaten, dan kabupaten dengan kecamatan dan desa maka intervensi di tingkat pemerintahan jarang sekali terjadi, pada desa mayangan intervensi dari tingkatan pemerintah tidak terjadi sehingga koordinasi yang dilakukan antar tingkat pemerintahan dilaksanakan dengan baik.

Adanya intervensi dari kebijakan pemerintah lainnya mempengaruhi dalam pelaksanaan PPIP dari mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Posma HS Simanjuntak mengenai adanya intervensi dari DPR mengenai usulan desa penerima PPIP yang sebelumnya di putuskan oleh kementerian PU dengan melihat data dari BPS mengenai desa miskin, tetapi dengan adanya intervensi dari DPR memberikan implikasi pada program ini sendiri yaitu seperti yang dikatakan oleh Plt. Kepala satker PPIP Pusat Posma HS Simanjuntak yaitu :

*“sehingga ini dampaknya dari segi program atau idealisme programlah ya kita tidak bisa lagi strik kepada batasan KK miskin tadi. Kemudian dalam hal penganggaran karena mereka kadang usulan namanya terlambat sehingga kita tidak bisa menyiapkan program untuk tahun berikutnya secara awal nah karena itu ditempuh mekanisme penganggaran yang lain dan ini dampaknya cukup anu ya jadi sering terlambat pelaksanaan di daerah karena uangnya belum ada”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Terlambatnya nama usulan desa yang diberikan oleh DPR, mengakibatkan mundurnya pemberian anggaran kepada desa-desa sasaran, sehingga pembangunan atau pekerjaan yang dilakukan menjadi terburu-buru dan kualitas dari pemberdayaannya akan menjadi kurang baik. Dalam studi kasus disini yaitu desa mayangan tidak mengalami kejadian seperti itu. Beberapa implikasi negatif dari adanya intervensi kebijakan lain yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dengan adanya intervensi kebijakan lain terdapat pula implikasi positifnya, yaitu seperti jumlah desa sasaran menjadi lebih banyak, hal ini dikatakan oleh Plt. Kepala satker PPIP pusat yaitu:

*“Sisi positifnya memang dengan adanya intervensi legislatif tadi jumlah desa yang ditangani pertahunnya itu menambah meningkat, kalo biasanya PU itu hanya sanggup 2000 mungkin dengan itu ditambahkan menjadi*

*3000 atau 4000 tahun ini kita ada 5000 setiap tahun meningkat” (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)*

Dengan meningkatkannya jumlah desa yang ditangani PPIP, merupakan peluang bagi desa-desa lain untuk mendapatkan dana bantuan PPIP. Memang masih banyak desa yang memerlukan dana bantuan dari pemerintah. Sehingga tidak hanya sisi negatifnya saja yang timbul karena adanya intervensi dari kebijakan lainnya, tetapi juga ada sisi positif yang timbul dengan adanya intervensi tersebut.

### **5.1.3.3 Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PPIP, terutama kesiapan sumber daya manusia di perdesaan yang nantinya akan menjalani atau melaksanakan perencanaan, pembangunan sampai pemeliharaan infrastruktur yang dibangun dari dana bantuan PPIP. Terkait dengan hal kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan PPIP, masyarakat desa pada umumnya siap dalam melaksanakan pembangunan dan siap melaksanakan PPIP, hal ini karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya dana PPIP, dan masyarakat bersyukur sehingga masyarakat desa merasa bertanggung jawab untuk kemajuan desanya dan demi kepentingan desa yang nantinya akan dirasakan, dinikmati dan daimanfaatkan oleh seluruh anggota masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat desapun menjadi lebih tertantang dengan adanya program pemberdayaan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber di bawah ini yang pertama yang dikatakan oleh PPK satker PPIP provinsi Suparno prawitorejo yaitu:

*“desa-desa siap semuanya ya, bahkan mereka menunggu-nunggu tahun berikutnya mana lagi jadi seperti tantangan gitu bagi mereka” (Hasil wawancara dengan Suparno Prawitorejo, 23 Mei 2012)*

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari masyarakat desa mayangan yaitu Wawan Djuanda sebagai berikut:

*“masyarakat disini siap untuk melaksanakan PPIP, mulai dari perencanaannya, tahap pelaksanaan pembangunanpun disini berjalan dengan baik walau ada permasalahan atau hambatan-hambatan yang*

*terjadi sih ya, tetapi toh kita dapat menyelesaikannya”* (Hasil wawancara dengan Wawan Djuanda, 22 Mei 2012)

Hal serupa juga dikemukakan oleh anggota masyarakat desa mayangan lainnya yaitu Eti sebagai berikut:

*“iya siap ya neng, kita apapun untuk bisa desa ini jadi lebih baik harus siap bangun sama-sama disini. Waktu itu juga kerjanya semua dari masyarakatnya disini, dan gak ada masalah dengan sumber daya manusianya. Berarti kan siap ya sumber daya manusianya”* (Hasil wawancara dengan Eti, 22 Mei 2012)

Antusiasme masyarakat desa mayangan dalam menerima dan melaksanakan PPIP untuk membangun desanya menjadi lebih baik lagi dan untuk mengatasi permasalahan yang ada di desanya dapat dilihat bahwa masyarakat menerima PPIP dengan baik tanpa ada penolakan terkait dengan program yang akan dilaksanakan di desa mayangan, adapun pihak-pihak yang menolak itu karena kekhawatiran sebagian masyarakat akan air bersih yang nantinya jika jetpam sudah berfungsi akan mengganggu masyarakat yang sudah menggunakan sanyo, tetapi hal tersebut dapat diatasi dan di beri arahan kepada sebagian masyarakat yang khawatir hal tersebut akan terjadi. Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat desa mayangan yaitu Edi Watma sebagai berikut:

*“alhamdulillah pada saat pelaksanaan itu kan di rapatkan di desa ya. Masyarakat ya sangat antusias sekali, memang ya beberapa di antaranya ada yang penolakan sedikit yang sebelah sana. karena waktu itu kan pake sanyo gitu, katanya akalo nanti pake jetpam istilahnya sanyonya bisa mati. Itu aja sih, tapi setelah jetpam berjalan tidak ada masalah sih”* (Hasil wawancara dengan Edi Watma, 22 Mei 2012)

Kesiapan sumber daya manusia di desa mayangan dalam menerima PPIP dapat pula dilihat dari hambatan-hambatan yang ada ketika proses pembangunan infrastruktur. Hambatan-hambatan yang ada tidak mematahkan semangat dan usaha masyarakat desa mayangan untuk terus melakukan pembangunan dengan mencari solusi-solusi untuk mengatasi hambatan yang ada pada saat proses pembangunan. Hambatan dalam pembangunan jetpam untuk memiliki air bersih misalnya, untuk mencari titik yang akan digali agar mendapatkan air bersih dibutuhkan berkali-kali untuk penggalian dan pindah titik untuk mendapatkan titik yang layak mendapatkan air bersih.

Hambatan lainnya juga terjadi pada saat pembangunan pintu air. Bahkan hambatan dalam proses pembangunan pintu air cukup memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jebolnya tanggul penahan sementara untuk menahan air laut yang masuk ke area pembangunan pintu air terjadi sampai dua kali. Secara garis besar bahwa hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan infrastruktur di desa mayangan adalah hambatan teknis. Tetapi dengan adanya hambatan tersebut, masyarakat desa mayangan tidak menyerah dan terus berusaha mencari solusi agar pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan dan berhasil dilakukan dan nantinya dapat dimanfaatkan. Dengan itu sumber daya manusia di desa mayangan siap untuk melaksanakan kegiatan PPIP. Mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PPIP di desa mayangan dinyatakan oleh sekretaris desa mayangan Warnita M Noor yaitu sebagai berikut:

*“hambatannya paling mencari titik air mana yang bisa dikonsumsi dengan masyarakat. Karena kita kan gak tau pada saat menggali apakah kita akan mendapatkan sumber air yang bisa dipakai oleh masyarakat atau tidak. Ada kalanya kan karena kita berkaitan dengan air asin, hampir sekeliling kita ini di kelilingi oleh air asin maka rembesan-rembesan ini juga ada semacam-sembacam ini jadi juga mendapatkan titik-titik air asin, maka pindah lagi pindah lagi. Ada hambatan yang memang air juga cukup lumayan besar ya jadi kisdam yang waktu itu kita buat itu selalu jebol pada saat itu maka anggaran juga banyak tersedot dan terbuang pada saat itu dalam pembuatan kisdam”* (Hasil wawancara dengan Warnita M Noor, 21 Mei 2012)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dilontarkan oleh anggota masyarakat desa mayangan yaitu Eti sebagai berikut:

*“ya kayak tadi yang ibu bilang hambatan dalam buat pintu air itu susahny kalau air lagi pasang, sampe kita 3 kali buat tanggul penahan dan 2 kali itu jebol tanggulnya”* (Hasil wawancara dengan Eti, 22 Mei 2012)

Hambatan yang terjadi di desa mayangan lebih disebabkan oleh alam dan diluar kuasa manusia. Dan sumber daya manusianya pun di tuntut mampu untuk mengatasi hambatan yang berasal dari alam dan lebih bersifat pada hambatan secara teknis. Tidak ada hambatan yang terjadi dalam hal sumber daya manusia, justru sebaliknya sumber daya manusia di desa mayangan siap dalam menerima, melaksanakan dan mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan PPIP. Seperti

yag dikatakan oleh anggota masyarakat desa mayangan yaitu Tosin sebagai berikut:

*“ya tadi itu hambatannya alam gitu kadang cuaca itu aja. Alhamdulillah bukan hambatan dari SDM. Jadi kondisi dan situasi hambatannya ya karena alam”* (Hasil wawancara dengan Tosin, 21 Mei 2012)

#### **5.1.4 Ketepatan Lingkungan**

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pada lingkungan internal yaitu apabila terjadi koordinasi yang baik antara lembaga terkait satu sama lainnya akan menunjang keefektifan pelaksanaan PPIP, begitu pula dengan lingkungan eksternal yang dalam konteks ini ialah masyarakat. Masyarakat yang menerima PPIP dan melaksanakan ataupun memiliki tanggapan positif terhadap program tersebut maka akan mempengaruhi dalam proses pelaksanaan PPIP di suatu desa. Apabila tanggapan publik terhadap PPIP tidak baik, maka dalam pelaksanaannya menjadi kurang baik pula.

Ketepatan lingkungan akan mempengaruhi keefektifan pelaksanaan PPIP di desa mayangan, sehingga dibawah ini akan di bahas dari mulai lingkungan internal terlebih dahulu yang melibatkan pihak pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Sedangkan pihak eksternal akan dilihat dari tanggapan publik atau masyarakat mengenai PPIP.

##### **5.1.4.1 Lingkungan internal kebijakan**

Lingkungan internal kebijakan akan mempengaruhi pelaksanaan PPIP di masing-masing tingkatan pemerintah, dari mulai tingkat yang paling tinggi yaitu pihak pusat sampai ke pihak yang paling rendah yaitu kecamatan dan desa. Koordinasi yang dilakukan antara tingkatan pemerintah yang dilakukan dalam program ini ialah berjenjang. Seperti yang diungkapkan oleh Plt. Kepala satker PPIP pusat Posma HS Simanjuntak yaitu sebagai berikut:

*“koordinasi sama seperti tadi ya kita berjenjang. Pusat itu hanya tau berurusan dengan provinsi, lalu provinsi yang harus meneruskan kebijakan ke kabupaten, kabupaten yang harus meneruskan kebijakan itu ke kecamatan dan desa. Jadi kalau ada masalah di desa kita minta camatnya dulu yang selesaikan, camat gak sanggup minta kabupaten,*

*kabupaten gak sanggup minta ke provinsi, provinsi gak sanggup minta ke pusat. Kalo pusat gak mungkin gak sanggup karena dia yang punya uang kan dia yang menentukan desanya”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Koordinasi yang dilakukan secara berjenjang ini merupakan interaksi yang memiliki alur, seperti yang dikatakan oleh Posma HS Simanjuntak, pusat akan melakukan interaksi langsung dan berkoordinasi dengan provinsi, dan selanjutnya provinsi yang akan berinteraksi langsung dengan kabupaten dan seterusnya. Dengan adanya koordinasi yang seperti itu, maka sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan PPIP juga dilakukan secara berjenjang. Seperti yang disampaikan oleh Suparno Prawitorejoko PPK satker PPIP provinsi yaitu:

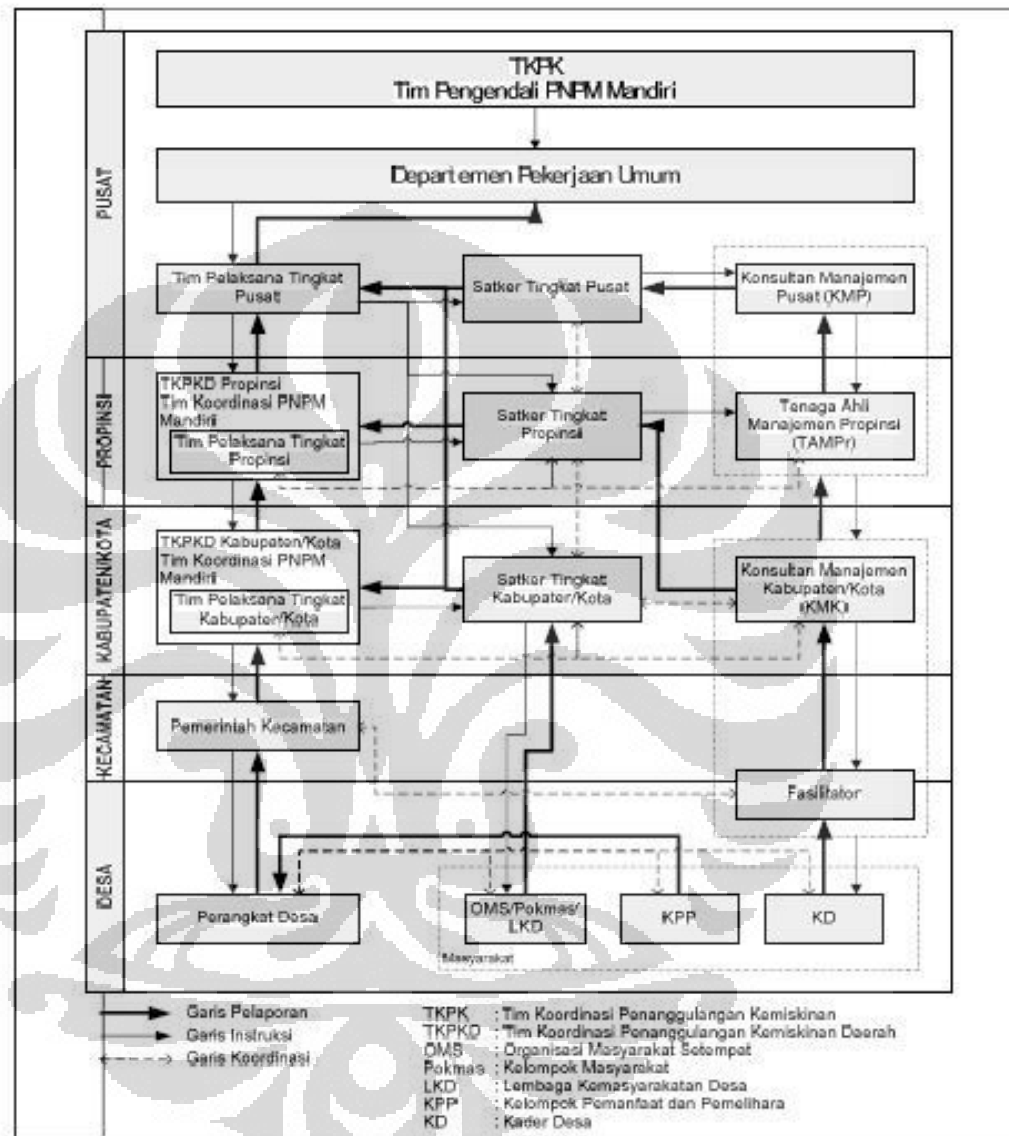
*“nah ini PPIP lini bekerja, ada namanya masyarakat, ada namanya kepala desa, sampai pusat ada konsultan ada fasilitator dan propinsi semua terlibat. Keterlibatan itu terutama untuk propinsi karena data desanya itu merupakan kebutuhan dari pusat misalnya desanya A nah kalo sudah desanya A ini kita melaksanakan sosialisai di tingkat desanya dulu, memeberikan semacam informasi bahwa di Indonesia ini akan diadakan kegiatan PPIP di setiap propinsi. Itu dari semua propinsi berkumpul. Namanaya sosialisai tingkat nasional, misalkan jawa barat dapat sekian desa, subang dapat sekian desa, misalnya desa apa saja dan muncul sk dari meneteri PU, sk desa sasaran PPIP. Setelah itu ya kita koordinasi melaksanakan sosialisasi propinsi kita undang kabupaten”* (Hasil wawancara dengan Suparno Prawitorejoko, 23 Mei 2012)

Selain itu interaksi antar lembaga terkait disini juga dalam hal pengawasan, pada masing-masing tingkatan pemerintah sampai pada tingkatan terendah yaitu desa memiliki pengawas yang bertugas melaporkan perkembangan yang terjadi di desa yang nantinya juga akan sampai laporannya sampai ke tingkat pusat. Seperti di katakan oleh PPK satker PPIP provinsi yaitu:

*“pengawasan kita selalu mengadakan monitoring ya. Baik ke tim kabupaten dan dengan semua yang terlibat ya, baik juga dengan konsultan atau fasilitator, atau sekali-kali ke lapangan ke desanya bagaiman perkembangan atau pertanggungjawaban dari 250 juta itu, dan melihat fisiknya di lapangan Nanti kalau propinsi gak bisa kabupaten yang terjun langsung dan ketika ada rapat koordinasi nanti kabupaten akan melaporkan ada apa”* (Hasil wawancara dengan Suparno Prawitorejoko, 23 Mei 2012)

Hal ini diperkuat pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala satker PPIP kabupaten Musril Jaya yaitu:

“nah kalau itu kita ada FM yah fasilitator masyarakat. Fasilitator itu kan ada tingkat kabupaten ada tingkat provinsi. Itu kita dibantu oleh mereka. kalau kita monitoring aja dari pelaporan, kalau ada kendala baru kita berangkat kesana” (Hasil wawancara dengan Musril Jaya, 21 Mei 2012)



**Gambar 5.6: Jenjang koordinasi**

Sumber: Buku Pedoman PPIP

Koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan PPIP dilakukan secara berjenjang, sehingga interaksi antara lembaga terkait terlaksana secara teratur dan baik. Sehingga tidak ada terjadi tumpang tindih antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. interaksi secara baik yang

terjadi pada proses pelaksanaan PPIP akan memberikan implikasi pada keefektifan program tersebut dari tingkat pusat sampai ke tingkat perdesaan. Seperti yang disampaikan oleh Plt. Kepala satker PPIP pusat Posma HS Simanjuntak yaitu:

*“pengawasan juga berjenjang. Makanya dipusat ada konsultan manajemen pusat yang mendampingi kita, di provinsi ada satker provinsi, tim pelaksana provinsi dan ada konsultan provinsinya juga, di kabupaten ada konsultan kabupatennya. Nah konsultan kabupaten ini istilahnya KMK ya ini pengadaannya di provinsi sengaja agar tim kabupaten tidak bisa kongkalikong dengan dia. Jadi provinsi yang mengadakan. Dan limit terakhir ini ya fasilitator masyarakat, jadi ada 2 fasilitator yang pertama fasilitator pemberdayaan yang kedua fasilitator teknik. Merekalah pengawasan terakhir kita dari mereka yang laporan ke kita, desa membangun apa, swadayanya bagaimana, itu yang melapor ke kabupaten KMK tadi, KMK melapor ke provinsi, provinsi melapor ke pusat. Dan ujung tombaknya pada fasilitator masyarakat”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Interaksi dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait akan meminimalisir hal-hal menyimpang atau yang tidak sesuai dengan pedoman PPIP. Maka itu perlunya semua tingkatan pemerintah dalam pelaksanaan PPIP melakukan koordinasi dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling membantu dalam pelaksanaan PPIP khususnya di tingkat perdesaan.

#### **5.1.4.2 Lingkungan eksternal kebijakan**

Lingkungan eksternal yang akan dibahas yaitu tertuju pada masyarakat, karena PPIP adalah program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat disini akan menjadi aktor yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan PPIP, masyarakat yang memiliki tanggapan baik terhadap program ini maka akan mengerjakan dan menjalankannya dengan baik dan tanggung jawab karena masyarakat itu mengerti akan tujuan dari PPIP, sedangkan masyarakat yang memiliki tanggapan negatif terhadap PPIP akan cenderung lebih kurang peduli terhadap pelaksanaan program PPIP di desanya. Sehingga masyarakat yang disini termasuk dalam lingkungan eksternal kebijakan juga ikut mempengaruhi terhadap keefektifan PPIP yang berlangsung. Tanggapan publik terhadap PPIP disini awalnya akan dibahas melalui pernyataan yang di lontarkan dari pihak pembuat kebijakan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pihak pusat mengetahui



tanggapan publik dari adanya PPIP. Pernyataan ini disampaikan oleh Plt. Kepala satker PPIP pusat Posma HS Simanjuntak yaitu:

*“tanggapan publik relatif baik, yang kita dengar baik walaupun memang ada juga yang kritisi dari mereka ya itu wajar. Tanggapan positifnya itu terutama dalam hal sederhana, jadi PPIP ini relatif sederhana dibanding PNPM yang lain yang banyak rapatnya, kalau PPIP kan Cuma 3 kali musyawarah desa uang langsung cair mereka bisa kerja dalam 1 tahun selesai, kalau program lain itu 1 tahun isinya cuman rapat, jadi katanya PPIP lebih sederhana. Kemudian karena langsung kemasyarakatnya dan mereka yang langsung kelola uangnya jadi mereka merasa dihargai”* (Hasil wawancara dengan Posma HS Simanjuntak, 15 Mei 2012)

Hal mengenai tanggapan publik yang positif juga diperkuat oleh pernyataan dari PPK saker PPIP provinsi Suparno Prawitorejito yaitu:

*“...ehhhm tanggapan publik sebenarnya masyarakat itu sangat merespon dan antusias ya. Nah dari PPIP ini sentuhannya yang diharapkan oleh kementerian PU adalah memberikan infrastruktur buat mereka, tujuannya adalah apa yang komoditas andalan mereka bisa terrealisasikan demi perkembangan ekonomi mereka. Yang diharapkan seperti itu, mereka tanggapannya sangat antusias”* (Hasil wawancara dengan Suparno Prawitorejito, 23 Mei 2012)

Dari pernyataan kedua arasumber diatas mengenai tanggapan publik terhadap PPIP menyatakan bahwa publik antusias dan merespon secara positif. Masyarakat desa merasa dihargai karena dipercaya untuk mengelola urusan desanya termasuk dalam hal pengelolaan dana juga langsung masyarakat yang turun tangan. Lalu dibawah ini akan di perkuat lagi engan pernyataan yang dinyatakan langsung oelh masyarakat desa mayangan mengenai tanggapan masyarakat desa mayangan terhadap PPIP, seperti yang disampaikan oleh Tosin yaitu:

*“jadi masyarakat mayangan juga antusias menyambutnya. Karena pada saat itu membutuhkan sekali katakanlah sumber dana dari manapun asalnya yang penting masyarakat mayangan itu sangat membutuhkan bantuan terutama dari pemerintah. Secara kebetulan ada PPIP yang kalau gak salah dulu itu melalui pak edi ya calon anggota dewan kebetulan kemudian dapil wilayah subang. Pada waktu itu kunjungan dengan adanya kesempatan semacam itu kami mengajukan bantuan kepada dewan”* (Hasil wawancara dengan Tosin, 21 Mei 2012)

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat desa mayangan lainnya yaitu Sukardi sebagai berikut:

*“ya bagus sekali banyak yang ditunggu tunggu oleh masyarakat kami. Dulu tuh 2009 ya kalo gak salah. Dengan adanya pintu air itu jadi agak mengurang itu mbak banjirnya. Kalau ada air pasng agak sedeng tu gak masuk ke rumah penduduk dan ke pertanian. Jadi saya tu sangat mendukung sekali baguslah kalau ada PPIP itu dan air bersih dulu mah susah masyarakat kalo sekarang jadinya banyak air yang ngalir ke masyarakat. Di tiap-tiap dusun, di tiap-tiap RT. Dulu mah kan susah air tawar tu. Jadi dulu mah pakenya sanyo bukan pake jetpam, sekarang kan pake jetpam jadi enak airna banyak”* (Hasil wawancara dengan Sukardi, 22 Mei 2012)

Masyarakat desa mayangan mempunyai anggapan yang positif terhadap hadirnya PPIP di desanya. Masyarakat desa mayangan yang antusias terhadap adanya PPIP di desanya ini berimplikasi pada pelaksanaan PPIP di desa mayangan yang walaupun memiliki hambatan dalam pelaksanaan tetapi PPIP di desa Mayangan tetap bisa terselesaikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Mayangan. Sehingga adanya pengaruh antara tanggapan publik yang positif akan sebuah program maka dalam melaksanakan program tersebut masyarakat akan merasa lebih bertanggung jawab dan akan lebih siap dalam menangani atau mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada saat pelaksanaan PPIP.

## **5.2 Outcomes**

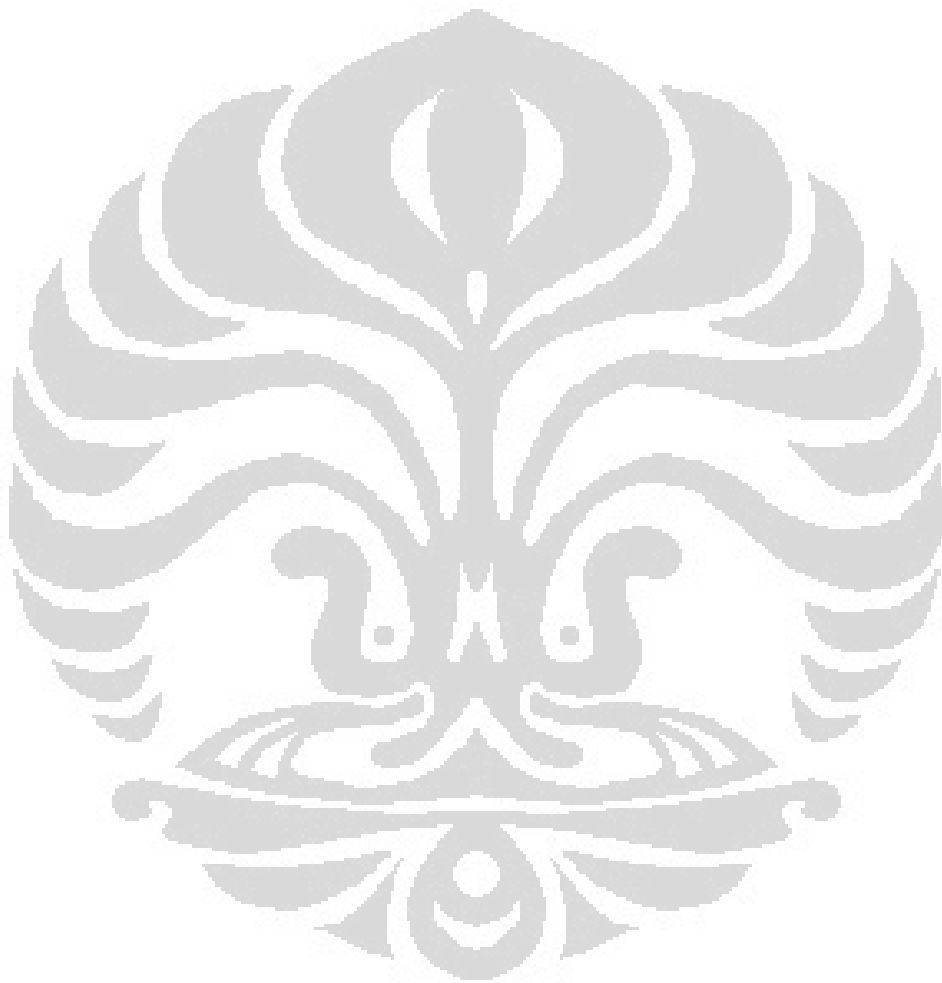
Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari *outcomes* yang terlihat dilapangan. *Outcomes* yang dihasilkan dari pelaksanaan atau implementasi PPIP di desa mayangan yaitu teratasinya permasalahan di desa mayangan. Permasalahan yang ada di desa mayangan yaitu *banjir rob* yang menggenangi rumah masyarakat, persawahan serta tambak udang milik masyarakat desa mayangan. Selain permasalahan banjir rob, masyarakat desa mayangan juga dihadapkan pada permasalahan kesulitan mendapatkan air bersih. Kedua permasalahan yang menjadi prioritas masyarakat desa mayangan untuk segera diatasi ialah banjir rob dan air bersih, sehingga masyarakat desa mayangan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hadirnya PPIP di desa mayangan untuk membantu mengatasi permasalahan infrastruktur yang ada di desa tersebut yaitu dengan membangun pintu air untuk mengatasi banjir rob yang masuk ke dalam rumah masyarakat, persawahn atau tambak udang, dan dengan memabngun jetpam untuk memudahkan masyarakat desa mayangan mendapatkan air bersih. *Outcomes* dari adanya PPIP di desa mayangan yang membangun dua infrastruktur yaitu pintu air dan jetpam adalah berkurangnya jumlah air yang masuk ke dalam rumah masyarakat, persawahan, ataupun tambak udang. Permasalahan banji rob tidak terselasaikan dengan adanya pintu air yang dibangun, tetapi pintu air tersebut membantu mengurangi jumlah air yang masuk. Karena apabila air laut pasang dalam jumlah yang besar, pintu air yang dibangun itu tidak dapat menyelamatkan masyarakt desa mayangan dari ancaman banjir yang akan masuk ke dalam rumah masyarakat desa, persawahan ataupun tambak udang. Namun jika air laut pasang tidak besar atau kecil maka pintu air masih dapat menyelamatkan masyarakat desa mayangan dari ancaman banjir rob. Dahulu sebelum adanya pintu air yang dibangun, besar atau kecilnya air laut yang pasang pastinya akan menggenangi rumah masyarakat desa mayangan, persawahan ataupun tambak udang. Tetapi dengan adanya pintu air yang terbangun sekarang desa mayangan hanya terancam apabila air laut pasang dalam jumlah yang besar.

Lalu mengenai air bersih, dahulu masyarakat desa mayangan kesulitan mendapatkan air bersih, karena hanya beberapa anggota masyarakat saja yang memakai pompa sanyo, dan masyarakat lainnya yang tidak memiliki sanyo hanya bisa meminta kepada masyarakat yang memiliki. Tetapi dengan adanya jetpam yang dibangun dari dana PPIP semua masyarakat desa mayangan sekarang tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih, karena jetpam yang ada di desa mayangan disebar dalam lima titik dan air dari jetpam tersebut langsung dialiri ke rumah-rumah masyarakat desa mayangan menggunakan pipa.

Masyarakat desa Mayangan merasa manfaat dari adanya pembangunan yang bersumber dari PPIP, dan membantu masyarakat dalam menangani masalah banjir yang memang diakibatkan karena benana alam yang kerap terjadi di desa Mayangan. Lalu adanya jetpam juga membantu masyarakat desa mendapatkan air

bersih menjadi lebih mudah dan banyak air yang mengalir bahkan langsung ke rumah- rumah warga masyarakat. Sehingga masyarakat desa Mayangan sangat bersyukur dengan adanya PPIP di desanya.



## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PPIP di desa mayangan dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan kebijakan pemerintah yang dinilai dirumuskan sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga dapat memecahkan permasalahan dan lembaga pembuat kebijakan yang disini ialah Kementerian PU memiliki wewenang dengan karakter kebijakan yaitu mengengai penanganan infrastruktur. Masyarakat desa mayangan sangat meraskan manfaat atas hadirnya PPIP di desanya, dan perubahan-perubahan yang terjadi di desa mayangan setelah adanya PPIP juga dapat dilihat dari berkurangnya banjir yang ada di sana, teratasinya permasalahan kesulitan air bersih di desa mayangan, dan kesiapan sumber daya manusia yang sudah siap menerima dan melaksanakan PPIP dengan membuktikan masyarakat desa mayangan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada proses pembangunan. Selanjutnya, lingkungan internal (lembaga terkait) dan lingkungan eksternal (masyarakat) memiliki tanggapan yang baik mengenai PPIP sehingga dalam pelaksanaannya di desa mayangan dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan PPIP. Namun masih ada kekurangan dalam pelaksanaan PPIP di desa mayangan yaitu lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap fasilitator masyarakat.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) di desa mayangan kabupaten subang jawa barat, ada beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Peran FM atau konsultan bukan hanya sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di desa saja, melainkan juga sebagai pengawas secara langsung yang berada di desa. Dengan hal itu maka seharusnya FM

sebaiknya tinggal di desa agar apabila terjadi sesuatu pada proses pelaksanaan, bisa cepat teratasi oleh FM atau konsultan.

2. Pemilihan FM secara selektif dan obyektif agar masyarakat desa pada saat proses pengerjaan tidak merasa terhambat dengan adanya FM yang kurang tepat.
3. Dalam hal pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, dinilai masih kurang. Sehingga dibutuhkan peranan pihak kecamatan atau kabupaten dalam mengontrol secara berkala agar pemeliharaan infrastruktur dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adisasmita, Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Arsyad, Lincolin dkk, *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.
- Bryant, Coralie dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, oleh Rusyanto L. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Departemen Penerangan RI, *Pembangunan Desa Dalam Pelita Ketiga*, 1980
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Howlett, M., & Ramesh, M. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (2<sup>nd</sup> ed.). Toronto: Oxford University Press, 2003.
- Marbun, B.N, *Proses Pembangunan Desa*, Jakarta: Erlangga, 1988.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Neuman, Lawrence W, "*Social Research Method*", fifth ed., US of America : Pearson Education, 2003.
- Nugroho, Riant, *public policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Oentarto. Suwandi, I Made. Riyadmadji, Dodi, Jakarta: Samitra Media Utama, 2004.
- Prasojo, Maksum, dan Kurniawan, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Depok: DIA FISIP UI, 2006.
- Riyadi dan Baratakusumah, Deddy Supriadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Steers, M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, Bandung : Erlangga, 1985.
- Suryadi, Kadarsah, *Sistim Pendukung Keputusan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tjokroamidjodjo, Bintoro, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996.

Wibawa, Samodra, *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*, Jakarta: PT. Buku Seru, 2012.

**Sumber Lainnya:**

“kemiskinan-01jul10.pdf”, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 04 Juli 2011.

“Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum”, [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id), 07 Juli 2011

“Strategi penanganan bencana di legonkulon”, [www.tintahijau.com/kolom/56-opini/1287](http://www.tintahijau.com/kolom/56-opini/1287), diunduh pada tgl 29 Februari 2012



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nakinda Novrasagelin

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 18 November 1989

Alamat : Bintara 10 No 69 Bekasi Barat

Surat Elektronik : [nakinda\\_novrasagelin@yahoo.com](mailto:nakinda_novrasagelin@yahoo.com)

Nama Orangtua Ayah : Afkar Wahid  
Ibu : Dra. Sintha Lestari

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : Al-Azhar 6 Jakapermai Bekasi Barat

SMP : SLTPI Al-Azhar 6 Jakapermai Bekasi Barat

SMA : SMAN 91 Jakarta

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

- Kebijakan Pemerintah yang melatarbelakangi terbentuknya PPIP
- Pihak yang ikut formulasi
- Pihak yang ikut implementasi
- Kebijakan dan pemecahan masalah
- Pertimbangan dalam menetapkan kebijakan
- Pembuat kebijakan memiliki wewenang dengan permasalahan
- Apa tujuan PPIP
- Anggaran
- Faktor-faktor yang mempengaruhi
- Koordinasi
- Cara megoptimalkan
- Perbedaan sebelum dan sesudah program berjalan
- Sejauh mana tingkat keberhasilan
- Pengawasan

### 2. Kepala Satker PPIP Pusat

- Latar belakang PPIP
- Apa tujuan PPIP
- Siapa saja aktornya
- Intervensi dari kabijakan lain
- Intervensi dari tingkatan pemerintah lain
- Keterkaitan pihak swasta
- Anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan hasil
- Tanggapan publik dengan adanya PPIP
- Siapa kelompok sasaran
- Koordinasi dengan provinsi atau desa penerima PPIP
- Bagaimana pengawasan yang dilakukan
- Bagaimana tingkat keberhasilan PPIP

### **3. Kepala Satker PPIP Provinsi dan Kabupaten Jawa Barat**

- Tanggapan publik dengan adanya PPIP
- Apa tujuan PPIP
- Bagaimana koordinasi dengan pusat
- Bagaimana koordinasi dengan kabupaten atau desa penerima PPIP
- Siapa sasaran PPIP
- Apa manfaat PPIP
- Bagaimana dampak PPIP
- Perubahan apa yang terjadi setelah adanya PPIP
- Adakah intervensi dari tingkatan pemerintah lainnya
- Bagaimana pengawasan yang dilakukan
- Bagaimana kesiapan sumber daya manusia dalam menerima PPIP

### **4. Anggota Masyarakat**

- Tanggapan mengenai PPIP
- Apa masyarakat merasakan manfaat PPIP
- Bagaimana keadaan desa sebelum PPIP
- Bagaimana keadaan desa sesudah PPIP
- Sumber daya manusia dalam menerima PPIP
- Apa infrastruktur terbangun sudah cukup
- Kesesuaian anggaran dengan infrastruktur yang terbangun
- Bagaimana keterbukaan masalah dana
- Berapa lama infrastruktur dibangun
- Apa sesuai dengan harapan
- Apa saja hambatan yang ada

### **5. Tokoh adat atau tokoh masyarakat**

- Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai PPIP
- Apakah ada masyarakat yang menolak PPIP
- Apakah ada permasalahan yang muncul saat berlangsungnya PPIP
- Bagaimana koordinasi antar masyarakat
- Apakah masyarakat merasa terbantu dengan PPIP
- Banyak tidak kaum perempuan yang terlibat dalam PPIP di desa ini

## **6. Kepala Desa dan staff desa**

- Bagaimana awalnya desa ini mendapatkan dana PPIP
- Siapa saja yang ikut dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
- Berapa lama targetnya pembangunan infrastruktur dilakukan
- Apakah target tercapai
- Masalah apa yang ada ketika proses perencanaan PPIP
- Masalah apa yang ada ketika proses pembangunan PPIP
- Bagaimana solusi yang diambil
- Bagaimana ketransparanan dana kepada masyarakat

## **7. Camat dan staff kecamatan**

- Apakah masyarakat mengetahui apa itu PPIP
- Apakah masyarakat mengerti maksud dan tujuan PPIP
- Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait tentang pelaksanaan PPIP
- Kapan saja pengawasan dilakukan
- Siapa saja aktor yang turun pada saat pengawasan
- Apakah ada kesulitan dalam melaksanakan PPIP
- Apakah masyarakat desa menjadi lebih berkembang dengan adanya PPIP
- Apa saja hambatan yang ada selama proses PPIP berlangsung

# PETA DESA MAYANGAN

Kantor Desa Mayangan

Kantor Desa Mayangan

3 2 1 3 2 1 0 0 0 3

## PETA DESA MAYANGAN

Skala : 1 : 1.500.

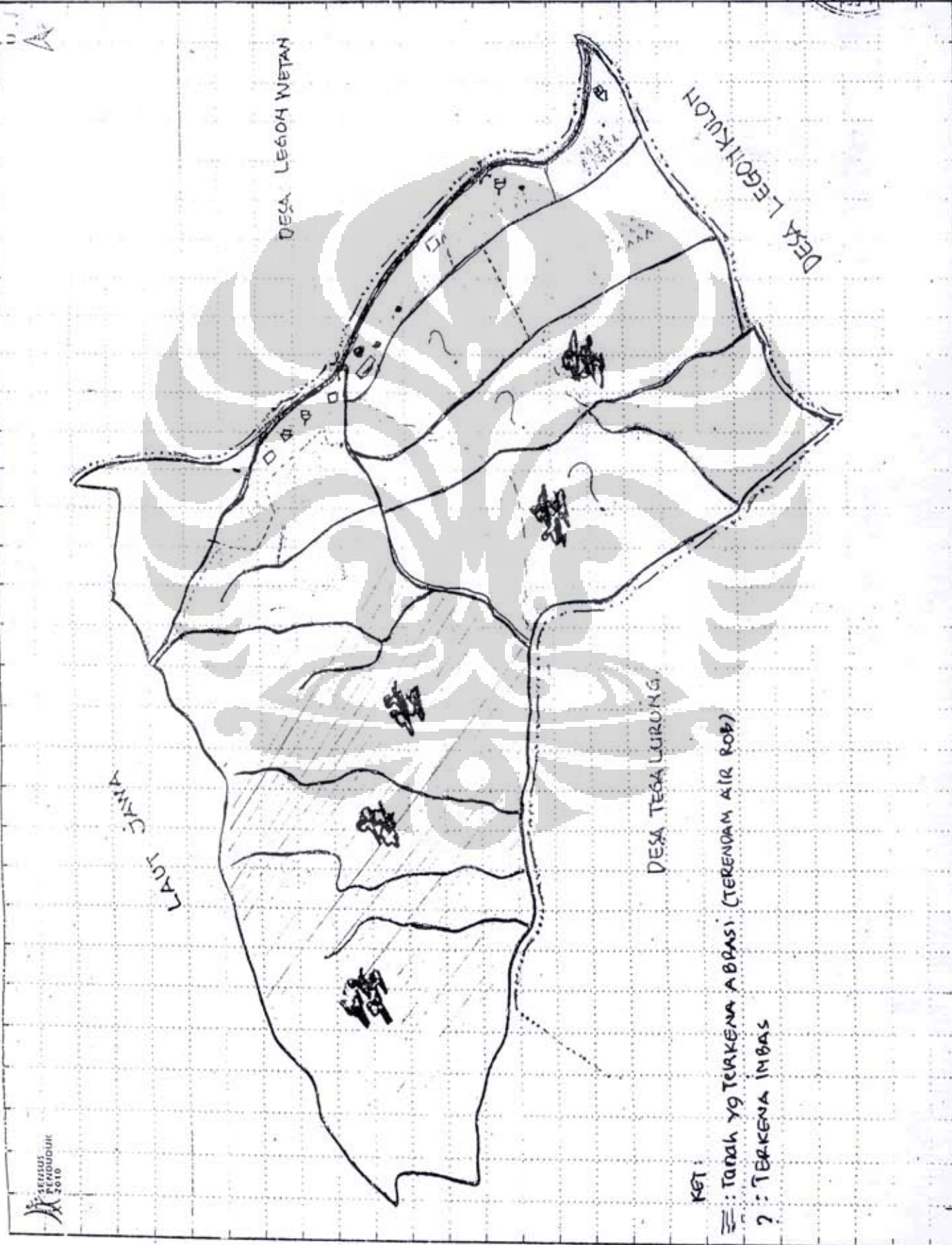
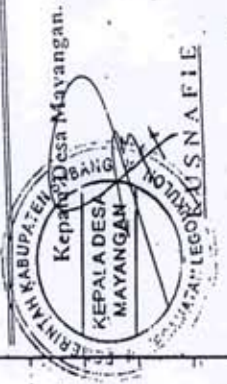
KECAMATAN : LEGONKULON  
 KABUPATEN : SUBANG  
 PROVINSI : JAWA BARAT

### LEGENDA

- Batas Desa : - - - - -
- Batas SLS II : - - - - -
- Batas SLS I : - - - - -
- Jalan Raya : = = = = =
- Jalan yang diperkeras : = = = = =
- Jalan Tanah /Gang : - - - - -
- Sungai : ~ ~ ~ ~ ~
- Jembatan : ( )
- Lahan Sawah : [Symbol]
- Desa : [Symbol]
- Sekolah : [Symbol]
- Masjid : [Symbol]

Digambar Oleh  
 Warnita M. Noor

WARNITA M. NOOR



KET:  
 [Symbol] : Tanah yg Terkena Abrasi (Terendam Air Rob)  
 [Symbol] : Terkena Imbas

107° 45' 25"    107° 45' 50"    107° 46' 15"    107° 46' 40"    107° 47' 05"

